

KATALOG BPS: 4102004.16

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT SUMATERA SELATAN



**2014**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
2015**

**INDIKATOR  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SUMATERA SELATAN  
2014**

<http://sumsel.bps.go.id>



**Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sumatera Selatan  
2015**

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<http://sumsel.pps.go.id>

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT SUMATERA SELATAN 2014

Katalog BPS: 4102004. 16  
Nomor Publikasi: 16522.15.07

Naskah:  
Seksi Statistik Kesra

Cover:  
Seksi Statistik Kesra

Diterbitkan Oleh:  
**Badan Pusat Statistik  
Provinsi Sumatera Selatan**

Dicetak Oleh:

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<http://sumsel.bps.go.id>

## KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 adalah merupakan publikasi yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan para pengguna data utamanya para perencana pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah. Keterangan yang dikumpulkan menyangkut berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi penduduk, antara lain mengenai kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi rumahtangga, perumahan dan sosial lainnya.

Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terbitnya publikasi ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saran dan kritik dari pembaca sangatlah kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan publikasi ini di masa mendatang. Akhirnya, semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi para konsumen data.

Palembang, Desember 2015  
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
SUMATERA SELATAN



Ir. BACHDI RUSWANA, MM  
NIP. 19570715 198003 1 002

<http://sumsel.bps.go.id>

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	5
1.3. Ruang Lingkup .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
BAB II. METODOLOGI	
2.1. Sumber Data .....	7
2.2. Konsep dan Definisi .....	7
2.2.1. Kependudukan .....	7
2.2.2. Kesehatan .....	9
2.2.3. Pendidikan .....	11
2.2.4. Ketenagakerjaan .....	13
2.2.5. Taraf dan Pola Konsumsi .....	15
2.2.6. Perumahan dan Sanitasi .....	16
BAB III. GAMBARAN UMUM TINGKAT KESEJAHTERAAN	
3.1. Kemiskinan .....	19
3.2. Pembangunan Manusia .....	24

#### BAB IV. KEPENDUDUKAN

4.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk .....	31
4.2. Persebaran dan Kepadatan Penduduk .....	37
4.3. Komposisi Penduduk .....	39
4.4. Fertilitas dan Mortalitas.....	43
4.5. Keluarga Berencana .....	51
4.6. Permasalahan dan Tantangan .....	56

#### BAB V. KESEHATAN

5.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk .....	60
5.2. Pemberian ASI dan Imunisasi .....	65
5.3. Status Gizi Balita .....	73
5.4. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan .....	75
5.5. Permasalahan dan Tantangan .....	86

#### BAB VI. PENDIDIKAN

6.1. Angka Melek Huruf .....	90
6.2. Rata-rata Lama Sekolah .....	93
6.3. Tingkat Pendidikan .....	95
6.4. Tingkat Partisipasi Sekolah .....	98
6.5. Fasilitas Pendidikan .....	105
6.6. Permasalahan dan Tantangan .....	107

#### BAB VII. KETENAGAKERJAAN

7.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja .....	109
7.2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) .....	112

7.3. Lapangan Usaha Utama .....	117
7.4. Status Pekerjaan .....	120
7.5. Jumlah Jam Kerja .....	124
7.6. Permasalahan dan Tantangan .....	126
BAB VIII. TARAF DAN POLA KONSUMSI	
8.1. Perkembangan Penduduk Miskin .....	129
8.2. Taraf Konsumsi Energi dan Protein .....	132
8.3. Perkembangan Tingkat Kesejahteraan .....	135
8.4. Perkembangan Distribusi Pendapatan .....	136
8.5. Pengeluaran Rumahtangga .....	139
8.6. Perubahan Harga .....	143
8.7. Permasalahan dan Tantangan .....	144
BAB IX. PERUMAHAN DAN SANITASI	
9.1. Kualitas Rumah Tinggal .....	147
9.2. Fasilitas Rumah Tinggal .....	151
9.3. Permasalahan dan Tantangan .....	155
BAB X. ASPEK SOSIAL LAINNYA	
10.1. Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi .....	157
10.2. Sosial Ekonomi Rumahtangga Lainnya .....	161
10.3. Permasalahan dan Tantangan .....	164
TABEL LAMPIRAN .....	165

<http://sumsel.bps.go.id>

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

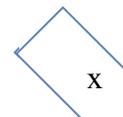
## DAFTAR TABEL

	<i>Hal</i>	
<b>GAMBARAN UMUM</b>		
Tabel 3.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008 – 2013	23
Tabel 3.2	IPM dan Komponen, Provinsi Sumatera Selatan 2005 – 2014	27
Tabel 3.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004 – 2014	29
<b>KEPENDUDUKAN</b>		
Tabel 4.1	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Sumatera Selatan Tahun 1971-2014	33
Tabel 4.2	Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1980 – 2014	35
Tabel 4.3	Kepadatan Penduduk Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1980 – 2014	38
Tabel 4.4	Persentase Penduduk Sumatera Selatan Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Tanggungan Tahun 1980-2014	40
Tabel 4.5	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur dan Angka Beban Tanggungan Tahun 2014	42
Tabel 4.6	Beberapa Indikator Fertilitas Sumatera Selatan	44

Tabel 4.7	Persentase Wanita Menurut Umur Perkawinan Pertama, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 - 2014	45
Tabel 4.8	Persentase Wanita Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama 2014	46
Tabel 4.9	Rata-rata Jumlah Anak Lahir Hidup Per Wanita Menurut Kelompok Umur Wanita, 2007 – 2014	47
Tabel 4.10	Rata-rata Jumlah Anak Lahir Hidup Per Wanita Menurut Kabupaten/Kota dan Tahun 2014	49
Tabel 4.11	Rata-rata Jumlah Anak Masih Hidup Per Wanita Menurut Kelompok Umur Wanita, 2007 – 2014	50
Tabel 4.12	Rata-rata Jumlah Anak Masih Hidup Per Wanita Menurut Kabupaten/Kota dan Tahun 2014	51
Tabel 4.13	Persentase Wanita Kawin Usia 15 – 19 Tahun yang Menggunakan KB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2006 – 2014	53
Tabel 4.14	Persentase Wanita Kawin Usia 15 – 19 Tahun yang Menggunakan KB Menurut Jenis Alat/Cara KB Tahun 2006 – 2014	54
Tabel 4.15	Persentase Wanita Kawin Usia 15 – 19 Tahun yang Menggunakan KB Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Alat/Cara KB Tahun 2014	55

## KESEHATAN

Tabel 5.1	Angka Kematian Bayi dan Anak serta Angka Harapan Hidup Sumatera Selatan`	61
-----------	--	----



Tabel 5.2	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2006 – 2014	62
Tabel 5.3	Angka Kesakitan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2013 – 2014	63
Tabel 5.4	Rata-rata Lama Sakit Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2006 – 2014	64
Tabel 5.5	Rata-Rata Lama Balita Usia 1 – 4 Tahun Mendapat ASI Menurut Kabupaten/ Kota 2006 – 2013/4	66
Tabel 5.6	Rata-Rata Lama Balita Usia 1 – 4 Tahun Mendapat ASI Eksklusif Menurut Kabupaten/ Kota 2006 – 2014	67
Tabel 5.7	Persentase Balita Usia 1 – 4 Tahun Mendapat ASI Eksklusif Menurut Kabupaten/Kota, 2007 – 2014	68
Tabel 5.8	Persentase Balita yang Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2006 – 2014	69
Tabel 5.9	Persentase Balita yang Diimunisasi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, 2014	70
Tabel 5.10	Persentase Balita Usia 1 – 4 Tahun Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Kabupaten/Kota, 2007 – 2014	72
Tabel 5.11	Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Tahun 2006 – 2014	76
Tabel 5.12	Persentase Bayi Menurut Penolong Persalinan, 2006 – 2014	77
Tabel 5.13	Persentase Bayi Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan, 2014	79
Tabel 5.14	Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri Menurut Jenis/Cara Pengobatan Yang Digunakan, 2006 – 2014	80

Tabel 5.15	Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri Menurut Kabupaten/Kota Jenis/Cara Pengobatan Yang Digunakan, 2014	82
Tabel 5.16	Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2006 – 2014	83
Tabel 5.17	Persentase Penduduk Yang Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat, 2014	84
<b>PENDIDIKAN</b>		
Tabel 6.1	Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur, 2006 – 2014	91
Tabel 6.2	Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014	92
Tabel 6.3	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin, 2007 – 2014	93
Tabel 6.4	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014	94
Tabel 6.5	Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2014	97
Tabel 6.6	Angka Partispasi Sekolah Menurut Umur, 2006 – 2014	98
Tabel 6.7	Angka Partispasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, 2014	100
Tabel 6.8	Angka Partispasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan, 2006 – 2014	101
Tabel 6.9	Angka Partispasi Murni Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2014	102

Tabel 6.10	Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan, 2006 – 2014	103
Tabel 6.11	Angka Partisipasi Kasar Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2014	104
Tabel 6.12	Jumlah Sekolah, Jumlah Guru, Jumlah Siswa, Rasio Siswa-Sekolah dan Rasio Siswa-Guru Menurut Jenjang Pendidikan, 2008/2009 – 2013/2014	106

#### **KETENAGAKERJAAN**

Tabel 7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2006 – 2014	110
Tabel 7.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014	111
Tabel 7.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin, 2006 – 2014	113
Tabel 7.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014	114
Tabel 7.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan, 2006 – 2014	115
Tabel 7.6	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2006 – 2014	117
Tabel 7.7	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha Utama, 2014	120
Tabel 7.8	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2006 – 2014	122
Tabel 7.9	Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut	124

	Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2014	
Tabel 7.10	Persentase Penduduk Yang Bekerja Kurang dari 35 Jam Seminggu Menurut Jenis Kelamin, 2006 – 2014	125
Tabel 7.11	Persentase Penduduk Yang Bekerja Kurang dari 35 Jam Seminggu Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin	126

#### **TARAF DAN POLA KONSUMSI**

Tabel 8.1	Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Berbagai Indikator, 2007 – 2013	131
Tabel 8.2	Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita Per Hari, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 – 2014	133
Tabel 8.3	Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita Per Hari dan Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Kabupaten/Kota, 2014	134
Tabel 8.4	Beberapa Indikator Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 – 2014	135
Tabel 8.5	Distribusi Pembagian Pengeluaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 – 2014	137
Tabel 8.6	Distribusi Pembagian Pengeluaran Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota, 2014	139
Tabel 8.7	Persentase Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 – 2014	140
Tabel 8.8	Persentase Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014	142
Tabel 8.9	Laju Inflasi Bulan Kota Palembang Tahun 2008 – 2014 (2007=100)	143

## PERUMAHAN DAN SANITASI

Tabel 9.1	Persentase Rumahtangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2006 – 2014	148
Tabel 9.2.	Persentase Rumahtangga Menurut Kabupaten/Kota dan Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2014	150
Tabel 9.3	Persentase Rumahtangga Menurut Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan, 2006 – 2014	152
Tabel 9.4	Persentase Rumahtangga Menurut Kabupaten/Kota dan Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan, 2014	154

## ASPEK SOSIAL LAINNYA

Tabel 10.1	Persentase Rumahtangga Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi, 2006 – 2014	158
Tabel 10.2	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi, 2014	160
Tabel 10.3	Persentase Rumahtangga Menurut Beberapa Indikator Sosial Ekonomi Rumahtangga Lainnya, 2006 – 2014	162
Tabel 10.4	Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Beberapa Indikator Sosial Ekonomi Rumahtangga Lainnya, 2014	163

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<http://sumsel.bps.go.id>

## DAFTAR GAMBAR

	<i>Hal</i>	
Gambar 3.1	Jumlah (Dalam Ribuan) dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003 – 2014	21
Gambar 3.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2014	28
Gambar 4.1.	Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan 1971 – 2014	32
Gambar 4.2.	Angka Beban Tanggungan Provinsi Sumatera Selatan 1980 – 2014	41
Gambar 5.1.	Angka Kematian Bayi Provinsi Sumatera Selatan 1971 – 2012	60
Gambar 5.2.	Persentasi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) Sumatera Selatan 2003 – 2010	74
Gambar 5.3.	Persentasi Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007	74
Gambar 5.4.	Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Puskesmas dan Pustu 2007 – 2014	74
Gambar 5.5.	Persentase Bayi menurut Penolong Persalinan Provinis Sumatera Selatan 2007 – 2014	78
Gambar 6.1	Angka Buta Huruf Menurut Jenis Kelamin, 2007 – 2014	91
Gambar 6.2.	Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 2008 – 2014	96
Gambar 7.1.	TPT Menurut Pendidikan 2009 – 2014	116

Gambar 7.2.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama 2011 -2014	118
Gambar 8.1	Persentase Pengeluaran Makanan Menurut Daerah, 2008 – 2014	141

<http://sumsel.bps.go.id>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang tengah mengukir sejarah baru untuk terus berkembang dan maju. Menjadi bangsa yang besar dan maju adalah cita-cita bangsa Indonesia bersama. Cita-cita untuk menjadikan negeri dan bangsa yang sejahtera, mandiri, demokratis, dan adil merupakan cita-cita yang luhur dan mulia dari segenap rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke; dari Miangas sampai Pulau Rote. Segenap bangsa Indonesia menginginkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Sejarah telah mengajarkan bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melewati sejumlah cobaan, tantangan, dan hambatan. Bangsa Indonesia tetap tegak berdiri, melangkah dengan pasti, dan berhasil melewati proses sejarah yang panjang dengan selamat.

Visi Pembangunan Nasional 2010 – 2014 adalah **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN**. **Kesejahteraan Rakyat** artinya terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. **Demokrasi** artinya terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia. **Keadilan** berarti terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat

dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Dengan demikian, misi Indonesia 2014 adalah **Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera, Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi, serta Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang,**

Agenda peningkatan kesejahteraan rakyat tetap menjadi prioritas pemerintah. Wujud akhir dari perbaikan kesejahteraan akan tercermin pada peningkatan pendapatan, penurunan tingkat pengangguran dan perbaikan kualitas hidup rakyat. Perbaikan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan melalui sejumlah program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan dan penciptaan kesempatan kerja, termasuk peningkatan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Program peningkatan kesejahteraan dilakukan dengan mendorong sektor riil dan pemihakan kepada usaha kecil menengah dan koperasi serta terus menjaga stabilitas ekonomi makro. Upaya-upaya menggerakkan sektor riil telah dan akan terus dilakukan melalui berbagai intervensi pemerintah yang konstruktif dan terukur. Sedangkan pelaksanaan kebijakan ekonomi makro (fiskal dan moneter) dilakukan selaras dengan tujuan mengelola ekonomi secara sehat dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut dapat membuahkan hasil apabila didukung oleh birokrasi yang efektif, efisien dan bebas dari konflik kepentingan. Penyelenggaraan program peningkatan kesejahteraan rakyat ini dilaksanakan seiring dengan upaya peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi akan mendukung terciptanya penyelenggaraan program pembangunan ekonomi yang makin berkualitas, yaitu pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada peningkatan produktivitas dan daya saing, serta makin memacu terciptanya kreativitas dan inovasi.

Pemerintah daerah, sebagai representasi negara, dapat menggandeng swasta (sektor kedua) untuk memacu pertumbuhan ekonomi sekaligus memfasilitasi elemen-elemen masyarakat lokal dalam menggerakkan ekonomi rakyat untuk menciptakan pemerataan. Pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua skema untuk membangun kemakmuran. Di sisi lain pemerintah daerah dapat meluncurkan reformasi pelayanan publik dan kebijakan (pembangunan) sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pelayanan publik yang paling dasar adalah pendidikan dan kesehatan, sementara pengurangan kemiskinan merupakan aksi mendasar dalam kebijakan sosial.

Dalam konteks Provinsi Sumatera Selatan, konsen Pemerintah Provinsi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat tercermin melalui visi Pemerintah Provinsi yaitu **"Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas yang Berbudaya"**. Visi tersebut terjabarkan dalam 10 misi utama, di antaranya adalah "Mengembangkan dan membina serta memfasilitasi pembentukan sumber daya manusia (SDM) Sumatera Selatan yang produktif, inovatif dan peduli melalui semua jalur dan jenjang pendidikan baik formal maupun informal" serta "Meningkatkan dan meratakan pembangunan menuju kesejahteraan yang bermartabat".

Dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Sumatera Selatan tersebut yaitu untuk mewujudkan Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas yang Berbudaya, maka dilaksanakan berbagai program pembangunan di berbagai sektor. Program-program pembangunan tersebut tentu saja telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun beberapa diantaranya berjalan cukup lambat dan masih menyisakan tugas yang berat untuk mencapai target, khususnya yang terkait dengan tujuan pembangunan milenium (MGDs).

Salah satu tugas Pemerintah Daerah yang cukup berat adalah menurunkan angka kemiskinan untuk mencapai target MDGs Nasional sebesar 7,5 persen pada tahun 2015. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2014 angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 13,62 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 tingkat kemiskinan tersebut sedikit mengalami penurunan. Tercatat tingkat kemiskinan pada tahun 2013 sebesar 14,06 persen. Pencapaian angka kemiskinan Sumatera Selatan masih jauh dibandingkan target MDGs Nasional pada tahun 2015 yaitu 7,5 persen.

Tugas Pemerintah Daerah lainnya adalah bagaimana mencapai pendidikan dasar bagi semua. Sesuai target pembangunan milenium pada tahun 2015 diharapkan semua anak perempuan dan laki-laki dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar yaitu SD dan SLTP. Pada tahun 2014, angka partisipasi murni jenjang pendidikan SD di Provinsi Sumatera Selatan sudah mencapai angka yang cukup besar yaitu mencapai 96,13 persen. Namun demikian, untuk jenjang pendidikan SLTP, pencapaian partisipasi sekolah masih jauh dari target MDGs karena angka partisipasi murni baru mencapai 75,87 persen.

Untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perkembangan kesejahteraan masyarakat yang telah dicapai selama ini di Provinsi Sumatera Selatan diperlukan indikator-indikator kesejahteraan rakyat yang akan memberikan informasi mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek meliputi kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi, kemiskinan, perumahan dan lingkungan serta aspek sosial lainnya. Informasi tersebut selain sebagai bahan evaluasi pembangunan yang telah dilakukan selama ini di Provinsi Sumatera Selatan juga sebagai bahan masukan penetapan kebijakan pembangunan Sumatera Selatan di tahun-tahun mendatang.

## 1.2. Tujuan

Penyusunan buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Selatan 2013 ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai potret dan perkembangan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Untuk mengukur taraf kesejahteraan rakyat digunakan indikator dampak. Publikasi ini juga menyajikan indikator-indikator input, proses, dan output untuk memberikan gambaran tentang investasi dari berbagai program peningkatan kesejahteraan rakyat serta proses dan manfaat dari program tersebut pada tingkat individu, keluarga, dan penduduk. Antara indikator input dan indikator dampak tidak selalu sejalan. Penjelasan sederhana; input atau investasi dalam suatu program hanya akan memberikan dampak yang diharapkan jika implementasi program berjalan secara benar. Oleh karena itu kesenjangan antara input dan dampak suatu program kesejahteraan rakyat sebaiknya dilihat sebagai pertanda adanya kekeliruan dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat.

## 1.3. Ruang Lingkup

Dimensi kesejahteraan rakyat disadari sangat luas dan kompleks sehingga suatu taraf kesejahteraan rakyat hanya dapat terlihat (*visible*) jika dilihat dari suatu aspek tertentu. Oleh karena itu dalam publikasi ini kesejahteraan rakyat diamati dari berbagai aspek yang spesifik yaitu kependudukan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, konsumsi rumah tangga, dan perumahan. Setiap aspek disajikan secara terpisah dan merupakan bab tersendiri. Selain itu, tidak semua permasalahan kesejahteraan rakyat dapat diamati dan atau dapat diukur. Publikasi ini hanya menyajikan permasalahan kesejahteraan rakyat dapat diamati dan dapat

diukur (*measurable welfare*) baik dengan menggunakan indikator tunggal maupun indikator komposit.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan mengenai aspek-aspek kesejahteraan rakyat dalam buku ini lebih sistematis, maka penulisan didasarkan pada sistematika sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: METODOLOGI
BAB III	: GAMBARAN UMUM TINGKAT KESEJAHTERAAN
BAB IV	: KEPENDUDUKAN DAN KB
BAB V	: KESEHATAN
BAB VI	: PENDIDIKAN
BAB VII	: KETENAGAKERJAAN
BAB VIII	: TARAF DAN POLA KONSUMSI
BAB IX	: PERUMAHAN DAN SANITASI
BAB X	: ASPEK SOSIAL LAINNYA
BAB XI	: PENUTUP

## **BAB II METODOLOGI**

### **2.1. Sumber Data**

Sumber data utama yang digunakan dalam buku ini berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Meskipun data Susenas dan Sakernas mencakup berbagai aspek kesejahteraan rakyat, beberapa indikator penunjang dapat diperoleh melalui sumber-sumber lain khususnya dari Sumatera Selatan Dalam Angka.

### **2.2. Konsep dan Definisi**

Metode analisis yang digunakan pada penyusunan indikator-indikator dalam buku ini adalah dengan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Konsep serta definisi dari indikator-indikator yang digunakan disajikan di bawah ini.

#### **2.2.1. Kependudukan**

- a. **Penduduk** adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama enam bulan atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari enam bulan.
- b. **Laju Pertumbuhan Penduduk** adalah persentase perubahan penduduk dalam periode tertentu (biasanya setahun). Rumus yang digunakan adalah:

$$P_t = P_0(1+r)^t$$

$P_t$  adalah jumlah penduduk pada tahun  $t$

$P_0$  adalah penduduk pada tahun 0

$r$  adalah laju pertumbuhan penduduk

- c. **Tingkat Kepadatan** adalah jumlah penduduk di suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah yang bersangkutan. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Tingkat Kepadatan (jiwa/km}^2\text{)} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Suatu Wilayah (jiwa)}}{\text{Luas Wilayah Yang Bersangkutan (km}^2\text{)}}$$

- d. **Rasio Jenis Kelamin** (*Sex Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Jenis Kelamin} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Laki - laki}}{\text{Jumlah Penduduk Perempuan}} \times 100$$

- e. **Angka Beban Tanggungan** (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam usia tidak produktif (0-14 tahun/penduduk usia muda dan 65 tahun ke atas/penduduk usia tua) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Angka Beban Tanggungan} = \frac{\text{Penduduk Usia Tidak Produktif}}{\text{Penduduk Usia 15 - 64 Tahun}} \times 100$$

- f. **Total Fertilty Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total** adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang usia reproduksinya.

### 2.2.2. Kesehatan

- a. **Angka Kematian Bayi (AKB)** adalah perbandingan antara jumlah bayi (0-1 tahun) yang meninggal dengan jumlah kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Atau rata-rata banyaknya bayi yang meninggal setiap seribu kelahiran hidup. Rumus yang digunakan:

$$AKB = \frac{\text{Jumlah kematian usia 0 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup selama 1 tahun}} \times 1000$$

- b. **Angka Harapan Hidup (AHH)** adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup (dalam tahun) dari lahir yang dapat ditempuh oleh seseorang.
- c. **Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan** adalah rasio antara banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu saat.
- d. **Angka Kesakitan** adalah rasio antara banyaknya penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan terganggu kegiatan sehari-hari dibagi dengan jumlah penduduk pada suatu saat.

- e. **Rata-rata Lama Sakit** adalah rata-rata lamanya terganggu kesehatan (dalam hari) yaitu terganggunya kegiatan/aktivitas sehari-hari bagi seseorang yang mengalami keluhan kesehatan.
- f. **Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Sarana Kesehatan** adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah sarana kesehatan yang tersedia
- g. **Persentase Persalinan oleh Tenaga Medis** adalah rasio banyaknya proses persalinan yang ditolong oleh tenaga medis (dokter, paramedis, bidan, dan perawat) terhadap seluruh persalinan yang terjadi pada saat tertentu.
- h. **Mengobati sendiri** adalah upaya art yang melakukan pengobatan dengan menentukan jenis obat sendiri (tanpa saran/resep dari tenaga kesehatan/batra).
- i. **Berobat jalan** adalah kegiatan atau upaya art yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapatkan pengobatan dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah art.

### 2.2.3. Pendidikan

- a. **Bersekolah** adalah terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal, baik yang di bawah pengawasan Depdiknas maupun departemen/instansi lain.
- b. **Angka Melek Huruf (AMH)** adalah perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Angka Melek Huruf} = \frac{\text{Penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf}}{\text{Penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100$$

- c. **Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*)** adalah rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk dewasa (15 tahun ke atas) di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalannya. *MYS* dihitung dengan menggunakan tiga variabel secara simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.
- d. **Angka Partisipasi Sekolah (APS)** adalah perbandingan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu yang masih sekolah dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian. Rumus yang digunakan adalah:

$$APS_i = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang bersekolah}_i}{\text{Jumlah Penduduk}_i}$$

i = kelompok usia: 7-12, 13-15, 16-18

- e. **Angka Partisipasi Murni (APM)** adalah perbandingan jumlah penduduk yang masih sekolah pada pada jenjang tertentu (SD, SLTP atau SLTA) pada kelompok usia yang sesuai dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian. Rumus yang digunakan adalah:

$$APM_i = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang bersekolah usia bersesuaian}_i}{\text{Jumlah Penduduk usia bersesuaian}}$$

i = jenjang: SD (7-12), SLTP (13-15), SLTA (16-18)

- f. **Angka Partisipasi Kasar (APK)** adalah perbandingan jumlah penduduk yang masih sekolah pada pada jenjang tertentu (SD, SLTP atau SLTA) dengan jumlah seluruh penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian. Rumus yang digunakan adalah:

$$APK_i = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang bersekolah jenjang } i}{\text{Jumlah Penduduk usia bersesuaian pada jenjang } i}$$

i = jenjang: SD (7-12), SLTP (13-15), SLTA (16-18)

- g. **Rasio Murid dan Sekolah** adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang pendidikan/sekolah dengan jumlah sekolah pada pendidikan tersebut. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Murid dan Sekolah}_i = \frac{\text{Jumlah Murid}_i}{\text{Jumlah Sekolah}_i}$$

i = jenjang pendidikan (SD, SLTP, SLTA)

- h. **Rasio Murid dan Guru** adalah perbandingan antara jumlah murid dan guru pada jenjang pendidikan yang bersesuaian. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Rasio Murid dan Guru}_i = \frac{\text{Jumlah Murid}_i}{\text{Jumlah Guru}_i}$$

$i$  = jenjang pendidikan (SD, SLTP, SLTA)

#### 2.2.4. Ketenagakerjaan

- a. **Bekerja** adalah **kegiatan** melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa atau keuntungan, baik berupa uang atau barang termasuk bagi pengusaha.
- b. **Menganggur** adalah keadaan seseorang di mana selama seminggu yang lalu (dari masa pencacahan) tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha atau sudah diterima tetapi belum mulai bekerja atau putus asa dalam mencari pekerjaan.
- c. **Angkatan Kerja (AK)** adalah mereka yang selama seminggu yang lalu (dari masa pencacahan) mempunyai pekerjaan baik yang bekerja maupun yang

sementara tidak bekerja (karena sakit, cuti, dan sebagainya) serta mereka yang sedang menganggur.

- d. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (umur 15 tahun ke atas). Rumus yang digunakan yaitu:

$$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja (15+)}} \times 100$$

- e. **Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)** adalah perbandingan antara penduduk usia kerja yang mempunyai pekerjaan (sedang bekerja atau sementara tidak bekerja) terhadap total penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{TKK} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$

- f. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah perbandingan antara penduduk usia kerja yang menganggur (tidak mempunyai pekerjaan dan sedang berusaha mencari kerja atau sedang mempersiapkan usaha atau sudah diterima tapi belum mulai bekerja) terhadap jumlah penduduk usia kerja yang masuk dalam angkatan kerja. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{TPT} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Menganggur}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$

- g. **Jumlah jam kerja** adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan selama seminggu terakhir.
- h. **Lapangan usaha/pekerjaan** ialah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/ kantor tempat seseorang bekerja, atau yang dihasilkan oleh perusahaan/kantor tempat responden bekerja.
- i. **Status pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan meliputi Berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, Buruh/karyawan/pegawai, Pekerja bebas dan Pekerja keluarga/tak dibayar.

#### 2.2.5. Taraf dan Pola Konsumsi

- a. **Konsumsi/pengeluaran** (makanan maupun non makanan) adalah nilai pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga baik berasal dari pembelian, produksi sendiri atau pemberian. Untuk konsumsi yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian, nilainya diperhitungkan sesuai dengan harga pasar setempat.
- b. **Penduduk Miskin** adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran rumahtangga sebulan di bawah garis kemiskinan.
- c. **Garis Kemiskinan** adalah nilai rupiah yang dibutuhkan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar selama sebulan yaitu 2100 kkal/kapita/hari ditambah kebutuhan dasar non makanan khususnya untuk pangan dan papan.

- d. **Gini Ratio** adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan di mana nilainya berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0 ketimpangan pendapatan semakin rendah dan semakin mendekati 1 ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Rumus yang digunakan adalah:

$$G = \left| 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1}) \right|$$

$X_k$  adalah kumulatif proporsi penduduk

$$X_k = \frac{\sum_{m=1}^k X_m}{\sum X}$$

di mana  $k = 0, \dots, n$ ,  $X_0 = 0$ ,  $X_n = 1$ .

$Y_k$  adalah kumulatif proporsi pendapatan

$$Y_k = \frac{\sum_{m=1}^k Y_m}{\sum Y}$$

di mana  $k = 0, \dots, n$ ,  $Y_0 = 0$ ,  $Y_n = 1$ .

#### 2.2.6. Perumahan dan Sanitasi

- a. **Luas lantai** adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap). Bagian-bagian yang digunakan bukan untuk keperluan sehari-hari tidak dimasukkan dalam perhitungan luas lantai seperti lumbung padi, kandang ternak, lantai jemur (hamparan semen) dan ruangan khusus untuk usaha (misalnya warung).
- b. **Atap layak** adalah atap selain daun-daunan yaitu Beton, Genteng, Sirap, Seng dan Asbes

- c. **Dinding Pemanen** adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako (dinding tembok) dan dinding kayu
- d. **Air bersih** adalah sumber air minum yang berasal dari air ledeng, air kemasan dan air isi ulang atau yang berasal dari pompa/sumur/mata air terlindung dengan jarak ke tempat pembuangan limbah lebih dari 10 m.
- e. **Jamban Sehat (Sanitasi Layak)** adalah jamban/kakus yang digunakan oleh rumah tangga responden sendiri serta dilengkapi tangki pembuangan (tangki septik).

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<http://sumsel.bps.go.id>

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM TINGKAT KESEJAHTERAAN**

#### **3.1. Kemiskinan**

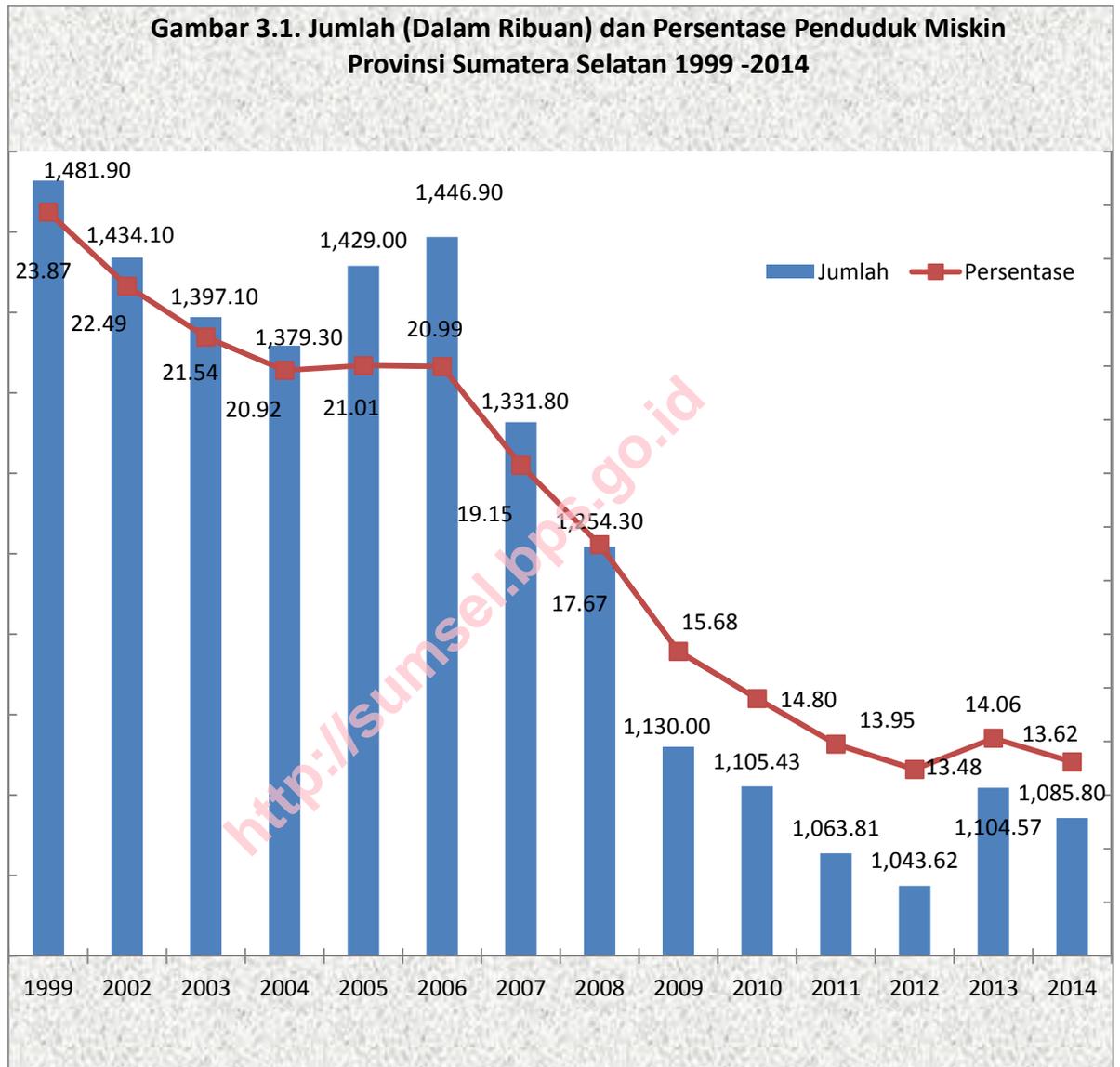
Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Mengacu pada strategi nasional penanggulangan kemiskinan bahwa definisi kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kemiskinan tidak hanya dipahami sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Ada tiga kebijakan yang saat ini mempengaruhi perhatian pemerintah daerah terhadap kemiskinan; (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan pemerintah kabupaten/kota mengemban 'fungsi-fungsi wajib' termasuk untuk menyediakan layanan umum bagi masyarakat yang juga diatur

dalam Undang-Undang Dasar 1945, (2) gerakan nasional untuk mengembangkan dan melaksanakan Strategi Penanggulangan Kemiskinan membutuhkan partisipasi dari pemerintah kabupaten/kota, (3) program-program nasional berupa bantuan jaminan sosial yang ditujukan untuk meningkatkan keamanan pangan dan mengurangi kerentanan ekonomi yang disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu langkah pengentasan kemiskinan juga dipengaruhi oleh sejauh mana perhatian pemerintah kabupaten/kota itu sendiri misalnya dengan menciptakan desa-desa mandiri yang sejahtera untuk menjaga kelangsungan finansial mereka.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 167 menyatakan bahwa "Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaringan sosial. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan sesuai Perpres No. 13 tahun 2009 dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang bertanggungjawab mengkoordinasikan pengentasan kemiskinan di tingkat nasional. Berdasarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 di tingkat Provinsi Dan Kabupaten/Kota juga telah dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai salah satu mitra kerja TNP2K di tingkat daerah. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota juga memperoleh dana alokasi umum yang sebanding dengan tingkat kemiskinan di daerahnya. Berbagai subsidi juga telah diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi beban penduduk miskin. Dalam konteks regional kabupaten/kota beberapa program pemerintah kabupaten/kota secara langsung juga ditujukan untuk mengurangi kemiskinan di wilayahnya.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Selatan

Dengan memperhatikan persoalan kemiskinan serta skala kemiskinan yang ada, beban dan tantangan penanggulangan kemiskinan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sangatlah besar. Berdasarkan data, pada tahun 2005 jumlah

penduduk miskin adalah sebanyak 1.429.000 jiwa. Angka ini masih cukup besar karena meliputi sekitar 21,01 persen dari seluruh penduduk Sumatera Selatan. Meskipun, dalam 5 tahun berikutnya angka kemiskinan memiliki trend yang menurun di mana pada tahun 2010 angka kemiskinan menjadi 1.105.430 jiwa atau sebesar 14,80 persen. Pada tahun 2011 penduduk miskin di Sumatera Selatan berjumlah 1.061.870 jiwa atau sebesar 13,95 persen. Pada tahun 2012 tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan mengalami penurunan yaitu menjadi 1.043.600 jiwa atau sekitar 13,48 persen. Tingkat kemiskinan tersebut mengalami kenaikan pada tahun 2013 yaitu menjadi 1.104.600 jiwa atau sekitar 14,06 persen. Pada tahun 2014 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami sedikit penurunan menjadi 1.058.800 jiwa atau sekitar 13,62 persen.

Memperbandingkan angka kemiskinan menurut kabupaten/kota di Sumatera Selatan, akan terlihat bahwa persentase penduduk miskin tertinggi tahun 2013 diperlihatkan di Kabupaten Lahat mencapai 18,61 persen, Kabupaten Musi Banyuasin (18,02 persen) dan Kabupaten Musi Rawas (17,85 persen). Sedangkan persentase penduduk miskin terendah dijumpai di Kota Pagaralam (9,00 persen), Kabupaten OKU Timur (10,28 persen) dan Kota Prabumulih (11,23 persen). Namun demikian secara absolut jumlah penduduk miskin terbanyak di Sumatera Selatan berada di Kota Palembang (206,0 ribu jiwa), disusul oleh Kabupaten Ogan Komering Ilir (121,4 ribu jiwa), Kabupaten Muara Enim (108,2 ribu jiwa), Kabupaten Musi Banyuasin (107,2 ribu jiwa) dan Kabupaten Musi Rawas (98,8 ribu jiwa).

Tabel 3.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2008 – 2013

Kabupaten/Kota	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(01) Ogan Komering Ulu	38,6 (14,64)	35,1 (13,17)	39,9 (12,28)	38,3 (11,58)	37,6 (11,19)	42,0 (12,31)
(02) Ogan Komering Ilir	122,7 (17,67)	114,2 (16,17)	116,5 (15,98)	111,9 (15,06)	109,9 (14,54)	121,4 (15,82)
(03) Muara Enim	118,4 (17,98)	106,4 (15,96)	104,4 (14,51)	100,4 (13,71)	98,6 (13,21)	108,2 (14,26)
(04) Lahat	78,7 (23,21)	71,3 (20,98)	70,5 (19,02)	67,7 (17,92)	66,6 (17,46)	71,8 (18,61)
(05) Musi Rawas	120,7 (24,27)	108 (21,40)	102,0 (19,38)	98,0 (18,25)	96,4 (17,67)	98,8 (17,85)
(06) Musi Banyuasin	129,5 (25,45)	118,9 (22,76)	113,4 (20,06)	108,9 (18,99)	107,0 (18,29)	107,2 (18,02)
(07) Banyuasin	122,4 (15,38)	112,1 (13,72)	93,0 (12,39)	89,3 (11,66)	87,9 (11,27)	97,1 (12,28)
(08) OKU Selatan	47,7 (14,56)	42,1 (12,73)	36,7 (11,53)	35,3 (10,84)	34,7 (10,49)	38,9 (11,57)
(09) OKU Timur	69,6 (12,12)	57,7 (9,95)	59,9 (9,81)	57,5 (9,23)	56,5 (8,98)	65,4 (10,28)
(10) Ogan Ilir	67,1 (17,78)	60,1 (15,65)	53,3 (13,97)	51,3 (13,18)	50,4 (13,37)	55,4 (13,86)
(11) Empat Lawang	39,1 (18,37)	33,7 (15,80)	32,5 (14,74)	31,3 (13,82)	30,6 (13,37)	30,5 (13,10)
(71) Palembang	235,3 (16,66)	211,8 (14,75)	218,5 (15,00)	210,0 (12,19)	206,5 (13,59)	206,0 (13,36)
(72) Prabumulih	20,9 (15,39)	19,1 (13,93)	21,0 (12,93)	20,2 (12,19)	19,9 (11,71)	19,4 (11,23)
(73) Pagaralam	11,8 (10,23)	11,2 (9,66)	12,4 (9,81)	11,9 (9,24)	11,7 (9,00)	11,8 (9,00)
(74) Lubuklinggau	31,8 (17,36)	28,1 (15,12)	30,9 (15,30)	29,7 (14,43)	29,2 (13,89)	30,7 (14,37)
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>1.254,3</b> <b>(17,67)</b>	<b>1.130,0</b> <b>(15,68)</b>	<b>1.105,0</b> <b>(14,80)</b>	<b>1.061,9</b> <b>(13,95)</b>	<b>1.043,6</b> <b>(13,48)</b>	<b>1.104,6</b> <b>(14,06)</b>

Catatan :

- 1). Jumlah Penduduk Miskin dalam ribu jiwa
- 2). Angka dalam Kurung menunjukkan persentase

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

### 3.2. Pembangunan Manusia

*“Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan sederhana. Tetapi seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk mengumpulkan harta dan uang. “*

Kalimat di atas merupakan kalimat pembuka pada *Human Development Report* (HDR) pertama yang dipublikasikan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990. Kalimat ini dengan jelas menekankan pesan utama yaitu pembangunan yang berpusat pada manusia, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Berbeda dengan konsep pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menguntungkan manusia. Pembangunan manusia memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia di semua golongan masyarakat pada semua tahap pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara khusus mengukur capaian pembangunan manusia menggunakan komponen dasar kualitas hidup. IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, diukur dengan harapan hidup pada saat lahir, pengetahuan/tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga) dan suatu standar hidup yang layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah).

Mulai tahun 2014 penghitungan IPM berubah menggunakan metode baru (back casting mulai tahun 2010). Dasar perubahan metode terdiri dari segi indikator dan metode penghitungan. Perubahan indikator dikarenakan beberapa indikator sudah tidak tepat digunakan dalam penghitungan IPM seperti indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Indikator **Angka Melek Huruf (AMH)** sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik. Sedangkan indikator **Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita** tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Selain dari segi indikator, penggunaan rumus **rata-rata aritmatik** dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi tertutupi oleh capaian tinggi di dimensi lain, yang seharusnya tidaklah demikian, karena masing-masing dimensi dianggap mempunyai pengaruh yang sama besar dalam pembangunan manusia.

Dengan menggunakan metode baru, indikator AMH pada metode lama diganti dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan PDB diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB). Sedangkan dari segi agregasi (penghitungan) diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Keunggulan yang didapat dari penggunaan IPM metode baru diantaranya adalah penggunaan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif) serta capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Dengan memasukkan **Rata-rata Lama Sekolah** dan angka **Harapan Lama Sekolah**, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. **PNB** menggantikan **PDB** karena lebih menggambarkan

pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan **rata-rata geometrik** dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Dengan demikian IPM akan memberikan pengukuran yang menyeluruh terhadap pembangunan karena mencakup aspek kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh Angka Harapan Hidup, aspek pendidikan yang diwakili oleh angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah serta aspek ekonomi yang diwakili oleh komponen daya beli (PPP). Perkembangan besaran IPM dari waktu ke waktu akan merupakan gambaran dari perkembangan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah.

Tabel 3.2. memberikan gambaran perkembangan IPM dan komponennya di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2010– 2014. Secara umum IPM Provinsi Sumatera Selatan mengalami trend yang meningkat selama periode tersebut, hal ini tentu saja memberikan gambaran adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan selama periode tersebut. Keempat komponen IPM Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan, di mana Angka Harapan Hidup meningkat dari 68,34 tahun pada tahun 2010 menjadi 68,93 tahun pada tahun 2014, hal ini mencerminkan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Sumatera Selatan dalam periode tersebut. Aspek pendidikan yang diwakili oleh dua komponen yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (LLS) dan Rata-rata Lama Sekolah juga menunjukkan trend yang meningkat pada periode tersebut sebagai gambaran meningkatnya pendidikan masyarakat selama 2010 – 2014. Aspek yang terakhir merupakan aspek ekonomi yang memperlihatkan meningkatnya daya beli masyarakat Sumatera Selatan periode 2010 – 2014 tersebut.

Tabel 3.2. IPM (Tahun Dasar 2010) dan Komponen, Provinsi Sumatera Selatan 2006 - 2014

IPM dan Komponen	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
IPM*)	71,09	71,40	72,05	72,61	64,44	65,12	65,79	66,16	66,75
Angka Harapan Hidup	68,8	69,00	69,20	69,40	68,34	68,51	68,67	68,84	68,93
Angka Harapan Lama Sekolah **)	96,59	96,66	97,05	97,21	11,03	11,21	11,42	11,46	11,75
Rata-rata Lama Sekolah	7,60	7,60	7,60	7,66	7,34	7,42	7,50	7,53	7,66
PPP (000 *)	625,30	617,59	623,49	628,30	8.536	8.803	9.040	9.231	9.302

Catatan :

\*) Penghitungan IPM dan PPP tahun 2006-2009 menggunakan penghitungan IPM metode lama dengan tahun dasar tahun 2000

\*\*). Tahun 2006-2009 merupakan Angka Melek Huruf

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Sekalipun trend IPM menunjukkan peningkatan periode 2010 – 2014, namun nilai IPM Provinsi Sumatera Selatan masih jauh dari nilai IPM maksimum yaitu 100. Pada tahun 2014, nilai IPM Provinsi Sumatera Selatan baru mencapai 66,75. IPM Provinsi Sumatera Selatan berada di atas IPM Nasional (Pada tahun 2014, angka IPM Indonesia sebesar 68,90). Sedangkan dibandingkan dengan provinsi yang lain, IPM Sumatera Selatan berada pada posisi menengah dengan peringkat 23 pada tahun 2014.

Gambar 3.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Sumatera Selatan dan Indonesia Tahun 2010 – 2014



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

Untuk Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan, IPM tertinggi adalah Kota Palembang dengan nilai IPM sebesar 76,02 disusul oleh Kota Lubuk Linggau dengan nilai IPM sebesar 72,84. Sedangkan IPM terendah dimiliki oleh Kabupaten Pali dengan nilai IPM sebesar 59,89, disusul oleh Kabupaten Musi Rawas Utara dengan nilai IPM sebesar 61,34 (Tabel 3.3.).

**Tabel 3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005 – 2014**

Kabupaten/Kota	2005 )	2006 )	2007 )	2008 )	2009 )	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(01) Ogan Komering Ulu	69,9	70,9	71,40	71,92	72,36	64,13	64,62	65,09	65,51	66,21
(02) Ogan Komering Ilir	68,8	69,0	69,15	69,64	70,06	61,04	61,68	62,29	63,52	63,87
(03) Muara Enim	68,7	69,1	69,42	69,91	70,38	62,12	62,82	63,34	64,34	65,02
(04) Lahat	67,6	68,4	69,35	69,99	70,53	62,31	62,93	63,66	64,15	64,52
(05) Musi Rawas	65,0	65,6	66,31	66,77	67,33	59,69	60,63	61,37	62,23	63,19
(06) Musi Banyuasin	68,7	69,0	69,64	70,54	71,13	61,79	62,56	63,27	64,18	64,93
(07) Banyuasin	67,2	68,1	68,60	69,08	69,45	60,31	61,04	61,69	62,42	63,21
(08) OKU Selatan	68,8	70,0	70,28	70,66	71,02	58,88	59,74	60,63	61,58	61,94
(09) OKU Timur	65,4	67,5	68,14	68,88	69,39	63,36	64,27	65,18	66,09	66,74
(10) Ogan Ilir	66,0	67,2	68,17	68,67	69,17	61,62	62,47	63,03	63,64	64,49
(11) Empat Lawang		66,59	67,17	67,68	68,15	61,11	61,86	62,30	62,74	63,17
(12) Pali									59,69	59,89
(13) Musi Rawas Utara									60,56	61,34
(71) Palembang	73,6	74,3	74,94	75,49	75,83	73,33	74,08	74,74	75,49	76,02
(72) Prabumulih	71,1	71,7	72,51	73,20	73,69	69,39	70,32	70,95	71,87	72,20
(73) Pagaram	69,9	71,1	71,70	72,16	72,48	61,97	62,71	63,33	64,14	64,75
(74) Lubuklinggau	66,3	68,0	69,24	69,69	70,18	70,72	71,62	72,04	72,55	72,84
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>69,6</b>	<b>71,1</b>	<b>71,40</b>	<b>72,05</b>	<b>72,61</b>	<b>64,13</b>	<b>64,62</b>	<b>65,09</b>	<b>65,51</b>	<b>66,21</b>

Catatan :

\*) Penghitungan IPM tahun 2005-2009 menggunakan penghitungan IPM metode lama dengan tahun dasar tahun 2000

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<http://sumsel.bps.go.id>

## **BAB IV**

### **KEPENDUDUKAN DAN KB**

Kependudukan atau demografi merupakan permasalahan yang sangat penting karena menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan maupun lingkungan. Karena itu kajian kependudukan menjadi fokus utama dalam melihat kesejahteraan masyarakat.

Masalah kependudukan yang menjadi fokus bahasan antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk yang merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan. Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan, tetapi dapat juga menjadi beban dalam proses pembangunan jika mempunyai kualitas yang rendah. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam menangani permasalahan penduduk pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Di samping itu program perencanaan pembangunan sosial di segala bidang harus mendapat prioritas utama yang berguna untuk peningkatan kesejahteraan penduduk.

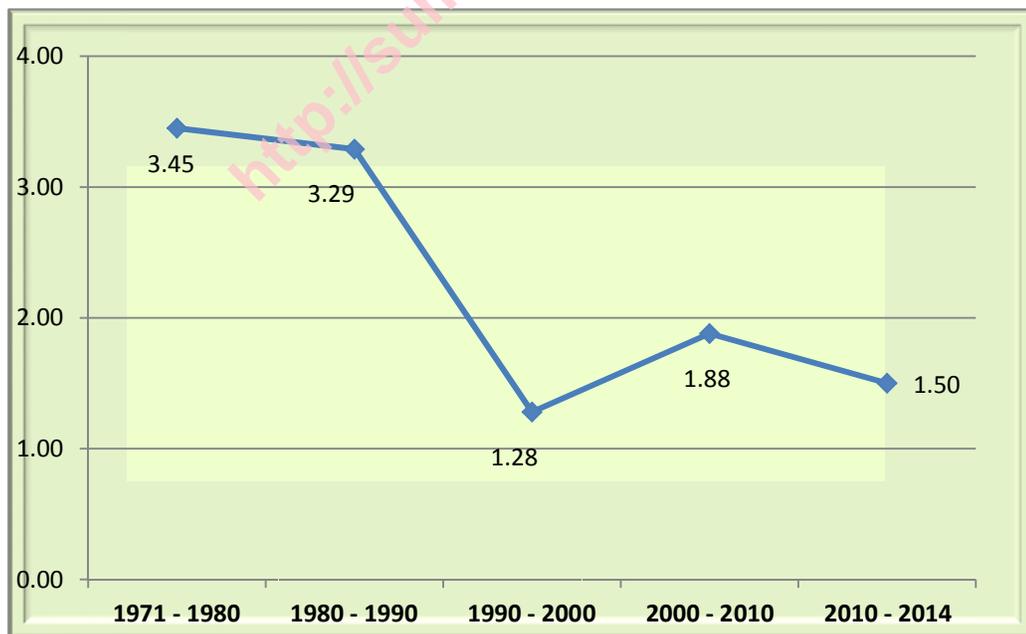
#### **4.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk**

Pada tahun 2014 jumlah penduduk Sumatera Selatan sudah mencapai 7.941.741 ribu jiwa. Secara absolut jumlah penduduk Sumatera Selatan terus bertambah dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 1971 jumlah penduduk Sumatera Selatan sebesar 2,93 juta jiwa, meningkat menjadi 3,98 juta jiwa pada

tahun 1980, 5,49 juta jiwa pada tahun 1990, 6,21 juta jiwa pada tahun 2000 serta 7,48 juta jiwa pada tahun 2010. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Sumatera Selatan hampir mencapai 2 (dua) kali lipat dari kondisi penduduk tahun 1980. Pada tahun 2014, jumlah penduduk Sumatera Selatan mencapai 7,94 juta jiwa.

Dengan jumlah penduduk yang begitu besar maka Sumatera Selatan dihadapkan kepada suatu masalah kependudukan yang sangat serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan upaya peningkatan kesejahteraan penduduk harus merupakan suatu upaya yang tersinergikan dan berkesinambungan dengan program pembangunan yang sedang dan akan terus dilaksanakan.

Gambar 4.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1971 – 2014



Laju pertumbuhan penduduk (LPP) di Sumatera Selatan dari waktu ke waktu disajikan pada Gambar 4.1. Selama periode 1971-1980 laju pertumbuhan penduduk Sumatera Selatan mencapai 3,45 persen per tahun turun menjadi 3,29 per tahun pada periode 1980-1990, pada tahun 1990-2000 pertumbuhan penduduk menjadi 1,24 persen per tahun. Namun demikian, LPP periode 2000-2010 terlihat mengalami kenaikan menjadi 1,88 persen per tahun. Sedangkan berdasarkan Meningkatnya LPP merupakan indikasi kembali meningkatnya angka kelahiran. Sehingga hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah diantaranya dengan kembali menggalakan program KB untuk pengaturan kelahiran.

Tabel 4.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Sumatera Selatan Tahun 1971-2014

Tahun	Jumlah Penduduk	Tingkat Pertumbuhan Per Tahun (%)	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1971(SP 1971)	2.930.830	-	34
1980 (SP 1980)	3.975.904	3,45	46
1990 (SP 1990)	5.492.993	3,29	64
2000 (SP 2000)	6.210.800	1,28	73
2003 (P4B)	6.503.918	1,32	75
2005 (Supas)	6.782.339	1,95	78
2010 (SP2010)	7.481.600	1,88	86
2011 (Proyeksi)	7.598.500	1,56	87
2012 (Proyeksi)	7.714.300	1,52	89
2013 (Proyeksi)	7.828.700	1,48	90
2014 (Proyeksi)	7.941.741	1,44	91

Catatan:

- 1) Tahun 1971, 1980, dan 1990 keadaan akhir Oktober      3) Tahun 2003 keadaan akhir April  
 2) Tahun 2000 keadaan akhir Juni                                      4) Tahun 2010 keadaan akhir Juni

Sumber: BPS Propinsi Sumatera Selatan

Tabel 4.2 menyajikan jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2014, jumlah penduduk terbesar berada di Kota Palembang dengan jumlah penduduk 1,55 juta jiwa. Kabupaten/kota yang lain umumnya jauh lebih kecil berkisar antara 132,5 ribu jiwa yang terkecil di Kota Pagaralam sampai dengan yang terbesar di Kabupaten Banyuasin dengan jumlah 799,3 ribu jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk antara kabupaten/kota dalam setahun tahun 2014 juga cukup bervariasi. Kabupaten Musi Banyuasin, Muara Enim, Kota Prabumulih dan Kota Lubuklinggau mempunyai laju pertumbuhan penduduk yang tertinggi yaitu berturut-turut 1,63, 1,61, 1,56 dan 1,54 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk terkecil terdapat di Kota Pagar Alam, Kabupaten Lahat dan Kabupaten OKU Timur masing-masing sebesar 1,07, 1,15 dan 1,18 persen.

Tabel 4.2. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1980-2014

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk								LPP				
	1980	1990	2000	2010	2011	2012	2013	2014	1980-1990	1990-2000	2000-2010	2010-2014	2013-2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(01) Ogan Komering Ulu	750.799	972.771	240.877	324.900	330.000	335.100	340.000	344.932	2,62	0,94	3,04	1,51	1,45
(02) Ogan Komering Ilir	564.080	771.463	597.353	729.400	741.300	753.300	764.900	776.263	3,18	1,86	2,02	1,57	1,49
(03) Muara Enim	430.834	587.556	588.888	552.800	562.400	572.000	581.600	590.975	3,15	1,98	2,01	1,68	1,61
(04) Lahat	484.893	599.347	327.990	370.800	375.600	380.100	384.600	389.034	2,14	0,77	1,23	1,21	1,15
(05) Musi Rawas	367.037	513.139	437.056	527.000	535.200	543.400	551.500	559.253	3,41	1,59	1,89	1,50	1,41
(06) Musi Banyuasin	591.074	904.438	408.953	563.000	572.900	582.700	592.400	602.027	4,35	1,54	3,25	1,69	1,63
(07) Banyuasin			639.636	752.200	764.400	776.400	788.300	799.998			1,63	1,55	1,48
(08) OKU Selatan			299.416	319.400	324.700	329.700	334.700	339.424			0,65	1,53	1,41
(09) OKU Timur			524.709	611.500	619.400	627.100	634.700	642.206			1,54	1,23	1,18
(10) Ogan Ilir			324.659	382.000	387.500	392.900	398.300	403.828			1,64	1,40	1,39
(11) Empat Lawang			205.680	221.600	225.100	228.400	231.700	234.880			0,75	1,47	1,37
(12) Pali				166.000	168.700	171.500	174.200	176.936			-	1,61	1,57
(71) Palembang	787.187	1.144.279	1.221.443	1.468.000	1.490.600	1.513.400	1.535.900	1.558.494	3,81	0,68	1,86	1,51	1,47
(72) Prabumulih			121.406	163.500	166.300	169.100	171.800	174.477			3,02	1,64	1,56
(73) Pagaram			112.025	126.500	128.000	129.600	131.100	132.498			1,22	1,16	1,07
(74) Lubuklinggau			160.709	203.000	206.400	209.600	213.000	216.270			2,36	1,60	1,54
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>3.975.904</b>	<b>5.492.993</b>	<b>6.210.800</b>	<b>7.481.600</b>	<b>7.598.500</b>	<b>7.714.300</b>	<b>7.828.700</b>	<b>7.941.495</b>	<b>3,29</b>	<b>1,28</b>	<b>1,88</b>	<b>1,50</b>	<b>1,44</b>

Sumber: BPS; SP80, SP90, SP2000, SP2010 dan Proyeksi

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<http://sumsel.bps.go.id>

## 4.2 Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Perubahan tingkat kepadatan penduduk Sumatera Selatan terbilang cukup pesat. Pada tahun 1971 tingkat kepadatan penduduk Provinsi Sumatera Selatan sebesar 34 orang per km<sup>2</sup>, naik menjadi 46 orang per km<sup>2</sup> pada tahun 1980, berubah menjadi 64 orang per km<sup>2</sup> pada tahun 1990 dan pada tahun 2000 kepadatan penduduk menjadi 73 per km<sup>2</sup>. Ini berarti bahwa dalam jangka waktu kurang dari 30 tahun, kepadatan penduduk Sumatera Selatan menjadi lebih dari 2 kali lipat (Tabel 4.1). Namun demikian, pada beberapa tahun terakhir perubahan kepadatan penduduk mulai melambat sejalan dengan menurunnya pertumbuhan penduduk di Sumatera Selatan. Pada tahun 2010 dan 2014 kepadatan penduduk berturut-turut sebesar 86 jiwa/km<sup>2</sup> dan 91 jiwa/km<sup>2</sup>.

Penyebaran penduduk antar kabupaten/kota tampak masih cukup timpang, sehingga kepadatan untuk masing-masing kabupaten/kota belum merata. Kepadatan penduduk biasanya terpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk sehingga mengundang penduduk wilayah pedesaan untuk berusaha pindah ke daerah perkotaan. Masalah yang sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan, dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, dengan memperhatikan pemerataan dan persebaran pembangunan, setidaknya pembangunan yang dilaksanakan harus berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat, sehingga tidak menimbulkan urbanisasi.

Tabel 4.3. Kepadatan Penduduk Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 1980-2014

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk Per Km <sup>2</sup>							
		1980	1990	2000	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(01) Ogan Komering Ulu	2.772,56	66	86	63	117	119	121	123	124
(02) Ogan Komering Ilir	17.058,32	28	38	33	43	43	44	45	46
(03) Muara Enim	8.587,94	48	66	69	64	65	67	68	89
(04) Lahat	4.076,06	67	83	77	91	92	93	94	95
(05) Musi Rawas	12.134,57	29	41	36	43	44	45	45	46
(06) Musi Banyuasin	14.477,00	23	35	28	39	40	40	41	42
(07) Banyuasin	12.142,73			58	62	63	64	65	66
(08) OKU Selatan	5.493,94			73	58	59	60	61	62
(09) OKU Timur	3.410,15			155	179	182	184	186	188
(10) Ogan Ilir	2.513,09			136	152	154	156	158	161
(11) Empat Lawang	2.556,44			86	87	88	89	91	92
(12) Pali	a)								
(13) Musi rawas utara	b)								
(71) Palembang	374,03	2.195	3.191	3.407	3.925	3.985	4.046	4.106	4.167
(72) Prabumulih	421,62			299	388	394	401	407	414
(73) Pagaralam	579,16			190	218	221	224	226	229
(74) Lubuklinggau	419,8			445	484	492	499	507	515
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>87.017,41</b>	<b>46</b>	<b>64</b>	<b>72</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>89</b>	<b>90</b>	<b>91</b>

Catatan:

a) data tergabung dengan Muara Enim

b) data tergabung dengan Musi Rawas

Sumber: BPS; Dihitung dari SP80, SP90, SP2000, SP2010 dan Proyeksi

Tidak meratanya persebaran penduduk Sumatera Selatan menyebabkan kepadatan penduduk menurut kabupaten/kota sangat bervariasi. Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi mempunyai kepadatan penduduk yang paling besar, yaitu 4.167 orang per km<sup>2</sup>, sedangkan kabupaten/kota lainnya di Sumatera Selatan mempunyai kepadatan penduduk yang jauh lebih kecil. Kota Lubuklinggau, misalnya, yang mempunyai kepadatan penduduk paling besar setelah Kota Palembang, tingkat kepadatan penduduknya hanya 515 orang per km<sup>2</sup>, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Rawas dan Musi Banyuasin memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih kecil meskipun mempunyai jumlah penduduk yang besar karena memiliki wilayah yang sangat luas.

### 4.3 Komposisi Penduduk

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun atau lebih) yang berarti semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Selama periode 1980-2014 angka beban tanggungan setiap tahun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 1980 rata-rata dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 88 penduduk tidak produktif. Pada tahun 1990 angka beban tanggungan penduduk Sumatera Selatan turun menjadi 80,07 persen kembali turun menjadi 61,42 persen pada tahun 2000. Pada tahun 2010 dan 2014, angka beban tanggungan penduduk berada pada posisi berturut-turut 51,30 persen dan 50,15 persen.

Menurunnya angka beban ketergantungan diikuti pula dengan menurunnya proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) sebagai dampak dari menurunnya laju pertumbuhan penduduk. Tabel 4.4. menunjukkan bahwa pada tahun 1980 ada sebanyak 44,10 persen penduduk Sumatera Selatan yang berusia muda (0-14 tahun) dan turun menjadi 41,68 persen pada tahun 1990. Pada tahun 2000 proporsi penduduk usia 0-14 tahun adalah sebesar 34,94 persen, sedangkan pada tahun 2010 proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun menjadi 29,89 persen. Saat ini (tahun 2013) proporsi penduduk usia 0-14 tahun sebesar 29,28 persen.

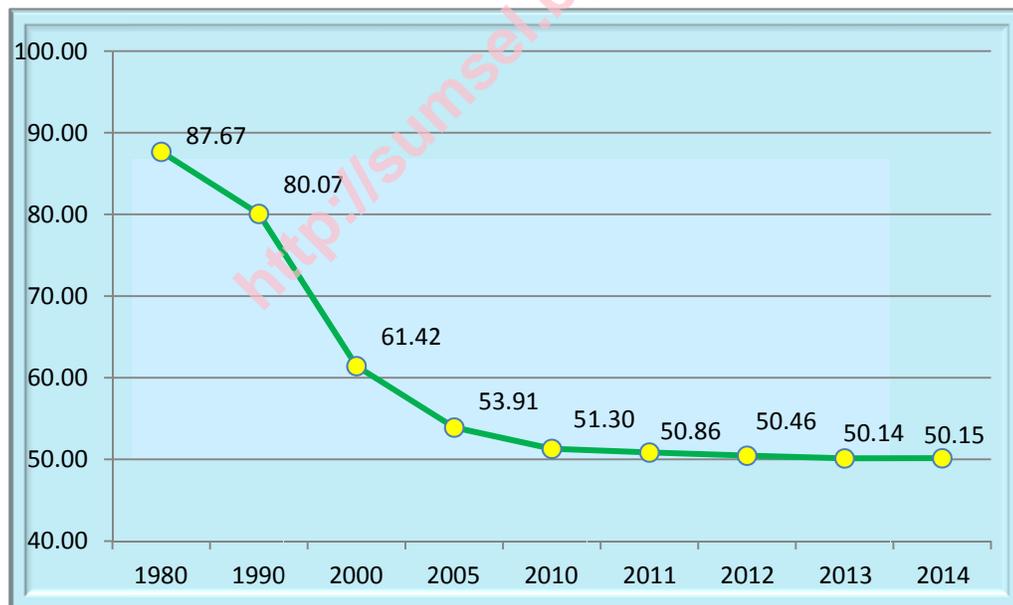
**Tabel 4.4. Persentase Penduduk Sumatera Selatan Menurut Kelompok Umur dan Angka Beban Tanggungan Tahun 1980-2014**

Tahun	Kelompok Umur			Angka Beban Tanggungan
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1980	44,10	53,29	2,61	87,67
1990	41,68	55,53	2,78	80,07
2000	34,94	61,95	3,11	61,42
2005	31,47	64,97	3,55	53,91
2010	29,89	66,10	4,02	51,30
2011	29,67	66,29	4,04	50,86
2012	29,47	66,46	4,07	50,46
2013	29,28	66,60	4,12	50,14
2014	29,28	66,60	4,12	50,15

Sumber: BPS; SP80, SP90, SP2000, Supas 2005, SP2010 dan Proyeksi

Struktur umur penduduk Sumatera Selatan berada pada tahap transisi antara penduduk muda menjadi penduduk tua. Hal ini karena proporsi penduduk mudanya (di bawah 15 tahun ) saat ini sudah lebih rendah dari 40 persen, tetapi proporsi penduduk tuanya (usia 65+) menunjukkan peningkatan namun masih kurang dari 5 persen. Proporsi penduduk usia 65 tahun atau lebih tahun 1980 hanya 2,61 persen dan meningkat menjadi 3,11 persen pada tahun 2000 dan meningkat kembali menjadi 4,02 persen pada tahun 2010. Pada tahun 2013 proporsi penduduk usia tua sedikit meningkat menjadi 4,12 persen.

**Gambar 4.2. Angka Beban Tanggungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 1980 – 2014**



Struktur umur penduduk tahap transisi ini juga ditemui di hampir seluruh kabupaten/kota. Menurut kabupaten/kota sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.5, proporsi penduduk usia muda (0-14 tahun) semuanya kurang dari 40 persen yaitu

bervariasi antara 26,83 persen di Kota Palembang sampai yang tertinggi 30,85 persen di Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan proporsi penduduk lansia umumnya masih di bawah 5 persen di mana yang terendah yaitu Kota Lubuklinggau sebesar 3,45 dan yang tertinggi yaitu Kabupaten OKU Timur.

**Tabel 4.5. Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, Kelompok Umur dan Angka Beban Tanggungan Tahun 2014**

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur			Angka Beban Tanggungan
	0-14	15-64	65+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(01) Ogan Komering Ulu	28,81	67,23	3,96	48,75
(02) Ogan Komering Ilir	29,91	66,08	4,00	51,32
(03) Muara Enim	30,50	65,57	3,93	52,52
(04) Lahat	29,11	65,92	4,98	51,70
(05) Musi Rawas	29,37	66,19	4,45	51,09
(06) Musi Banyuasin	30,85	65,55	3,60	52,56
(07) Banyuasin	30,17	65,89	3,94	51,76
(08) OKU Selatan	29,63	66,86	3,51	49,56
(09) OKU Timur	28,17	66,34	5,49	50,75
(10) Ogan Ilir	29,55	66,00	4,46	51,52
(11) Empat Lawang	30,38	65,01	4,61	53,82
(12) Pali	34,17	62,17	3,66	60,85
(13) Musi rawas utara	32,09	64,38	3,54	55,33
(71) Palembang	26,83	69,28	3,89	44,33
(72) Prabumulih	29,98	66,51	3,51	50,36
(73) Pagaralam	28,03	66,98	5,00	49,31
(74) Lubuklinggau	29,54	67,01	3,45	49,23
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>29,28</b>	<b>66,60</b>	<b>4,12</b>	<b>50,15</b>

Sumber: BPS; Proyeksi

Angka beban tanggungan antar kabupaten/kota bervariasi antara yang terkecil terdapat di Kota Palembang (44,33 persen) sampai dengan yang terbesar di Kabupaten Pali (60,85 persen). Rendahnya angka beban tanggungan di Kota Palembang lebih disebabkan rendahnya proporsi penduduk usia muda sebagai akibat rendahnya fertilitas, sedangkan tingginya angka beban tanggungan di Kabupaten Pali jika diamati pada Tabel 4.5 disebabkan tingginya proporsi penduduk usia muda.

#### 4.4 Fertilitas dan Mortalitas

Hasil Sensus Penduduk, SDKI dan Supas menunjukkan penurunan tingkat fertilitas dari wanita usia subur (TFR) dari waktu ke waktu. Usia 15-49 tahun merupakan usia subur bagi seorang wanita karena pada rentang usia tersebut kemungkinan wanita untuk melahirkan anak cukup besar. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 1980 TFR di Sumatera Selatan diperkirakan sebesar 5,56 per 1000 wanita usia subur. Angka ini terus mengalami penurunan, berturut-turut 4,78 menurut hasil Supas 1985, menjadi 4,22 berdasarkan hasil SP 1990, menurut SDKI 1991 sebesar 3,43, hasil SDKI 1994 sebesar 2,87, hasil SDKI 1997 sebesar 2,64 dan menurut hasil SDKI 2002-2003 turun menjadi 2,3. Berdasarkan data yang dihitung dari Supas 2005, angka TFR di Sumatera Selatan kembali turun menjadi sebesar 2,26 per 1000 wanita usia subur. Sedangkan menurut hasil SDKI 2007, angka TFR di Sumatera Selatan cenderung meningkat yaitu sebesar 2,7 dan kembali meningkat menjadi 2,8 pada tahun 2012.

Program Keluarga Berencana (KB) dan penundaan usia perkawinan pertama pada wanita merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat fertilitas di Sumatera Selatan karena berdampak memperpendek masa reproduksi mereka. Wanita yang kawin pada usia sangat muda mempunyai resiko

cukup besar pada saat mengandung dan melahirkan yang berdampak terhadap keselamatan ibu maupun anak. Dengan memberi kesempatan kepada wanita untuk bersekolah lebih tinggi dapat membantu menunda usia perkawinan bagi seorang wanita, terutama di daerah pedesaan.

Tabel 4.6. Beberapa Indikator Fertilitas Sumatera Selatan

Tahun	TFR	Persentase Wanita Hamil Usia 15-49 Tahun	Rata-rata ALH Wanita Usia 40-49 Tahun	Median Umur Persalinan Pertama Wanita Usia 25-49 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SP 1980	5,56			
Supas 1985	4,78			
SP 1990	4,22			
SDKI 1991	3,43	-	5,26	-
SDKI 1994	2,87	4,12	5,20	20,7
SDKI 1997	2,64	3,70	5,10	21,0
SDKI 2002-2003	2,3	2,5	4,4	20,6
Supas 2005	2,26			
SDKI 2007	2,7	3,1	4,2	20,9
SP2010	2,56			
SDKI 2012	2,8	4,6	3,3	

Sumber: BPS; SDKI, 1991, 1994, 1997, 2002-2003, 2007, 2012; SP80; SP90; SP2010; Supas 1985 dan 2005

Dari Tabel 4.7 terlihat bahwa secara umum dalam jangka panjang ada kecenderungan wanita mulai menunda usia perkawinan pertamanya. Pada tahun

1995 persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya berusia 16 tahun atau kurang masih cukup tinggi yaitu sebanyak 23,86. Lima tahun kemudian terjadi penurunan persentase wanita yang umur perkawinan pertamanya 16 tahun ke bawah yaitu 20,35 persen dan pada tahun 2005 angkanya menjadi dibawah 20 persen yaitu hanya 17,28 persen. Meskipun demikian, pada tahun 2008 terjadi sedikit peningkatan persentase wanita yang menikah umur 16 tahun ke bawah yang kemudian turun kembali menjadi 18,05 persen pada tahun 2012. Akan tetapi pada Tahun 2014 jumlah tersebut mengalami kenaikan menjadi 19,11 persen

Keadaan itu dimungkinkan oleh penurunan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anaknya. Selain hal itu juga disebabkan oleh kecenderungan masyarakat terutama wanita untuk memilih lebih mementingkan untuk menikah yang dimungkinkan adanya alasan ekonomi. Masih didapatkan anggapan bahwa perempuan yang menikah maka beban kebutuhan ekonomi akan beralih pada penduduk laki-laki.

Tabel 4.7. Persentase Wanita Menurut Umur Perkawinan Pertama, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 - 2014

Umur Perkawinan Pertama (Tahun)	Persentase								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
≤ 16	15,05	19,10	21,33	20,23	18,84	18,20	18,05	18,28	19,11
17-18	26,65	27,76	25,39	25,17	24,79	25,17	24,80	24,26	24,01
19-24	47,09	43,03	42,10	43,02	44,37	44,88	44,98	45,85	44,78
25+	11,21	10,12	11,18	11,58	12,00	11,74	12,18	11,61	12,11
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>								

Sumber: Susenas 2006 – 2014

**Tabel 4.8. Persentase Wanita Menurut Kabupaten/Kota dan Umur Perkawinan Pertama 2014**

Kabupaten/Kota	Umur Perkawinan Pertama				Total
	<=16	17-18	19-24	25+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(01) Ogan Komering Ulu	18,90	23,09	46,33	11,67	100,00
(02) Ogan Komering Ilir	23,97	25,75	43,57	6,72	100,00
(03) Muara Enim	20,75	30,67	39,26	9,32	100,00
(04) Lahat	18,97	25,03	45,21	10,80	100,00
(05) Musi Rawas	26,44	29,25	37,40	6,91	100,00
(06) Musi Banyuasin	18,28	23,78	51,95	5,99	100,00
(07) Banyuasin	17,62	25,55	45,94	10,90	100,00
(08) OKU Selatan	24,02	23,83	44,72	7,43	100,00
(09) OKU Timur	24,97	25,67	42,17	7,18	100,00
(10) Ogan Ilir	14,35	22,58	47,00	16,07	100,00
(11) Empat Lawang	21,81	23,80	43,30	11,10	100,00
(71) Palembang	12,16	16,87	47,22	23,75	100,00
(72) Prabumulih	16,17	19,97	47,06	16,79	100,00
(73) Pagaralam	13,76	24,33	49,22	12,69	100,00
(74) Lubuklinggau	14,86	22,62	46,96	15,56	100,00
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>19,11</b>	<b>24,01</b>	<b>44,78</b>	<b>12,11</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS; Susenas 2014

Persentase wanita yang umur perkawinan pertamanya 16 tahun ke bawah sangat bervariasi bila dilihat menurut kabupaten/kota. Pada tahun 2014 yang terendah adalah di Kota Palembang yaitu 12,16 persen. Selain itu ada beberapa kabupaten/kota lainnya yang persentase wanita yang melakukan perkawinan pertamanya 16 tahun ke bawah cukup rendah yaitu Kota Pagaralam (13,76 persen)

dan Lubuk Linggau (14,86 persen). Sementara itu kabupaten yang masih terlihat cukup tinggi persentase wanita yang kawin pertamanya 16 tahun ke bawah yaitu Kabupaten Musi Rawas (26,44 persen), Ogan Komering Ulu Timur (24,97 persen) dan OKU Selatan (24,02 persen).

Meningkatnya persentase wanita yang kawin pada usia muda jelas akan mempengaruhi jumlah anak yang dilahirkan jika program KB tidak berjalan dengan baik. Semakin muda usia perkawinan seorang wanita semakin panjang usia untuk dapat melahirkan anak, sehingga jika pengaturan kelahiran tidak dilakukan, jumlah anak yang dilahirkan menjadi lebih banyak.

**Tabel 4.9. Rata-rata Jumlah Anak Lahir Hidup Per Wanita Menurut Kelompok Umur Wanita, 2007 – 2014**

Kelompok Umur	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15-19	0,060	0,052	0,049	0,058	0,075	0,059	0,064	0,073
20-24	0,545	0,462	0,499	0,567	0,580	0,584	0,553	0,526
25-29	1,346	1,208	1,292	1,343	1,344	1,336	1,348	1,342
30-34	2,210	2,016	2,180	2,115	2,136	2,106	2,065	2,039
35-39	2,949	3,153	2,799	2,735	2,803	2,803	2,813	2,623
40-44	3,615	3,621	3,402	3,245	3,272	3,295	3,381	3,203
45-49	4,329	4,464	4,148	3,984	4,071	3,705	3,908	3,797
<b>Total</b>	<b>1,925</b>	<b>1,780</b>	<b>1,833</b>	<b>1,815</b>	<b>1,843</b>	<b>1,797</b>	<b>1,821</b>	<b>1,799</b>

Sumber: BPS; Susenas, 2007 – 2014

Pada Tabel 4.9. di atas terlihat bahwa rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup (ALH) per wanita sebesar 1,925 pada tahun 2007, turun menjadi 1,780 pada tahun 2008, dan terus menurun menjadi 1,797 pada tahun 2012. Artinya secara umum terjadi tren yang cenderung menurun pada periode 2007-2012. Angka rata-rata ALH pada kelompok umur 45-49 menunjukkan paritas artinya rata-rata jumlah anak yang dilahirkan sepanjang masa reproduksinya. Terlihat bahwa paritas memperlihatkan tren yang menurun pada periode 2007-2010. Pada tahun 2010-2011 sedikit terjadi peningkatan yaitu menjadi 1,843 sedangkan pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 1,797. Namun demikian, perlu diwaspadai meningkatnya angka kelahiran pada wanita usia muda periode 2008-2013, ditunjukkan oleh meningkatnya rata-rata anak ALH pada kelompok umur 15-19 dan 25-29 tahun serta usia tua pada kelompok umur 35-49 tahun pada periode tersebut. Pada tahun 2014 rata-rata jumlah anak lahir hidup per wanita pada semua kelompok umur mengalami penurunan, kecuali kelompok umur 15 -19 tahun sedikit mengalami peningkatan yaitu menjadi 0,073 (Tabel 4.9.).

Tabel 4.10 menyajikan rata-rata ALH per wanita menurut kabupaten/kota di Sumatera Selatan tahun 2014. Dari tabel tersebut diketahui bahwa rata-rata ALH bervariasi antara 1,473 sampai 2,138 per wanita. Angka tertinggi dijumpai di Kabupaten OKU Selatan (2,138 per wanita). Beberapa kabupaten/kota yang mempunyai rata-rata ALH per wanita diatas 2 (dua) yaitu Muara Enim (2,049 per wanita) dan Empat Lawang (2,037 per wanita). Sedangkan rata-rata ALH terendah terdapat di Kota Palembang (1,473 per wanita).

Tabel 4.10. Rata-rata Anak Lahir Hidup Per Wanita Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur							Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(01) Ogan Komering Ulu	0,049	0,498	1,353	1,986	2,598	3,184	4,011	1,770
(02) Ogan Komering Ilir	0,117	0,722	1,501	2,008	2,731	3,429	4,203	1,965
(03) Muara Enim	0,105	0,743	1,437	2,504	3,034	3,357	3,809	2,049
(04) Lahat	0,070	0,667	1,361	1,906	2,616	3,270	3,703	1,872
(05) Musi Rawas	0,075	0,652	1,553	2,020	2,592	3,296	3,726	1,952
(06) Musi Banyuasin	0,095	0,734	1,489	2,327	2,821	3,462	3,793	1,885
(07) Banyuasin	0,037	0,468	1,237	2,236	2,487	3,124	3,253	1,788
(08) OKU Selatan	0,200	0,812	1,406	2,086	2,961	3,695	3,990	2,138
(09) OKU Timur	0,134	0,697	1,334	1,965	2,481	2,712	3,687	1,707
(10) Ogan Ilir	0,022	0,276	1,249	2,087	2,619	3,630	4,296	1,911
(11) Empat Lawang	0,243	0,684	1,653	2,037	2,669	3,531	4,143	2,037
(71) Palembang	0,019	0,234	1,097	1,757	2,299	2,965	3,781	1,473
(72) Prabumulih	0,042	0,626	1,209	1,969	2,738	2,595	3,448	1,682
(73) Pagaralam	0,037	0,482	1,161	1,969	2,631	2,970	3,403	1,753
(74) Lubuklinggau	0,049	0,206	1,287	1,991	2,568	3,127	3,708	1,600
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>0,073</b>	<b>0,526</b>	<b>1,342</b>	<b>2,039</b>	<b>2,623</b>	<b>3,203</b>	<b>3,797</b>	<b>1,799</b>

Sumber: BPS; Susenas 2014

Kematian (mortalitas) merupakan komponen demografi yang juga mempengaruhi dinamika kependudukan disamping fertilitas dan migrasi. Bila fertilitas berhubungan dengan penambahan penduduk, maka mortalitas merupakan pengurangan dari penduduk. Tingkat kematian yang terjadi umumnya berbeda menurut kelompok umur, jenis kelamin maupun kondisi sosial ekonomi penduduk.

Tabel 4.11. Rata-rata Jumlah Anak Masih Hidup Per Wanita Menurut Kelompok Umur Wanita, 2007 – 2014

Kelompok Umur	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15-19	0,056	0,050	0,048	0,058	0,073	0,059	0,062	0,070
20-24	0,517	0,447	0,487	0,556	0,562	0,559	0,530	0,506
25-29	1,287	1,156	1,273	1,298	1,286	1,286	1,300	1,300
30-34	2,107	1,918	2,095	2,014	2,040	2,029	1,988	1,958
35-39	2,749	2,943	2,653	2,568	2,642	2,665	2,644	2,477
40-44	3,302	3,303	3,200	3,030	3,009	3,054	3,148	3,016
45-49	3,882	3,949	3,751	3,575	3,635	3,393	3,561	3,459
<b>Total</b>	<b>1,784</b>	<b>1,647</b>	<b>1,730</b>	<b>1,700</b>	<b>1,718</b>	<b>1,694</b>	<b>1,712</b>	<b>1,697</b>

Sumber: BPS; Susenas, 2007 – 2014

Jika kita lihat keadaan anak masih hidup tahun 2007 – 2013, terlihat adanya peningkatan rata-rata anak masih hidup selama periode tersebut pada beberapa kelompok umur, antara lain pada kelompok umur 15-19 tahun dan 25-29 tahun. Peningkatan tersebut sekaligus menunjukkan adanya penurunan angka kematian anak. Semakin besar rata-rata anak masih hidup, semakin kecil tingkat kematian anak. Dari tahun ke tahun kondisi kesehatan anak-anak semakin baik sehingga kelangsungan hidup mereka lebih terjamin. Untuk tahun 2014 mengalami fenomena sebaliknya di beberapa kelompok umur. Terjadi penurunan rata-rata anak masih hidup pada semua kelompok umur kecuali kelompok umur 15-19 tahun.

Tabel 4.12. Rata-rata Anak Masih Hidup Per Wanita Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Kelompok Umur							Total
	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(01) Ogan Komering Ulu	0,049	0,482	1,306	1,824	2,481	2,996	3,740	1,668
(02) Ogan Komering Ilir	0,117	0,696	1,411	1,911	2,478	3,216	3,790	1,824
(03) Muara Enim	0,081	0,725	1,410	2,318	2,784	3,048	3,375	1,887
(04) Lahat	0,070	0,667	1,276	1,844	2,394	2,961	3,311	1,729
(05) Musi Rawas	0,066	0,652	1,515	1,993	2,424	3,131	3,484	1,869
(06) Musi Banyuasin	0,095	0,719	1,480	2,229	2,712	3,317	3,735	1,830
(07) Banyuasin	0,037	0,444	1,204	2,132	2,391	2,927	3,068	1,703
(08) OKU Selatan	0,186	0,763	1,361	1,972	2,811	3,410	3,570	1,997
(09) OKU Timur	0,134	0,689	1,298	1,895	2,373	2,613	3,391	1,632
(10) Ogan Ilir	0,022	0,257	1,198	1,995	2,485	3,389	3,687	1,762
(11) Empat Lawang	0,243	0,666	1,519	1,936	2,503	3,288	3,503	1,872
(71) Palembang	0,019	0,203	1,078	1,729	2,212	2,851	3,399	1,400
(72) Prabumulih	0,042	0,601	1,176	1,935	2,570	2,407	3,115	1,588
(73) Pagaralam	0,037	0,460	1,113	1,922	2,544	2,866	3,245	1,690
(74) Lubuklinggau	0,049	0,206	1,271	1,947	2,548	3,048	3,531	1,563
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>0,070</b>	<b>0,506</b>	<b>1,300</b>	<b>1,958</b>	<b>2,477</b>	<b>3,016</b>	<b>3,459</b>	<b>1,697</b>

Sumber: BPS; Susenas 2014

#### 4.5 Keluarga Berencana

Meskipun pertumbuhan penduduk Sumatera Selatan saat ini telah jauh menurun dibandingkan dengan periode sebelum tahun 1990, pengendalian jumlah penduduk tetap harus dilakukan. Penambahan jumlah penduduk secara langsung

berdampak pada pembangunan di seluruh sektor seperti penyediaan pangan yang cukup, infrastruktur pendidikan, pembangunan kesehatan serta penyediaan lapangan kerja. Karena itu dalam upaya pengendalian penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang perlu pengendalian kelahiran melalui program Keluarga Berencana (KB).

Pelaksanaan program KB pada periode 1980-an dan 1990-an dinilai telah berhasil dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Di Sumatera Selatan hal ini ditunjukkan dengan menurunnya LPP secara signifikan pada periode tersebut. Namun demikian, pada tahun 2000-an pelaksanaan program KB sedikit melemah sehingga dampaknya dapat dilihat dari cenderungnya meningkatnya kembali LPP di Sumatera Selatan periode 2000-2010.

Tabel 4.13. menyajikan persentase wanita kawin usia 15-49 yang menggunakan alat/cara KB periode 2006 – 2014. Di Provinsi Sumatera Selatan terlihat ada kecenderungan meningkatnya persentase wanita kawin usia 15-49 tahun yang menggunakan KB, meskipun peningkatannya masih relatif kecil. Agar dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang, selain menurunkan usia kawin pertama, persentase wanita pengguna KB harus terus ditingkatkan untuk menurunkan angka kelahiran. Hal ini dapat ditempuh dengan meningkatkan akseptor baru serta mengurangi tingkat *drop-out* (DO) yang selama ini diyakini masih cukup tinggi.

Tabel 4.13. juga memperlihatkan ada kecenderungan rendahnya penggunaan KB di daerah perkotaan seperti di Kota Palembang dan Prabumulih. Daerah-daerah pedesaan cenderung memiliki persentase pengguna KB yang relatif lebih tinggi seperti di Musi Rawas, OKI, Empat Lawang dan OKU Selatan.

Tabel 4.13. Persentase Wanita Kawin Usia 15 – 49 Tahun yang Menggunakan KB Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2006 – 2014

Kabupaten/Kota	Tahun								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(01) Ogan Komering Ulu	63.84	64.74	64.39	64.09	69.67	64,03	66,40	68,70	68,34
(02) Ogan Komering Ilir	65.92	65.93	65.23	72.92	66.87	75,40	73,60	74,16	73,63
(03) Muara Enim	62.55	67.53	63.06	68.21	65.29	70,62	67,93	71,49	68,29
(04) Lahat	74.09	62.96	66.97	66.91	69.62	71,37	70,76	74,00	70,57
(05) Musi Rawas	62.01	64.19	62.84	68.18	68.55	71,69	75,64	74,96	76,27
(06) Musi Banyuasin	59.68	61.22	68.77	62.39	69.38	63,55	68,05	68,57	64,21
(07) Banyuasin	53.30	59.63	71.78	66.12	70.67	70,64	75,45	71,79	65,17
(08) OKU Selatan	66.41	68.94	64.57	70.40	71.88	73,23	73,38	67,99	71,08
(09) OKU Timur	62.94	65.39	64.97	67.83	69.89	69,83	72,81	72,35	68,95
(10) Ogan Ilir	62.23	58.76	58.03	60.29	65.12	62,27	65,17	68,41	69,53
(11) Empat Lawang		60.24	60.11	63.85	70.44	68,73	71,26	72,19	71,68
(71) Palembang	58.93	52.97	52.94	53.36	52.81	54,70	51,76	53,30	50,82
(72) Prabumulih	69.03	59.78	58.80	58.75	65.47	66,13	68,67	72,53	67,63
(73) Pagaralam	73.23	71.83	64.48	80.30	73.80	73,33	75,01	82,41	73,35
(74) Lubuklinggau	66.70	67.05	67.23	64.94	65.79	65,64	68,07	67,27	72,54
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>62.44</b>	<b>61.98</b>	<b>62.78</b>	<b>64.65</b>	<b>65.78</b>	<b>67,03</b>	<b>67,85</b>	<b>68,61</b>	<b>66,47</b>

Sumber: BPS; Susenas 2006 – 2014

Di Sumatera Selatan, alat/cara KB yang paling banyak digunakan adalah Suntikan, bahkan penggunaan Suntikan cenderung terus meningkat pada periode 2006 – 2013 (Tabel 4.14.). Pada tahun 2014, persentase wanita kawin 15 – 49 tahun yang menggunakan KB mencapai 66,47 persen. Dari seluruh wanita kawin 15

– 49 tahun yang menggunakan KB, 71,61 persen menggunakan suntikan. Setelah suntikan, alat/cara KB yang terbanyak pemakainya adalah Pil sebesar 13,32 persen dan Susuk sebesar 8,83 persen. Ada kecenderungan penggunaan KB suntikan meningkat pada periode 2006-2013, sedangkan penggunaan pil menurun. Penggunaan alat KB yang lain relatif kecil.

**Tabel 4.14. Persentase Wanita Kawin Usia 15 – 49 Tahun yang Menggunakan KB Menurut Jenis Alat/Cara KB Tahun 2006 – 2014**

Jenis Alat/Cara KB	Tahun								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
MOW/Tubektomi	1,39	1,47	1,85	1,77	1,23	1,60	1,09	1,45	1,55
MOP/Vasektomi	0,80	1,03	1,07	0,85	0,42	0,39	0,24	0,39	0,24
IUD/Spiral	2,05	2,01	2,11	2,41	1,79	1,69	1,55	1,64	2,14
Suntikan	66,46	68,06	68,73	68,31	69,66	71,36	71,31	72,23	71,61
Susuk	7,61	7,46	7,34	7,14	7,83	7,16	7,99	7,43	8,83
Pil	20,86	18,64	17,52	18,12	18,32	16,15	16,06	15,16	13,32
Kondom	0,47	0,40	0,61	0,62	0,26	0,51	0,66	0,52	0,74
Intravag/Tissue/Kondom Wanita	0,16	0,10	0,11	0,07	0,19	0,11	0,18	0,02	0,05
Tradisional	0,20	0,83	0,66	0,71	0,30	0,01	0,92	1,18	1,52

Sumber: BPS; Susenas 2006 – 2014

Tabel 4.15. Persentase Wanita Kawin Usia 15 – 49 Tahun yang Menggunakan KB Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Alat/Cara KB Tahun 2014

Kabupaten/Kota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(01) Ogan Komering Ulu	0,46	0,00	3,66	67,39	11,78	15,92	0,00	0,00	0,00	0,80
(02) Ogan Komering Ilir	0,42	0,19	0,54	72,64	10,46	14,77	0,37	0,00	0,00	0,61
(03) Muara Enim	0,74	0,00	1,28	72,96	10,09	14,20	0,52	0,00	0,00	0,20
(04) Lahat	1,00	0,61	1,80	68,25	16,26	11,54	0,00	0,00	0,00	0,53
(05) Musi Rawas	0,68	0,68	0,98	79,66	11,09	6,61	0,32	0,00	0,00	0,00
(06) Musi Banyuasin	0,00	0,00	1,00	78,31	7,08	13,38	0,00	0,00	0,00	0,23
(07) Banyuasin	0,79	0,37	2,76	70,78	7,91	16,38	0,42	0,00	0,00	0,59
(08) OKU Selatan	0,26	0,37	2,29	80,59	4,63	11,45	0,00	0,00	0,00	0,40
(09) OKU Timur	0,80	0,18	1,55	65,51	13,53	15,54	1,00	0,00	0,00	1,89
(10) Ogan Ilir	1,82	0,00	1,93	77,03	4,70	12,71	0,00	0,00	0,00	1,81
(11) Empat Lawang	0,00	0,00	0,00	80,65	12,04	6,65	0,66	0,00	0,00	0,00
(71) Palembang	6,90	0,26	5,17	63,15	1,11	13,55	3,08	0,00	0,38	6,39
(72) Prabumulih	3,13	0,62	3,56	64,11	7,38	17,93	0,45	0,00	0,00	2,82
(73) Pagaralam	0,85	0,00	3,15	68,77	10,73	13,50	1,44	0,00	0,33	1,24
(74) Lubuklinggau	2,16	0,24	3,42	67,42	11,23	11,17	0,97	0,00	0,00	3,40
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>1,55</b>	<b>0,24</b>	<b>2,14</b>	<b>71,61</b>	<b>8,83</b>	<b>13,32</b>	<b>0,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>1,52</b>

Sumber: BPS; Susenas 2014

Keterangan:

1. MOW/Tubektomi
2. MOP/Vasektomi
3. IUD/Spiral
4. Suntikan
5. Susuk
6. Pil
7. Kondom
8. Intravag/Tissue
9. Kondom Wanita
10. Tradisional

## 4.6 Permasalahan dan Tantangan

Berdasarkan situasi kependudukan di Sumatera Selatan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan beberapa permasalahan dan tantangan bidang kependudukan yang telah dihadapi saat ini, sebagai berikut:

- a. Laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi.  
Meskipun laju pertumbuhan penduduk dalam jangka panjang terlihat menurun, tetapi saat ini pertumbuhan penduduk Sumatera Selatan masih cukup tinggi diatas angka nasional. Karena itu, upaya meningkatkan kesertaan ber-KB dan akses terhadap pelayanan KB di daerah dengan TFR tinggi serta penyediaan pelayanan KB gratis bagi penduduk miskin dan rentan lainnya merupakan tantangan yang perlu mendapat perhatian.
- b. Penggunaan kontrasepsi yang masih rendah.  
Kondisi yang ada saat ini adalah masih rendahnya angka penggunaan kontrasepsi (CPR), rendahnya pemakaian kontrasepsi jangka panjang serta rendahnya kesertaan pria dalam ber-KB. Tantangan yang dihadapi ke depan adalah upaya meningkatkan kesertaan ber-KB di daerah dengan *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) rendah, meningkatkan pemakaian kontrasepsi jangka panjang, dan meningkatkan kesertaan pria dalam ber-KB. Selain itu, upaya intensifikasi advokasi dan KIE serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB terutama di daerah tertinggal, terpencil, serta perbatasan dan daerah dengan unmet need tinggi

c. Kebijakan pengendalian penduduk belum sinergis

Kebijakan kependudukan yang terkait dengan kuantitas, kualitas, dan mobilitas belum konsisten baik secara vertikal maupun horisontal, serta masih terdapat kebijakan pembangunan lainnya yang kurang mendukung kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. Mengingat penanganan masalah kependudukan melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan, sinergi para pemangku kepentingan tersebut harus ditingkatkan untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Tantangan ke depan adalah menyerasikan kebijakan kependudukan agar konsisten dan berkesinambungan.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

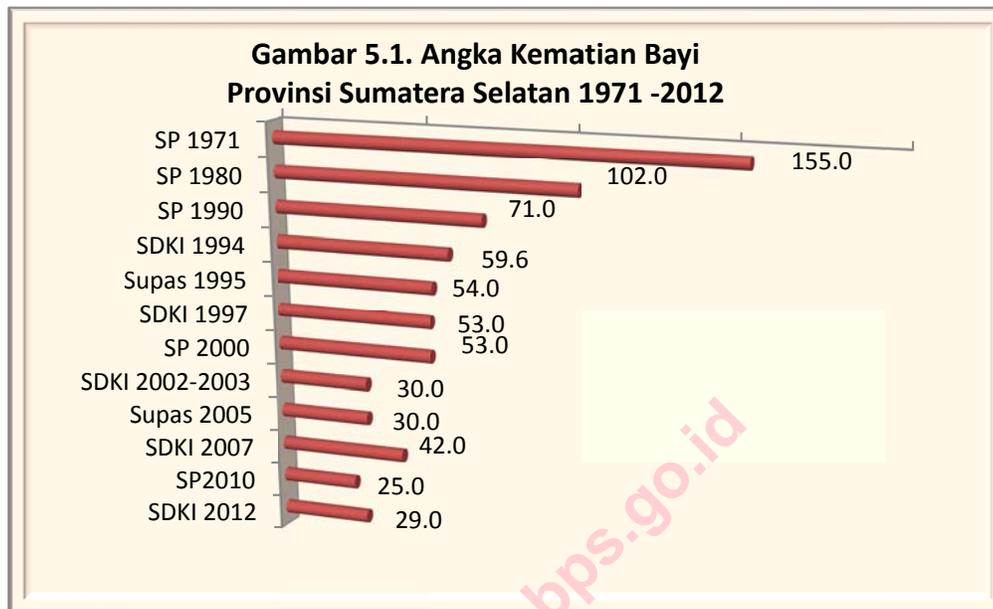
<http://sumsel.bps.go.id>

## **BAB V**

### **KESEHATAN**

Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap manusia agar dapat menjalankan aktivitas hidupnya sehari-hari serta dapat menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya dalam masyarakat. Perwujudan SDM yang berkualitas dan berdaya saing adalah dengan mengarahkan pada peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap individu untuk dapat hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang meningkat. Aspek kesehatan, bersama-sama dengan aspek pendidikan dan aspek ekonomi merupakan pilar utama terciptanya kualitas SDM yang tangguh, produktif dan mempunyai daya saing.

Kesehatan dalam hal ini kualitas fisik maupun psikis penduduk sebagai salah satu aspek terpenting kesejahteraan yang dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Indikator yang digunakan untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah angka kematian bayi dan angka harapan hidup. Selain itu aspek penting lainnya yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur melalui angka kesakitan dan status gizi. Sementara untuk melihat gambaran tentang kemajuan upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat dapat dilihat dari penolong persalinan bayi, ketersediaan sarana kesehatan dan jenis pengobatan yang dilakukan. Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan dan memelihara mutu pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau oleh masyarakat perlu mendapat perhatian utama.



### 5.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Menurunnya angka kematian bayi dan meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan meningkatnya derajat kesehatan penduduk. Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 1990, estimasi angka kematian bayi di Sumatera Selatan diperkirakan 71 per 1000 kelahiran, sedangkan berdasarkan SP 2000, angka kematian bayi di Sumatera Selatan turun drastis menjadi 53 per 1000 kelahiran, atau turun 25 persen selama 10 tahun atau rata-rata turun 2,5 persen per tahun. Angka kematian bayi di Sumatera Selatan terus mengalami penurunan hingga menurut hasil Supas tahun 2005 diperkirakan sebesar 30 per 1000 kelahiran. Namun demikian, berdasarkan angka SDKI tahun 2007, AKB di Sumasel naik kembali menjadi 42 per 1000 kelahiran hidup. Data terakhir perihal Angka Kematian Bayi dihasilkan dari SDKI 2012 di mana AKB untuk Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 29 per 1000 kelahiran.

Tabel 5.1. Angka Kematian Bayi dan Anak serta Angka Harapan Hidup Sumatera Selatan

Tahun	Angka Kematian Bayi	Angka Kematian Anak	Angka Harapan Hidup
(1)	(2)	(3)	(4)
SP 1971	155		44,1
SP 1980	102		53,6
SP 1990	71		59,83
SDKI 1994	59,6	34,5	
Supas 1995	54		63,7
SDKI 1997	53	18,4	
SP 2000	53		64,02
SDKI 2002-2003	30	19,0	
Supas 2005	30		69,5
SDKI 2007	42	11	
SP2010	25		70,9
SDKI 2012	29	9	

Sumber: BPS; SDKI, 1991, 1994, 1997, 2002-2003, 2007, 2012; SP80, SP90, SP2010; Supas 1995 dan 2005.

Sejalan dengan menurunnya estimasi angka kematian bayi, maka estimasi angka harapan hidup mengalami kenaikan. Menurut hasil SP 1990, estimasi angka harapan hidup Sumatera Selatan adalah 59,83 tahun, sepuluh tahun kemudian pada tahun 2010 mengalami menjadi 64,02 tahun menurut SP2000. Sedangkan menurut hasil Supas 2005 besarnya angka harapan hidup penduduk Sumatera Selatan adalah sebesar 69,5 tahun. Angka Harapan Hidup menurut hasil SP2010 untuk Sumatera Selatan adalah sebesar 70,9 tahun.

Status kesehatan penduduk memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan penduduk dan biasanya dapat dilihat melalui indikator persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan. Angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan selama sebulan sebelum pencacahan hingga mengganggu aktifitas sehari-hari.

**Tabel 5.2. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2006– 2014**

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(01) Ogan Komering Ulu	31.68	35.14	35,98	31,12	30,45	33,32	23,25	26,36	28,62
(02) Ogan Komering Ilir	29.85	26.88	24,65	27,42	23,53	24,05	23,05	24,27	25,88
(03) Muara Enim	19.80	25.28	27,57	25,57	26,15	24,67	25,63	21,73	21,30
(04) Lahat	23.13	36.57	40,95	36,56	37,84	37,21	44,15	40,05	44,49
(05) Musi Rawas	32.55	31.75	38,00	30,15	31,71	21,18	17,63	15,12	12,07
(06) Musi Banyuasin	32.62	36.13	27,87	25,34	19,15	16,58	13,78	14,26	17,23
(07) Banyuasin	15.89	24.91	19,67	16,71	20,75	17,14	14,88	16,20	22,07
(08) OKU Selatan	16.12	33.45	32,44	34,07	42,58	27,37	26,10	21,11	25,92
(09) OKU Timur	22.51	33.41	37,47	34,46	35,44	30,95	27,18	22,28	22,02
(10) Ogan Ilir	21.58	43.23	50,02	40,63	33,49	23,83	24,18	24,74	31,54
(11) Empat Lawang		36.77	46,45	38,68	31,12	33,83	33,75	33,39	39,13
(71) Palembang	30.50	32.94	49,44	44,86	34,52	37,81	32,52	32,75	36,25
(72) Prabumulih	16.81	30.84	26,58	28,88	22,55	21,28	13,96	16,49	18,43
(73) Pagaralam	22.39	21.07	31,90	33,74	30,35	22,53	11,30	19,45	26,97
(74) Lubuklinggau	24.84	21.42	36,31	36,28	29,49	20,08	28,15	27,10	27,21
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>25.24</b>	<b>31.33</b>	<b>35,52</b>	<b>32,38</b>	<b>29,68</b>	<b>27,19</b>	<b>24,88</b>	<b>24,16</b>	<b>26,75</b>

Sumber: BPS; Susenas 2006 – 2014

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding keadaan tahun sebelumnya. Terlihat bahwa persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berturut-turut sebesar 35,52 persen pada tahun 2008, 32,38 persen pada tahun 2009, 29,68 persen tahun 2010, 27,19 persen pada tahun 2011 dan 26,75 persen pada tahun 2014.

Tabel 5.3. Angka Kesakitan menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2013– 2014

Kabupaten/Kota	Angka Kesakitan	
	2013	2014
(1)	(2)	(3)
(01) Ogan Komering Ulu	8,31	5,44
(02) Ogan Komering Ilir	9,42	9,07
(03) Muara Enim	6,93	6,40
(04) Lahat	18,92	20,55
(05) Musi Rawas	7,04	3,74
(06) Musi Banyuasin	7,98	10,73
(07) Banyuasin	6,95	8,54
(08) OKU Selatan	9,93	15,21
(09) OKU Timur	12,99	13,39
(10) Ogan Ilir	9,57	9,55
(11) Empat Lawang	15,10	20,70
(71) Palembang	10,78	11,03
(72) Prabumulih	7,56	6,19
(73) Pagaram	10,51	14,78
(74) Lubuklinggau	10,88	14,79
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>9,84</b>	<b>10,47</b>

Sumber: BPS; Susenas 2013 – 2014

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan merasa terganggu aktivitasnya pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding keadaan tahun sebelumnya. Terlihat bahwa angka kesakitan sebesar 9,84 persen pada tahun 2013 meningkat sekitar 0,62 persen menjadi 10,47 persen pada tahun 2014.

Tabel 5.4. Rata-Rata Lama Sakit Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2006– 2014

Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sakit (Hari)								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(01) Ogan Komering Ulu	4.47	5.83	5.11	4.87	5.22	5.21	5.73	4.82	4.99
(02) Ogan Komering Ilir	5.34	6.58	6.88	4.23	4.41	4.56	5.28	5.90	5.38
(03) Muara Enim	4.24	5.05	4.45	4.69	4.38	4.23	4.05	5.09	4.34
(04) Lahat	6.71	6.91	6.06	6.11	5.93	4.96	3.93	4.65	4.22
(05) Musi Rawas	4.59	6.10	5.75	5.60	6.59	5.66	5.11	5.16	5.67
(06) Musi Banyuasin	4.35	5.54	6.48	6.41	3.83	3.75	3.73	4.26	4.99
(07) Banyuasin	4.55	4.70	4.37	4.62	3.99	3.85	3.85	5.66	5.36
(08) OKU Selatan	5.79	6.56	5.74	3.88	5.36	5.33	5.21	5.20	5.23
(09) OKU Timur	5.66	7.12	5.26	5.07	5.20	5.57	4.80	6.10	5.41
(10) Ogan Ilir	6.03	7.39	5.87	5.42	6.03	6.70	5.76	5.82	6.08
(11) Empat Lawang		9.03	5.56	4.79	4.96	4.36	4.55	4.28	3.82
(71) Palembang	5.06	7.98	5.25	5.03	4.69	5.09	4.95	5.80	4.90
(72) Prabumulih	7.04	6.12	5.58	4.72	5.41	5.37	4.41	4.47	4.85
(73) Pagaralam	5.05	5.62	6.12	5.22	4.79	6.08	5.85	5.67	4.54
(74) Lubuklinggau	4.66	6.36	4.94	4.18	5.02	4.09	3.84	4.21	4.69
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>5.14</b>	<b>6.65</b>	<b>5.54</b>	<b>5.01</b>	<b>5.01</b>	<b>4.94</b>	<b>4.66</b>	<b>5.34</b>	<b>4.95</b>

Sumber: BPS; Susenas 2006 – 2014

Di antara mereka yang terganggu kesehatannya, rata-rata lamanya sakit atau lamanya terganggu aktivitas sehari-harinya cenderung menurun, yaitu dari 6,65 hari pada tahun 2007 menjadi 5,54 hari pada tahun 2008, 5,01 hari pada tahun 2009, 2010 dan 4,94 hari pada tahun 2011 serta 4,66 hari pada tahun 2012. Pada tahun 2013 rata-rata lama sakit di Sumatera Selatan mengalami kenaikan yaitu menjadi 5,34 dan turun kembali menjadi 4,95 hari pada tahun 2014.

## 5.2 Pemberian ASI dan Imunisasi

Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan yang paling penting bagi pertumbuhan dan kesehatan bayi karena selain mengandung nilai gizi yang cukup tinggi juga mengandung zat pembentuk kekebalan tubuh terhadap penyakit. Oleh karena itu semakin lama anak disusui akan semakin baik tingkat pertumbuhan dan kesehatannya. Pada tahun 2014 rata-rata lamanya balita usia 1 – 4 tahun disusui 19,14 bulan. Angka ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2013 di mana rata-rata lamanya balita disusui sebesar 19,45 bulan. Secara umum dalam jangka panjang terlihat tidak banyak perubahan pada rata-rata lamanya balita disusui.

Dilihat menurut kabupaten/kota, ada kecenderungan lama pemberian ASI di kota lebih pendek di bandingkan kabupaten. Terlihat pada Tabel 5.4. bahwa rata-rata lama pemberian ASI di 2 kota di Sumatera Selatan pada tahun 2014 (Lubuklinggau dan Palembang) secara umum lebih rendah dibandingkan kabupaten yang lain di Sumatera Selatan. Kecenderungan pola perilaku di daerah perkotaan pada wanita/ibu yang bekerja di sektor formal lebih tinggi sehingga sedikit banyak akan berdampak pada pemberian ASI bagi bayi mereka. Namun demikian, dilihat dari pemberian ASI eksklusif nampak tidak ada perbedaan yang berarti antara daerah perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 5.5 Rata-Rata Lama Balita Usia 1 – 4 Tahun Mendapat ASI Menurut Kabupaten/ Kota, 2006 – 2014

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Mendapat ASI (Bulan)								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(01) Ogan Komering Ulu	17,77	18,88	19,25	18,06	19,16	20,29	20,08	19,12	19,69
(02) Ogan Komering Ilir	19,89	23,31	21,36	19,99	21,30	20,38	21,73	19,76	19,72
(03) Muara Enim	17,19	19,22	20,79	20,40	21,41	21,02	22,45	22,12	20,36
(04) Lahat	17,16	19,43	18,25	17,46	17,65	17,52	18,99	19,09	17,70
(05) Musi Rawas	20,51	18,95	21,99	19,33	19,66	20,16	19,66	19,50	19,52
(06) Musi Banyuasin	18,95	20,68	20,29	19,11	19,43	18,32	18,70	18,96	19,59
(07) Banyuasin	17,87	18,99	19,76	16,89	18,20	19,94	18,65	20,85	20,43
(08) OKU Selatan	16,53	20,48	19,74	19,19	18,49	18,82	20,01	21,52	19,07
(09) OKU Timur	17,26	19,99	20,20	18,94	19,21	18,02	18,69	19,53	19,05
(10) Ogan Ilir	19,13	21,31	23,14	20,85	22,15	19,78	21,52	21,80	21,00
(11) Empat Lawang		19,14	17,55	16,30	17,79	17,06	17,42	17,15	17,49
(71) Palembang	19,19	17,76	18,26	15,58	16,95	17,57	17,26	16,76	17,29
(72) Prabumulih	19,16	19,49	19,41	15,36	19,00	19,39	20,63	19,59	19,33
(73) Pagaralam	17,24	17,91	16,86	16,23	18,92	17,32	19,34	18,21	18,88
(74) Lubuklinggau	15,04	17,78	19,05	16,33	16,49	16,03	15,73	17,23	18,50
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>18,38</b>	<b>19,64</b>	<b>19,93</b>	<b>18,12</b>	<b>19,08</b>	<b>18,96</b>	<b>19,33</b>	<b>19,45</b>	<b>19,14</b>

Sumber: BPS; Susenas 2006 – 2014

Tabel 5.6. Rata-Rata Lama Balita Usia 1 – 4 Tahun Mendapat ASI Eksklusif Menurut Kabupaten/ Kota, 2006 – 2014

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Mendapat ASI Eksklusif(Bulan)								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(01) Ogan Komering Ulu	4,49	4,64	5,21	5,80	4,54	5,61	5,67	5,88	5,56
(02) Ogan Komering Ilir	4,68	4,21	4,14	4,23	4,84	5,75	5,56	5,06	5,05
(03) Muara Enim	4,93	4,97	4,89	5,82	5,70	5,31	7,26	5,67	5,81
(04) Lahat	3,20	3,68	4,86	4,56	4,53	4,92	5,43	5,38	5,33
(05) Musi Rawas	3,32	4,60	4,83	4,43	5,68	5,33	4,86	4,69	4,82
(06) Musi Banyuasin	3,87	5,25	5,30	4,88	5,78	5,49	5,24	5,92	5,84
(07) Banyuasin	5,63	3,84	4,91	4,92	6,59	5,81	5,44	5,21	5,06
(08) OKU Selatan	6,48	4,21	4,74	5,29	6,02	5,51	5,07	5,76	5,33
(09) OKU Timur	4,65	6,07	6,35	5,59	5,73	5,68	4,64	5,18	5,26
(10) Ogan Ilir	4,21	4,79	4,68	4,80	4,83	4,58	5,17	5,21	5,41
(11) Empat Lawang		4,69	5,05	5,89	5,36	5,04	5,32	4,72	5,52
(71) Palembang	5,32	4,67	4,53	3,91	3,92	4,58	4,34	4,21	3,74
(72) Prabumulih	5,69	4,44	4,92	4,70	4,80	5,54	5,05	4,70	4,37
(73) Pagaram	3,77	4,09	5,24	6,36	5,77	5,72	4,89	4,47	5,30
(74) Lubuklinggau	6,92	5,13	5,49	5,68	6,48	4,66	4,84	5,32	5,21
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>4,74</b>	<b>4,63</b>	<b>4,91</b>	<b>4,84</b>	<b>5,22</b>	<b>5,26</b>	<b>5,25</b>	<b>5,11</b>	<b>5,03</b>

Sumber: BPS; Susenas 2006 – 2014

Pemberian ASI eksklusif secara rata-rata masih dibawah standar pemberian ASI eksklusif minimal yaitu 6 bulan. Pada tahun 2014, rata-rata balita usia 1 – 4 tahun diberi ASI eksklusif turun sebesar 5,03 bulan. Rata-rata tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 5,11. Pemberian ASI eksklusif tahun 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 dan 2007, angkanya

terlihat berfluktuasi dari 4,63 bulan pada tahun 2007, naik menjadi 4,91 bulan pada tahun 2008 dan kemudian turun kembali menjadi 4,84 bulan pada tahun 2009 serta terus meningkat menjadi 5,22 bulan pada tahun 2010 dan 5,26 pada tahun 2011, mengalami sedikit penurunan pada 2012 menjadi 5,25 (Tabel 5.5.). Namun demikian dalam jangka panjang secara keseluruhan ada kecenderungan peningkatan rata-rata lama pemberian ASI eksklusif di Sumatera Selatan.

Menurut kabupaten/kota, terlihat bahwa pada tahun 2012 rata-rata lama pemberian ASI eksklusif yang rendah dijumpai di Kota Palembang (3,74) dan Kota Prabumulih (4,37 bulan). Kota Palembang dari tahun ke tahun terlihat menduduki posisi yang terendah (Tabel 5.6.).

**Tabel 5.7. Persentase Balita Usia 1 – 4 Tahun Mendapat ASI Eksklusif Menurut Kabupaten/ Kota, 2007 – 2014**

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(01) Ogan Komering Ulu	35,64	37,46	52,32	33,81	44,41	47,70	67,29	62,03
(02) Ogan Komering Ilir	30,22	25,90	32,79	34,63	47,34	54,25	51,41	46,61
(03) Muara Enim	30,20	38,30	38,12	38,17	41,35	57,19	60,71	64,42
(04) Lahat	20,96	33,45	37,15	37,10	36,58	64,59	58,25	60,61
(05) Musi Rawas	27,42	30,95	25,54	37,61	41,04	48,62	42,42	41,40
(06) Musi Banyuasin	32,39	36,13	32,21	54,56	52,87	44,15	56,14	59,44
(07) Banyuasin	17,90	29,59	39,02	59,11	38,42	48,89	48,62	45,39
(08) OKU Selatan	26,50	27,54	46,25	44,87	57,30	43,36	54,42	49,87
(09) OKU Timur	36,01	41,46	50,52	45,11	52,88	45,31	48,78	49,65
(10) Ogan Ilir	29,33	35,24	31,58	39,63	34,39	43,84	47,08	51,22
(11) Empat Lawang	38,05	42,48	50,01	43,72	30,76	52,44	41,46	55,28
(71) Palembang	27,41	33,81	30,86	27,33	35,87	37,35	37,74	30,52
(72) Prabumulih	36,53	29,03	45,62	42,81	43,45	54,90	44,72	45,78

(73) Pagaram	18,14	44,52	50,76	59,89	58,85	46,86	51,09	58,80
(74) Lubuklinggau	27,24	45,26	53,40	50,04	40,82	47,27	51,63	53,59
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>28,28</b>	<b>34,09</b>	<b>37,45</b>	<b>40,48</b>	<b>42,40</b>	<b>47,75</b>	<b>49,61</b>	<b>48,63</b>

Sumber: BPS; Susenas 2007 – 2014

Tabel 5.7. menyajikan persentase balita usia 1 – 4 tahun yang mendapat ASI eksklusif (minimal 6 bulan) menurut kabupaten/kota tahun 2007 – 2014. Secara keseluruhan ada kecenderungan peningkatan persentase pemberian ASI eksklusif pada balita usia 1 – 4 tahun pada periode 2007 – 2014. Terlihat bahwa pada tahun 2007, persentase balita yang mendapat ASI eksklusif sebesar 28,28 persen, meningkat menjadi 34,09 persen pada tahun 2008 dan 37,45 persen tahun 2009 dan terus meningkat menjadi 40,48 persen pada tahun 2010, 42,40 persen tahun 2011 dan pada tahun 2012, angka pemberian ASI eksklusif pada balita usia 1 – 4 tahun bahkan mencapai 47,75 persen dan 49,61 persen pada tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2014 sedikit mengalami penurunan menjadi 48,63 persen.

Tabel 5.8. Persentase Balita yang Diimunisasi Menurut Jenis Imunisasi, 2006-2014

Jenis Imunisasi	Tahun								
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
BCG	91,48	89,33	90,20	92,87	92,21	92,18	93,36	92,91	93,03
DPT	90,08	85,84	85,78	90,27	88,78	89,99	90,19	90,13	89,77
Polio	93,18	88,90	85,91	89,80	89,17	88,70	88,98	89,85	89,49
Campak/Morbili	83,47	76,52	75,28	77,18	77,72	77,70	80,16	78,81	77,72
Hepatitis B	78,02	79,29	81,17	85,90	84,47	85,16	86,07	86,00	85,94

Sumber: BPS; Susenas 2006 – 2014

Tabel 5.9. Persentase Balita yang Diimunisasi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, 2014

Kabupaten/Kota	BCG	DPT	Polio	Campak/Morbili	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(01) Ogan Komering Ulu	93,51	91,33	90,16	80,94	87,38
(02) Ogan Komering Ilir	95,43	88,96	88,00	76,44	82,93
(03) Muara Enim	94,34	92,47	90,66	77,79	86,11
(04) Lahat	96,84	95,99	96,57	83,73	93,21
(05) Musi Rawas	90,80	88,88	87,83	80,79	86,15
(06) Musi Banyuasin	90,86	88,00	88,34	78,18	83,33
(07) Banyuasin	95,56	94,34	95,45	86,85	92,33
(08) OKU Selatan	92,64	91,12	89,25	81,83	88,15
(09) OKU Timur	93,76	92,14	89,46	76,80	87,87
(10) Ogan Ilir	92,86	87,49	88,45	80,24	79,25
(11) Empat Lawang	74,27	71,39	81,58	64,29	68,98
(71) Palembang	92,78	87,70	87,60	70,83	85,53
(72) Prabumulih	94,09	90,16	87,67	78,52	84,93
(73) Pagaralam	96,31	91,69	90,90	78,84	93,00
(74) Lubuklinggau	92,22	87,83	87,83	78,21	86,24
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>93,03</b>	<b>89,77</b>	<b>89,49</b>	<b>77,72</b>	<b>85,94</b>

Sumber: BPS; Susenas 2014

Selain pemenuhan ASI bagi balita, pemberian imunisasi juga sangat penting untuk memberikan kekebalan bagi balita terhadap berbagai jenis penyakit tertentu yang cukup berbahaya. Jenis imunisasi yang umum diberikan pada balita diantaranya BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis. Data pada Tabel 5.8 menunjukkan angka cakupan imunisasi pada periode 2006-2014. Imunisasi BCG cenderung mengalami kenaikan yang cukup berfluktuasi, tahun 2006 ke 2007 menurun, lalu terus meningkat sampai ke 2009 tetapi sedikit menurun pada tahun

2010. Pada tahun 2012 persentase balita yang diimunisasi BCG mencapai 93,36 persen. Jumlah tersebut mengalami sedikit penurunan pada tahun 2013 yang menjadi 92,91 persen dan naik kembali menjadi 93,03 persen pada tahun 2014. Demikian juga cakupan imunisasi Polio berfluktuasi meskipun cenderung mengalami penurunan di tahun 2014 menjadi 89,47 persen. Untuk cakupan imunisasi DPT dan campak/morbili cenderung sedikit menurun di tahun 2014. Demikian juga imunisasi Hepatitis B cenderung mengalami penurunan pada tahun 2014.

Bila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka cakupan imunisasi balita relatif tidak banyak berbeda antar kabupaten/kota (Tabel 5.9). Artinya imunisasi telah mencakup seluruh wilayah Sumatera Selatan secara menyeluruh. Dari kelima jenis imunisasi tersebut, Kabupaten Empat Lawang terlihat memiliki cakupan imunisasi pada balita yang relatif rendah dibandingkan kabupaten/kota yang lain, sedangkan kabupaten/kota di Sumatera Selatan yang memiliki cakupan imunisasi balita cenderung lebih tinggi dibandingkan kabupate/kotan lainnya yaitu Kabupaten Lahat dan Kabupaten Banyuasin.

Tabel 5.10 Persentase Balita Usia 1 – 4 Tahun Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Kabupaten/ Kota, 2007 – 2014

Kabupaten/Kota	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)
(01) Ogan Komering Ulu	59,80	47,56	41,32	53,94	<b>88,52</b>	<b>87,79</b>	<b>86,92</b>	84,02
(02) Ogan Komering Ilir	29,44	60,84	60,96	47,31	58,70	57,93	56,24	66,37
(03) Muara Enim	40,26	39,13	59,77	64,88	26,82	57,10	79,24	75,63
(04) Lahat	45,63	62,72	62,05	<b>83,40</b>	68,11	<b>82,23</b>	<b>90,31</b>	91,98
(05) Musi Rawas	42,45	48,81	67,23	60,00	65,98	57,62	77,85	87,20
(06) Musi Banyuasin	30,30	36,01	25,86	8,86	36,52	45,11	29,14	41,32
(07) Banyuasin	47,58	48,55	63,74	62,05	61,20	59,21	60,52	65,68
(08) OKU Selatan	39,24	40,78	68,00	71,73	59,40	67,71	77,64	71,74
(09) OKU Timur	55,37	62,24	<b>88,99</b>	53,05	73,32	<b>82,85</b>	<b>85,43</b>	87,46
(10) Ogan Ilir	62,53	49,46	38,12	59,89	49,25	50,42	41,62	53,04
(11) Empat Lawang	36,23	48,13	14,15	59,62	58,82	74,35	55,90	43,01
(71) Palembang	68,36	<b>68,29</b>	78,19	68,95	71,67	64,73	66,42	65,11
(72) Prabumulih	53,79	<b>66,54</b>	46,58	46,93	62,00	57,07	69,43	76,30
(73) Pagaralam	<b>88,59</b>	34,86	56,16	58,62	<b>82,07</b>	80,79	80,10	72,67
(74) Lubuklinggau	<b>68,75</b>	29,18	<b>82,74</b>	<b>71,66</b>	77,90	73,08	69,08	75,35
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>49,75</b>	<b>52,75</b>	<b>62,34</b>	<b>57,75</b>	<b>60,72</b>	<b>63,90</b>	<b>66,84</b>	<b>69,44</b>

Sumber: BPS; Susenas 2007 – 2014

Tabel 5.10. di atas memperlihatkan persentase balita yang mendapat imunisasi lengkap, yaitu BCG sebanyak 1 kali, DPT, Polio dan Hepatitis B sebanyak 3 kali serta Campak sebanyak 1 kali. Persentase balita yang mendapatkan imunisasi lengkap cenderung mengalami kenaikan periode 2007 – 2014, meskipun pada tahun 2010 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Antar kabupaten/kota

terlihat bervariasi dalam hal tren imunisasi lengkap periode 2007 – 2014. Pada tahun 2014, pencapaian imunisasi tertinggi terdapat di Kabupaten Lahat, OKUT dan Musi Rawas, sedangkan yang terendah dapat dijumpai di Kabupaten Musi Banyuasin dan Empat Lawang.

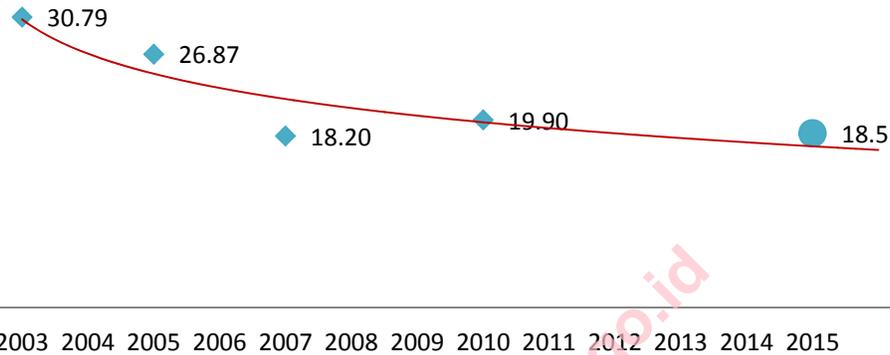
### 5.3 Status Gizi Balita

Terjadinya gizi kurang dan buruk pada balita disebabkan antara lain oleh kurangnya asupan gizi dan serangan penyakit infeksi. Adapun faktor penyebab tidak langsung adalah rendahnya daya beli dan ketidaktersediaan pangan yang bergizi, serta keterbatasan pengetahuan tentang pangan yang bergizi terutama untuk ibu dan anak balita.

Secara umum status gizi penduduk Sumatera Selatan semakin membaik. Ini antara lain terlihat dari indikator persentase penderita gizi kurang dan gizi buruk yang menurun dari 30,79 persen pada tahun 2003 menjadi 26,87 persen pada tahun 2005 dan menjadi 18,2 persen pada tahun 2007 serta meningkat pada tahun 2010 menjadi sebesar 19,90 persen (Gambar 5.2). Penurunan angka kurang gizi ini terlihat cukup cepat sehingga diharapkan pada tahun 2015 target pencapaian MDGs dapat dipenuhi.

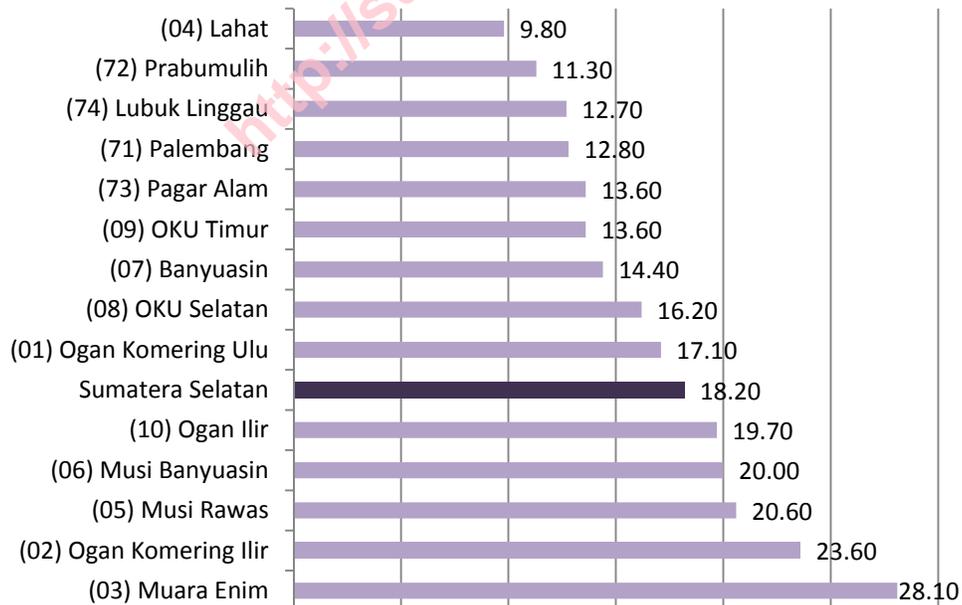
Data gizi buruk dan kurang menurut kabupaten/kota dihasilkan melalui Riskesdas 2007, sedangkan pada Riskesdas 2010 hanya dihasilkan angka provinsi. Angka kurang gizi yang paling rendah ditemui di Lahat, Prabumulih, Lubuklinggau dan Palembang, sedangkan yang tertinggi ditemui di Muara Enim dan OKI (Gambar 5.3.)

**Gambar 5.2. Persentase Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) Sumatera Selatan Tahun 2003 - 2010**



Sumber: Susenas 2003, 2005 dan Riskesdas 2007, 2010

**Gambar 5.3. Persentase Balita Kurang Gizi (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2007**



Sumber: Balitbangkes, Riskesdas 2007

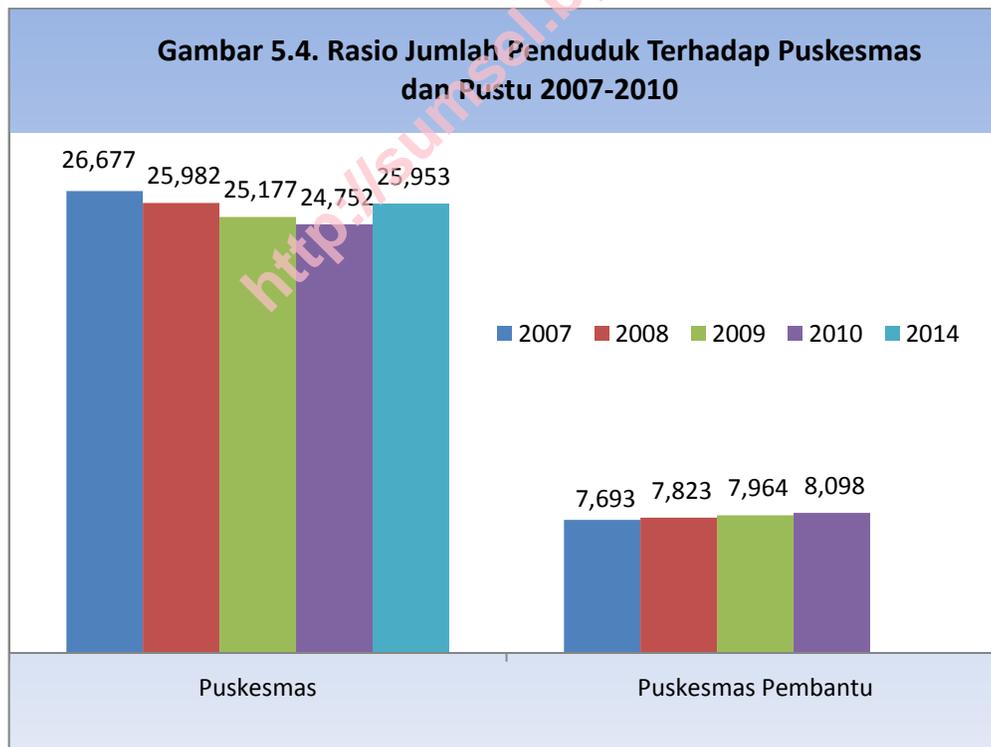
#### 5.4 Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Untuk mewujudkan peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor penentu utama. Puskesmas dan puskesmas pembantu merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan karena dapat menjangkau penduduk sampai di pelosok. Namun ketersediaannya masih dirasakan sangat kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini. Pada Tabel 5.11 jumlah puskesmas yang tersedia selama periode 2006 – 2010 mengalami peningkatan, pada tahun 2006 tersedia 250 puskesmas dan pada tahun 2010 menjadi 301 puskesmas. Sedangkan untuk jumlah puskesmas pembantu mengalami fluktuasi dari 942 pada tahun 2006, turun menjadi 919 pada tahun 2007, serta naik menjadi 920 pada tahun 2008 hingga tahun 2010. Jumlah Rumah Sakit pada tahun 2010 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2006, sebaliknya jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit mengalami kenaikan, yaitu dari 3.863 pada tahun 2006 menjadi 5.635 pada tahun 2010. Pada tahun 2013 seiring peningkatan jumlah RS yang mencapai 319, jumlah tempat tidur di RS juga mengalami kenaikan signifikan yaitu mencapai 6.922 buah. Pada tahun 2014 jumlah rumah sakit menurun menjadi 56 tapi jumlah sarana tempat tidur rumah sakit meningkat menjadi 7.383 buah. Untuk puskesmas mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dari 319 menjadi 306 buah.

Tabel 5.11 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Tahun 2006 – 2014

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Rumah Sakit	45	40	49	47	44	58	56
Puskesmas	250	265	277	291	301	319	306
Puskesmas Pembantu	942	919	920	920	920	920	-
Tempat Tidur Rumah Sakit	3.863	4.081	4.955	5.303	5.635	6.922	7.383
Posyandu	5.786	6.231	6.274	6.186	6.168	6.518	-

Sumber: Sumatera Selatan Dalam Angka, 2014



Dilihat dari rasio jumlah penduduk terhadap sarana kesehatan khususnya puskesmas, ada kecenderungan rasio jumlah penduduk terhadap puskesmas menurun pada periode 2006-2013, sedangkan puskesmas pembantu rasionya cenderung naik (Gambar 5.4.). Ini berarti penambahan jumlah puskesmas belum mampu mengimbangi penambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2014, 1 (satu) puskesmas melayani sekitar 25.953 orang penduduk.

Tabel 5.12. Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan, 2006 – 2014

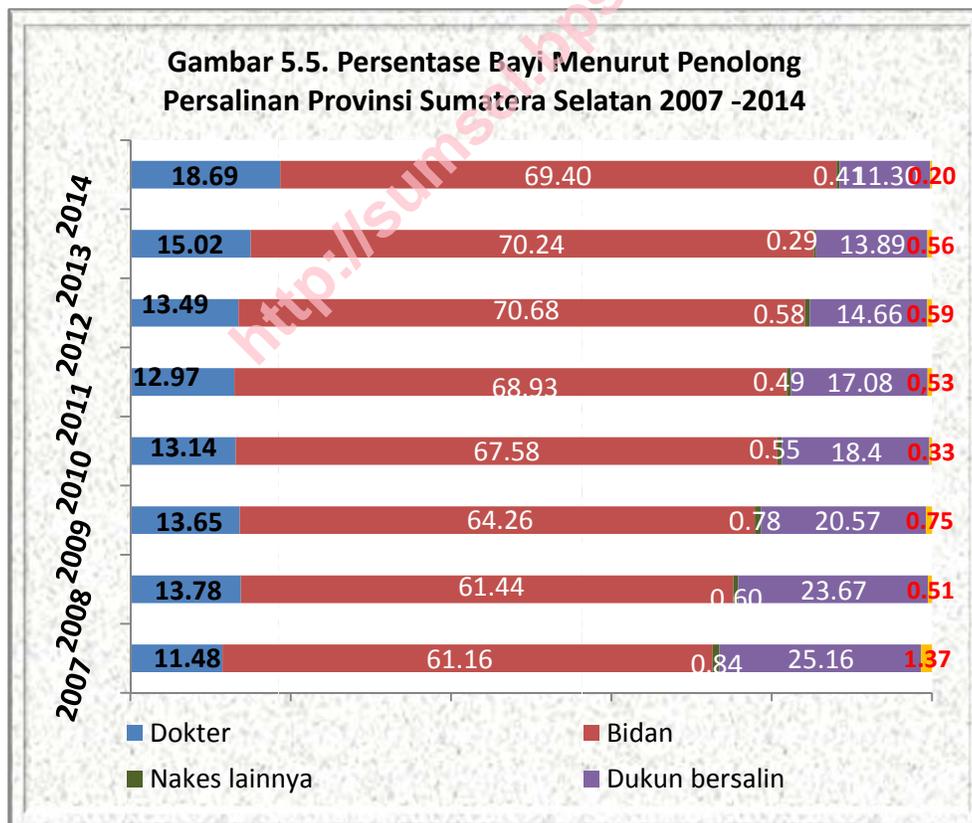
Penolong Persalinan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Dokter	7,82	11,48	13,78	13,65	13,14	12,97	13,49	15,02	18,69
Bidan	67,86	61,16	61,44	64,26	67,58	68,93	70,68	70,24	69,40
Nakes lainnya	0,94	0,84	0,60	0,78	0,55	0,49	0,58	0,29	0,41
Dukun bersalin	21,76	25,16	23,67	20,57	18,40	17,08	14,66	13,89	11,30
Famili/keluarga	1,44	1,11	0,45	0,62	0,29	0,51	0,44	0,56	0,20
Lainnya	0,17	0,26	0,06	0,13	0,04	0,03	0,15	0,00	0,00

Sumber: BPS; Susenas 2006 – 2014

Hal penting lainnya adalah ketersediaan pelayanan kesehatan reproduksi yang diupayakan agar persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan dan tenaga kesehatan lainnya). Pada tahun 2014 terdapat 88,49 persen persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan komposisi 18,69 persen oleh dokter, 69,40 persen oleh bidan dan 0,41 persen oleh tenaga kesehatan lainnya (Tabel 5.12). Dibandingkan tahun 2008-2013, angka ini mengalami peningkatan dari 75,82

persen tahun 2008, 78,69 persen pada tahun 2009, 81,27 persen pada tahun 2010, 82,39 persen pada tahun 2011, 84,75 persen pada tahun 2012 dan 85,55 persen pada tahun 2013 . Pada tahun 2014 juga mengalami kenaikan yaitu menjadi 88,49 persen.

Jika diamati terjadi peningkatan persentase persalinan yang dibantu oleh tenaga kesehatan pada periode 2007 – 2014. Meningkatnya persalinan yang dibantu tenaga kesehatan diikuti oleh menurunnya persalinan yang ditolong dukun. Meskipun demikian, persentase persalinan oleh dukun sebesar 13,89 persen tergolong masih tinggi. Ini berarti bahwa sekitar 1 dari 7 kelahiran di Sumatera Selatan masih ditolong dukun.



Sumber: Susenas 2007 – 2014

Tabel 5.13. Persentase Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Persalinan, Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Penolong Persalinan					Total
	Dokter	Bidan	Nakes Lainnya	Dukun bersalin	Famili /keluarga/ Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(01) Ogan Komering Ulu	20,91	64,17	0,42	14,50	-	100
(02) Ogan Komering Ilir	9,61	75,24	-	15,15	-	100
(03) Muara Enim	11,75	70,89	-	16,79	0,56	100
(04) Lahat	19,95	66,29	-	12,98	0,78	100
(05) Musi Rawas	6,09	83,48	-	10,43	-	100
(06) Musi Banyuasin	11,41	71,11	1,16	15,94	0,39	100
(07) Banyuasin	19,97	68,72	-	11,31	-	100
(08) OKU Selatan	4,69	60,45	-	33,71	1,14	100
(09) OKU Timur	5,97	87,11	-	6,92	-	100
(10) Ogan Ilir	15,67	74,83	-	9,51	-	100
(11) Empat Lawang	9,82	61,88	0,57	27,23	0,50	100
(71) Palembang	44,96	53,95	1,09	-	-	100
(72) Prabumulih	24,67	67,85	-	7,48	-	100
(73) Pagaralam	13,21	78,52	-	7,52	0,75	100
(74) Lubuklinggau	12,91	79,96	2,67	4,45	-	100
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>18,69</b>	<b>69,40</b>	<b>0,41</b>	<b>11,30</b>	<b>0,21</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS; Susenas 2014

Di beberapa kabupaten, angka persalinan oleh dukun sangat besar, seperti yang terjadi di OKU Selatan dan Empat Lawang. Di daerah-daerah ini kelahiran yang ditolong oleh dukun di atas 25 persen (Tabel 5.13), artinya 1 dari 4 kelahiran ditolong oleh tenaga non medis. Tingginya persalinan yang tidak ditolong oleh

tenaga medis tentu saja meningkatkan resiko terjadinya kematian ibu maupun kematian bayi. Patut dicurigai tenaga-tenaga bidan desa yang ada di daerah-daerah tersebut relatif sedikit sehingga masyarakat memiliki akses yang terbatas pada tenaga kesehatan khususnya di daerah perdesaan.

**Tabel 5.14 Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri Menurut Jenis/Cara Pengobatan Yang Digunakan, 2006 – 2014**

Jenis/Cara Pengobatan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Obat/cara modern	41,90	63,75	70,80	65,44	62,10	70,53	68,81	74,23	75,47
Obat/cara tradisonal	10,89	8,28	5,74	7,19	6,49	6,29	7,02	5,65	5,62
Obat/cara lainnya	4,28	1,18	1,52	1,32	1,37	1,49	0,65	1,91	2,35
Obat/cara modern dan tradisional	19,19	17,02	16,37	19,60	23,42	17,42	20,73	12,33	12,09
Obat/cara modern dan lainnya	7,01	1,58	3,25	2,17	2,27	2,42	1,40	0,76	3,41
Obat/cara tradisional dan lainnya	7,23	4,02	0,95	1,16	0,69	0,88	0,46	3,27	0,52
Obat/Cara Modern, Tradional dan Lainnya	9,51	4,17	1,37	3,12	3,67	0,96	0,91	1,85	0,55
<b>Persentase Penduduk yang Berobat Sendiri</b>	<b>70,43</b>	<b>67,54</b>	<b>72,85</b>	<b>76,98</b>	<b>77,45</b>	<b>76,64</b>	<b>72,86</b>	<b>68,70</b>	<b>65,60</b>

Sumber: BPS; Susenas 2006 – 2014

Penduduk yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya melakukan upaya pengobatan, baik dengan berobat sendiri maupun berobat jalan. Selama periode 2006– 2014 nampak bahwa persentase penduduk yang mengobati sendiri (Tabel 5.14) dan penduduk yang berobat jalan (Tabel 5.16) berfluktuasi. Penduduk yang mengobati sendiri sakitnya pada tahun 2007 sebesar 67,54 persen, pada tahun 2008 meningkat menjadi 72,85 persen, pada tahun 2009 menjadi 76,98

persen serta pada tahun 2010 naik kembali menjadi 77,45 persen. Pada tahun 2011-2014 angka berobat sendiri cenderung mengalami penurunan 76,64 persen pada tahun 2011 menjadi 72,86 persen pada 2012 dan turun lagi menjadi 68,70 persen pada 2013. Sejalan dengan hal itu pada tahun 2014 juga menurun menjadi 65,60 persen (Tabel 5.14).

Bagi penduduk yang berobat sendiri pengobatan secara modern menjadi pilihan utama mereka, terbukti sebagian besar penduduk yang sakit menggunakan obat modern baik obat modern sendiri maupun bersama obat tradisional dan lainnya. Pada tahun 2014, penduduk yang memakai obat modern secara total mencapai 91,52 persen (75,47 persen menggunakan obat modern saja dan sisanya 16,05 persen menggunakan gabungan dari tiga jenis pengobatan tersebut), meningkat jika dibandingkan tahun 2013 yang besarnya 89,17 persen. Sementara yang menggunakan pengobatan tradisional saja mengalami penurunan dari 7,02 persen pada tahun 2012 menjadi 5,65 dan 5,62 persen pada tahun 2013 dan 2014.

Dilihat dari variasi antar kabupaten/kota, penggunaan obat modern baik obat modern saja maupun bersama dengan cara tradisional atau lainnya relatif merata antar kabupaten, meskipun di beberapa kabupaten/kota penggunaan obat tradisional saja masih tinggi seperti dijumpai di Kabupaten Musi Banyasin, OKU Selatan dan OKI (Tabel 5.15).

Tabel 5.15. Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis/Cara Pengobatan Yang Digunakan, 2014

Kabupaten/Kota	Jenis/Cara Pengobatan Yang Digunakan							Total
	Modern	Tradisional	Lainnya	Modern dan Tradisional	Modern dan Lainnya	Tradisional dan Lainnya	Modern, Tradisional dan Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(01) Ogan Komering Ulu	91,63	3,89	0,96	1,28	2,02	0,23	-	100,00
(02) Ogan Komering Ilir	63,32	9,30	1,26	22,65	0,94	0,98	1,55	100,00
(03) Muara Enim	83,32	5,18	1,04	5,18	4,66	0,62	-	100,00
(04) Lahat	61,20	5,96	8,50	6,98	16,06	0,88	0,43	100,00
(05) Musi Rawas	88,01	4,44	0,76	6,27	0,52	-	-	100,00
(06) Musi Banyuasin	52,75	12,50	-	31,04	0,53	1,64	1,53	100,00
(07) Banyuasin	62,51	2,91	0,45	27,50	4,14	0,17	2,33	100,00
(08) OKU Selatan	77,21	10,44	1,61	9,08	0,78	0,69	0,20	100,00
(09) OKU Timur	75,30	7,55	3,26	10,93	1,53	1,09	0,34	100,00
(10) Ogan Ilir	79,86	5,01	2,38	10,63	2,12	-	-	100,00
(11) Empat Lawang	73,14	4,40	1,26	20,05	0,44	0,43	0,28	100,00
(71) Palembang	85,15	3,46	2,63	6,12	2,24	0,26	0,15	100,00
(72) Prabumulih	91,97	1,90	0,34	4,75	1,05	-	-	100,00
(73) Pagaralam	61,41	6,68	9,84	9,93	11,59	-	0,55	100,00
(74) Lubuklinggau	79,91	7,92	-	10,80	0,87	0,50	-	100,00
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>75,47</b>	<b>5,62</b>	<b>2,35</b>	<b>12,09</b>	<b>3,41</b>	<b>0,52</b>	<b>0,55</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS; Susenas 2014

Tabel 5.16 Persentase Kunjungan Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat, 2006 – 2014

Tempat Berobat	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
RS Pemerintah	7,36	6,11	4,67	8,37	8,55	5,65	6,88	7,71	6,11
RS Swasta	4,25	4,83	3,51	4,33	3,32	3,59	4,86	5,67	5,21
Praktek Dokter/Poliklinik	21,73	26,22	24,36	24,15	23,32	23,78	22,52	21,39	22,89
Puskesmas/Pustu	<b>58,34</b>	32,26	35,83	33,76	32,37	30,75	26,51	23,69	21,05
Praktek Nakes	13,69	31,97	32,35	24,05	27,02	29,35	33,26	33,79	38,29
Praktek Batra	<b>0,96</b>	1,61	1,47	1,47	2,66	1,46	2,03	2,41	3,15
Dukun Bersalin	2,08	0,75	0,34	0,76	0,37	0,83	0,53	1,21	0,88
Lainnya	3,13	3,36	3,67	3,11	2,38	4,60	3,42	4,13	2,41
<b>Persentase Penduduk yang Berobat Jalan</b>	<b>27,84</b>	<b>33,04</b>	<b>37,50</b>	<b>33,25</b>	<b>33,79</b>	<b>38,96</b>	<b>40,77</b>	<b>40,98</b>	<b>43,82</b>

Sumber: BPS; Susenas, 2006 – 2014

Sedangkan bagi penduduk yang berobat jalan, jenis fasilitas kesehatan yang sering digunakan oleh penduduk pada tahun 2014 adalah praktek petugas kesehatan lainnya (38,29 persen), praktek dokter/poliklinik (22,89 persen), kemudian puskesmas/pustu (21,05 persen). Dari tahun 2006, terjadi penurunan penggunaan fasilitas puskesmas/pustu dan peningkatan kunjungan pada praktek dokter serta praktek tenaga kesehatan lainnya yang berfluktuasi.

Tabel 5.17. Persentase Kunjungan Berobat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Berobat, 2014

Kabupaten/Kota	Tempat Berobat							
	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktek Dokter/ Poliklinik	Puskesmas/ Pustu	Praktek Nakes	Praktek Batra	Dukun Bersalin	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(01) Ogan Komering Ulu	3,40	2,35	15,07	29,18	44,00	4,71	0,50	0,80
(02) Ogan Komering Ilir	2,16	0,81	19,27	17,05	53,36	5,90	0,00	1,44
(03) Muara Enim	7,64	4,22	17,72	18,77	42,47	4,73	2,07	2,38
(04) Lahat	6,86	1,60	19,12	22,08	46,37	1,16	0,89	1,93
(05) Musi Rawas	7,37	3,43	19,74	27,88	35,95	1,66	1,66	2,29
(06) Musi Banyuasin	11,67	4,81	15,97	32,97	18,49	4,34	4,34	7,40
(07) Banyuasin	7,74	3,91	16,84	17,19	47,31	2,44	2,26	2,31
(08) OKU Selatan	3,63	0,49	21,03	7,80	64,03	2,38	0,00	0,63
(09) OKU Timur	2,53	2,99	11,04	4,64	72,79	2,01	0,00	4,00
(10) Ogan Ilir	1,71	1,03	8,12	19,43	58,62	8,96	0,02	2,11
(11) Empat Lawang	5,49	2,91	17,43	22,12	44,55	3,01	1,71	2,79
(71) Palembang	8,11	12,42	39,21	25,79	10,76	1,01	0,40	2,29
(72) Prabumulih	6,85	9,22	29,89	27,80	20,07	3,55	0,98	1,64
(73) Pagaralam	10,97	5,35	23,82	21,57	27,29	3,76	3,34	3,91
(74) Lubuklinggau	11,78	3,03	33,97	37,99	10,26	0,40	0,40	2,19
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>6,11</b>	<b>5,21</b>	<b>22,89</b>	<b>21,05</b>	<b>38,29</b>	<b>3,15</b>	<b>0,88</b>	<b>2,41</b>

Sumber: BPS; Susenas 2014

Menurut kabupaten/kota, jenis fasilitas berobat jalan yang paling sering dikunjungi bervariasi antar kabupaten/kota yaitu puskesmas/pustu, praktek dokter/poliklinik dan praktek nakes. Sebagian besar kabupaten memiliki fasilitas

berobat jalan yang paling sering dikunjungi penduduk berupa praktek tenaga kesehatan (nakes). Fakta yang sedikit berbeda dijumpai di dua kota yang ada di Sumatera Selatan (Palembang dan Prabumulih) di mana fasilitas yang paling sering dipilih umumnya adalah praktek dokter. Sedangkan di Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Musi Banyuasin, penduduk lebih sering mengunjungi puskesmas/pustu. Data pada Tabel 5.16 juga memperlihatkan bahwa di semua kabupaten/kota terlihat kunjungan fasilitas pengobatan tradisional seperti praktek pengobatan tradisional (batra) dan dukun bersalin relatif kecil.

<http://sumsel.bps.go.id>

## 5.5 Permasalahan dan Tantangan

Berdasarkan uraian di atas, secara umum kondisi kesehatan yang ada di Sumatera Selatan digambarkan sebagai berikut:

a. Status kesehatan ibu dan anak masih rendah

Kesehatan ibu dan anak merupakan indikator penting dalam pembangunan kesehatan, selain menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan nasional juga menjadi komitmen internasional dalam pencapaian target MDGs. Kondisi saat ini adalah masih tingginya persalinan yang ditolong oleh dukun bersalin, masih tingginya angka kematian bayi, serta masih rendahnya balita yang mendapat imunisasi lengkap. Tantangan ke depan adalah memperkecil persalinan oleh dukun bersalin dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak melalui perbaikan gizi, peningkatan pengetahuan ibu, pemenuhan ketersediaan tenaga kesehatan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan cakupan dan kualitas imunisasi, serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

b. Status gizi masyarakat masih rendah

Kekurangan gizi pada anak balita telah menurun, namun masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup penting. Tantangan ke depan adalah meningkatkan status gizi masyarakat dengan fokus pada ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun, meningkatkan pola hidup sehat, menjamin kecukupan zat gizi dengan memperkuat kerjasama lintas sektor, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.

c. Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih tinggi

Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular disebabkan oleh masih buruknya kondisi kesehatan lingkungan, perilaku masyarakat yang belum mengikuti pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan belum optimalnya upaya-upaya penanggulangan penyakit. Tantangan ke depan adalah meningkatkan cakupan dan kualitas pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko, peningkatan surveilans epidemiologi, peningkatan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), peningkatan tatalaksana kasus, peningkatan kesehatan lingkungan, penguatan kerjasama lintas sektor, serta kesiapsiagaan menghadapi pandemi penyakit zoonotik.

d. Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas

Tantangan ke depan adalah memperbaiki kualitas perencanaan, produksi dan pendayagunaan yang menjamin terpenuhinya jumlah, mutu, dan persebaran SDM kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan daerah kepulauan yang didukung dengan penguatan regulasi termasuk akreditasi dan sertifikasi.

e. Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah

Jumlah fasilitas kesehatan terus meningkat tetapi akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan masih rendah khususnya di daerah pedesaan. Tantangan ke depan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai untuk merespons dinamika karakteristik penduduk dan kondisi geografis.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<http://sumsel.bps.go.id>

## **BAB VI**

### **PENDIDIKAN**

Pendidikan merupakan proses peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang memiliki peranan dominan dalam kehidupan manusia. Hasil yang ingin dicapai dalam proses pendidikan adalah terbinanya SDM sesuai dengan kebutuhan pembangunan yaitu sosok manusia Indonesia seutuhnya yang bisa memecahkan persoalan bangsa masa kini dan masa depan. Dapat dikatakan pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sebagai subjek sekaligus objek dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Mengingat pendidikan sangat berperan sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka pembangunan di bidang pendidikan meliputi pembangunan pendidikan secara formal maupun non formal. Pembangunan di bidang pendidikan memerlukan peran serta yang aktif tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat. Karena belum semua anak Indonesia dapat menikmati kesempatan pendidikan dasar, antara lain dikarenakan faktor kemiskinan keluarga.

Dalam bidang pendidikan, sasaran pembangunan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan. Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan antara lain ditandai oleh menurunnya jumlah penduduk buta huruf; meningkatnya secara nyata persentase penduduk yang dapat menyelesaikan program wajib belajar 9 tahun dan pendidikan lanjutan dan berkembangnya pendidikan kejuruan yang ditandai oleh meningkatnya jumlah tenaga terampil.

Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien, diharapkan akan terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian,

keluhuran budi pekerti, dan terbentuknya karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. Oleh karena itu, substansi inti program aksi bidang pendidikan diantaranya adalah peningkatan akses pendidikan dasar-menengah dan akses pendidikan tinggi serta peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah.

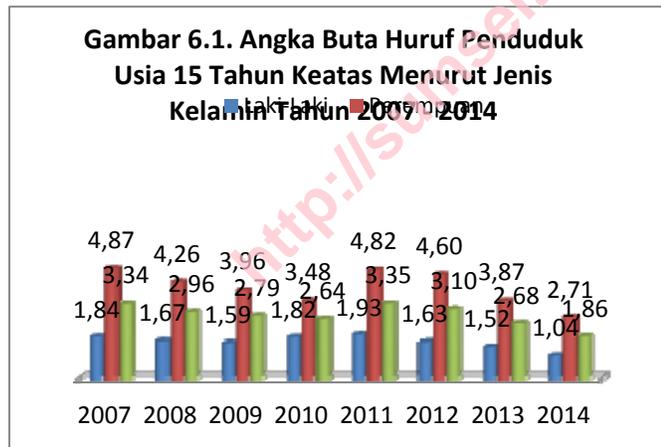
### 6.1. Angka Melek Huruf

Kemampuan baca tulis penduduk dewasa merupakan ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan, yang tercermin dari data angka melek huruf, yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca huruf latin dan huruf lainnya. Persentase penduduk yang melek huruf pada tahun 2014 mencapai 98,14 persen, sisanya penduduk yang buta huruf sebesar 1,86 persen. Secara umum program pendidikan merupakan salah satu program unggulan dalam pembangunan daerah. Salah satu sasaran program pendidikan tersebut adalah memberantas buta huruf. Program-program pendidikan mulai dipercepat pada awal tahun 2000an, yaitu hingga penerapan target anggaran pendidikan hingga 20 persen. Oleh karena itu fenomena penduduk yang masih buta huruf sebagian besar terdapat pada penduduk yang berusia tua. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka melek huruf cenderung mengalami peningkatan.

Tabel 6.1 Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kelompok Umur, 2006 – 2014

Kelompok Umur	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15 – 24	99,24	99,61	99,66	99,92	99,94	99,12	99,50	99,82	99,93
15 – 44	98,89	99,13	99,14	99,49	99,63	98,84	99,11	99,30	99,48
45+	90,71	92,32	91,97	91,73	91,90	90,98	91,22	92,16	94,94
15+	96,59	96,66	97,04	97,21	97,36	96,65	96,90	97,32	98,14

Sumber: BPS; Susenas, 2006 – 2014



Sumber: BPS, Susenas 2007 - 2014

Menurut jenis kelamin, angka buta huruf penduduk laki-laki pada tahun 2014 sebesar 1,04 persen lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan yang

besaranya 2,71 persen (Gambar 6.1.). Hal ini menunjukkan bahwa kaum wanita masih sedikit tertinggal dibandingkan laki-laki dalam hal kemampuan membaca dan menulis. Kondisi ini juga terjadi di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan (Tabel 6.2). Kesenjangan gender yang terbesar terjadi di Kabupaten Musi Rawas, Ogan Ilir dan OKI, sedangkan kesenjangan gender yang paling kecil dapat dijumpai di Kabupaten Musi Banyuasin dan Empat Lawang.

**Tabel 6.2. Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014**

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	99,43	98,12	98,79
(02) Ogan Komering Ilir	98,82	95,51	97,21
(03) Muara Enim	99,27	97,91	98,59
(04) Lahat	99,28	98,08	98,70
(05) Musi Rawas	99,77	96,10	98,00
(06) Musi Banyuasin	99,29	99,41	99,35
(07) Banyuasin	97,50	95,44	96,50
(08) OKU Selatan	99,50	97,05	98,37
(09) OKU Timur	96,66	95,95	96,31
(10) Ogan Ilir	99,63	96,28	97,95
(11) Empat Lawang	100,00	99,81	99,91
(71) Palembang	99,25	97,99	98,62
(72) Prabumulih	99,78	99,27	99,52
(73) Pagaralam	99,93	97,52	98,76
(74) Lubuklinggau	100,00	99,20	99,60
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>98,96</b>	<b>97,29</b>	<b>98,14</b>

Sumber: BPS; Susenas 2014

## 6.2. Rata-Rata Lama Sekolah

Indikator lainnya untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah yang secara umum menunjukkan jenjang pendidikan yang telah dicapai oleh penduduk usia 15 tahun keatas. Di provinsi Sumatera Selatan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas pada tahun 2014 baru mencapai 8,41 tahun, berarti rata-rata baru sampai taraf pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada kelas dua. Dari sisi perbedaan jenis kelamin juga masih ditemui adanya kesenjangan gender dimana rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki 8,59 tahun dan perempuan 8,22 tahun (Tabel 6.3). Meskipun demikian, hal yang perlu dicatat adalah bahwa jika diamati kesenjangan gender tersebut cenderung menurun periode 2009 – 2011 dan cenderung meningkat pada periode 2012-2014.

Tabel 6.3 Rata-rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin dan Daerah, 2007 – 2014

Jenis Kelamin	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Laki-laki	7,83	7,83	7,92	8,04	8,24	8,37	8,44	8,59
Perempuan	7,36	7,36	7,39	7,60	7,87	8,04	8,08	8,22
<b>Total</b>	<b>7,60</b>	<b>7,60</b>	<b>7,66</b>	<b>7,82</b>	<b>8,06</b>	<b>8,21</b>	<b>8,27</b>	<b>8,41</b>

Sumber: BPS; Susenas, 2007 – 2014

Untuk tingkat kabupaten/kota rata-rata lama sekolah tertinggi tercatat di Kota Palembang yang mencapai 10,46 tahun, di mana penduduk laki-laki rata-rata 10,65 tahun dan perempuan rata-rata 10,26 tahun (Tabel 6.4). Ini berarti penduduk

laki-laki dan perempuan rata-rata sudah mengenyam pendidikan sampai SLTA kelas dua. Rata-rata lama sekolah terpendek terdapat di Kabupaten OKI yaitu baru 7,01 tahun atau setara kelas satu SLTP, dimana rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki 7,14 tahun dan perempuan 6,87 tahun. Demikian juga di Kabupaten Musi Rawas (7,22), di mana rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki sebesar 7,51 tahun setara kelas 1 SLTP dan perempuan 6,90 atau setara kelas 6 SD.

**Tabel 6.4. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014**

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	8,74	8,56	8,65
(02) Ogan Komering Ilir	7,14	6,87	7,01
(03) Muara Enim	7,80	7,43	7,62
(04) Lahat	8,59	8,44	8,52
(05) Musi Rawas	7,51	6,90	7,22
(06) Musi Banyuasin	8,05	7,50	7,78
(07) Banyuasin	7,87	7,39	7,64
(08) OKU Selatan	7,84	7,48	7,68
(09) OKU Timur	8,18	7,66	7,93
(10) Ogan Ilir	8,34	7,79	8,07
(11) Empat Lawang	8,00	7,67	7,84
(71) Palembang	10,65	10,26	10,46
(72) Prabumulih	9,66	9,18	9,42
(73) Pagaram	9,45	8,93	9,20
(74) Lubuklinggau	10,01	9,65	9,83
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>8,59</b>	<b>8,22</b>	<b>8,41</b>

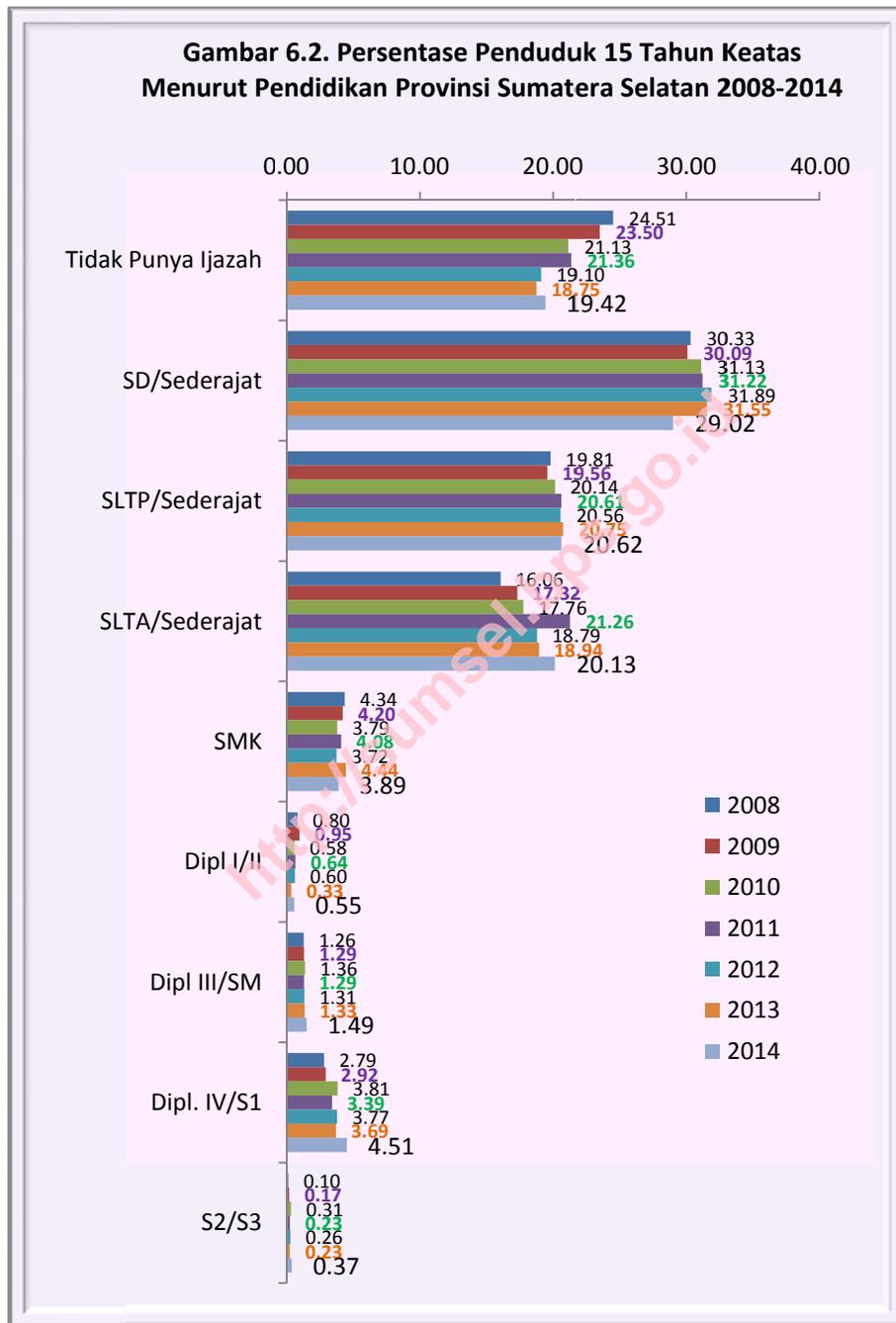
Sumber: BPS; Susenas 2014

### 6.3. Tingkat Pendidikan

Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas. Rendahnya pendidikan di Indonesia membuat Indonesia memiliki krisis SDM yang potensial. Salah satu penyebabnya adalah masih belum meratanya pendidikan di negara kita di mana masih belum menyentuh masyarakat kalangan bawah dan wilayah yang terpencil. Beberapa penyebab diantaranya belum meratanya penyebaran sarana dan prasarana pendidikan serta masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk membayar biaya pendidikan.

Selama periode 2008-2014 penduduk usia 15 tahun ke atas yang sudah menamatkan sekolah pada jenjang Diploma III/SM sampai tingkat S2/S3 cenderung mengalami peningkatan. Sebaliknya jenjang pendidikan SD ke bawah cenderung mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat pendidikan penduduk Sumatera Selatan pada periode 2008 – 2014 meskipun cukup kecil. Pada tahun 2014 penduduk 15 tahun ke atas yang berpendidikan Perguruan Tinggi sudah mencapai 6,92 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2008 yang hanya mencapai 4,95 persen. Sebaliknya pada jenjang pendidikan SD ke bawah terjadi penurunan dibandingkan tahun 2008.

**Gambar 6.2. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan 2008-2014**



Sumber: BPS, Susenas 2008 – 2014

Tabel 6.5. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota dan Tingkat Pendidikan, 2014

Kabupaten/Kota	Tingkat Pendidikan					Total
	Tidak Punya Ijazah	SD/Sederajat	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(01) Ogan Komering Ulu	17,86	26,58	20,30	28,07	7,19	100
(02) Ogan Komering Ilir	32,23	31,41	17,55	16,01	2,80	100
(03) Muara Enim	22,91	34,77	18,85	19,68	3,80	100
(04) Lahat	18,28	27,44	22,86	26,62	4,80	100
(05) Musi Rawas	23,07	37,80	20,76	15,88	2,50	100
(06) Musi Banyuasin	18,87	36,74	22,75	17,13	4,50	100
(07) Banyuasin	23,18	34,75	18,93	18,95	4,18	100
(08) OKU Selatan	15,44	41,38	23,65	16,98	2,53	100
(09) OKU Timur	20,69	30,42	26,49	18,22	4,18	100
(10) Ogan Ilir	18,28	34,73	20,80	20,90	5,29	100
(11) Empat Lawang	21,53	30,10	25,51	19,20	3,66	100
(71) Palembang	11,98	15,24	18,39	38,32	16,08	100
(72) Prabumulih	14,25	21,78	21,63	31,49	10,84	100
(73) Pagaralam	14,76	23,66	22,43	30,36	8,79	100
(74) Lubuklinggau	10,86	21,39	20,82	35,54	11,39	100
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>19,42</b>	<b>29,02</b>	<b>20,62</b>	<b>24,02</b>	<b>6,92</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS; Susenas 2014

Menurut kabupaten/kota, tingkat pendidikan penduduk yang rendah ditemui di Kabupaten OKI dan Musi Rawas, di mana pada kelima daerah ini persentase penduduk yang berpendidikan SD ke bawah paling tinggi (di atas 60 persen). Sedangkan tingkat pendidikan yang tinggi ditemui di Kota Palembang, Lubuklinggau

dan Prabumulih, di mana pada ketiga daerah ini persentase penduduk yang berpendidikan PT di atas 10 (sepuluh) persen.

#### 6.4. Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase penduduk yang masih bersekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan angka partisipasi sekolah (APS). Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan di bidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. APS mempunyai keunggulan dapat mencerminkan partisipasi/akses pendidikan sesuai kelompok usia sekolah sehingga jelas menggambarkan seberapa besar penduduk yang sedang menikmati pendidikan. Tetapi kelemahannya, APS tidak dapat melihat di jenjang apa seseorang tersebut bersekolah/nikmati pendidikan.

Tabel 6.6 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Umur, 2006 – 2014

Kelompok Umur	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 – 12	96,84	97,43	97,79	97,80	98,00	97,91	98,04	98,52	99,47
13 – 15	83,43	83,85	83,21	84,64	85,41	85,32	88,52	89,17	93,36
16 – 18	52,77	53,49	52,12	54,08	54,79	55,93	58,21	60,08	67,84
19 – 24	10,35	11,06	9,71	11,57	12,07	12,25	13,55	13,88	16,87

Sumber: BPS; Susenas, 2006 – 2014

Tabel 6.6 menunjukkan semakin tinggi umur, angka partisipasi sekolah semakin kecil, mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka partisipasi sekolah anak-anak usia 7-12 tahun (usia SD) pada tahun 2014 telah mencapai 99,47 persen. Pada kelompok umur 13-15 tahun (usia SLTP), angka partisipasi sekolah lebih kecil (93,36 persen) dan pada kelompok umur 16-18 tahun, angka partisipasi sekolah hanya sebesar 67,84 persen. Ini berarti bahwa masih ada 0,53 persen penduduk usia 7-12 tahun, 6,64 persen penduduk usia 13 – 15 tahun dan 32,16 persen penduduk usia 16 – 18 tahun yang tidak bersekolah.

Angka Partisipasi Sekolah menurut kelompok umur per kabupaten/kota disajikan pada Tabel 6.7. Angka Partisipasi Sekolah usia 7-12 tahun yang terendah dijumpai di Kabupaten Muara Enim (98,77 persen), Empat Lawang (98,92 persen) dan OKU (98,95 persen), sedangkan tertinggi ada di Kabupaten Lahat, OKU Selatan, OKU Timur, Prabumulih, Pagar Alam dan Lubuk Linggau, masing-masing APS 7-12 nya 100 persen). Pada usia 13-15 tahun partisipasi sekolah yang paling rendah ditemui di Kabupaten Ogan Komering Ilir (87,53 persen) dan Ogan Ilir (87,58 persen), sedangkan yang tertinggi berada di Lahat (100 persen). Untuk kelompok umur 16-18 tahun partisipasi sekolah terendah adalah di Kabupaten Ogan Komering Ilir (50,45 persen) dan Musi Rawas (55,04 persen) sedangkan tertinggi adalah di Kabupaten Lahat (82,65 persen).

Tabel 6.7. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Umur, 2014

Kabupaten/Kota	7 – 12	13 – 15	16 – 18
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	98,95	94,06	73,56
(02) Ogan Komering Ilir	99,16	87,53	50,45
(03) Muara Enim	98,77	92,28	63,56
(04) Lahat	100,00	100,00	82,65
(05) Musi Rawas	99,47	95,02	55,04
(06) Musi Banyuasin	99,70	90,85	60,22
(07) Banyuasin	99,38	91,18	62,15
(08) OKU Selatan	100,00	91,60	66,78
(09) OKU Timur	100,00	93,44	67,58
(10) Ogan Ilir	99,06	87,58	65,97
(11) Empat Lawang	98,92	98,13	75,20
(71) Palembang	99,69	97,94	76,44
(72) Prabumulih	100,00	94,70	76,09
(73) Pagaralam	100,00	98,46	78,11
(74) Lubuklinggau	100,00	94,41	72,48
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>99,47</b>	<b>93,36</b>	<b>67,84</b>

Sumber: BPS; Susenas 2014

Lebih jauh tentang partisipasi sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu tingkat partisipasi penduduk kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun di masing-masing jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA. Angka Partisipasi Murni mencerminkan partisipasi dan akses penduduk bersekolah di jenjang tertentu sesuai kelompok usia pada jenjang tersebut (bersekolah tepat waktu). Tetapi APM memiliki kelemahan tidak dapat menggambarkan anak yang

sekolah di luar kelompok umur di suatu jenjang seperti anak usia 5 – 6 tahun dan di atas 12 tahun yang masih bersekolah di SD/Sederajat.

**Tabel 6.8 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan, 2006 – 2014**

Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SD	93,01	92,69	93,10	93,60	94,17	89,79	92,67	95,06	96,13
SLTP	68,01	64,97	65,10	65,88	66,27	64,12	67,75	71,78	75,87
SLTA	43,15	42,62	41,37	43,00	43,49	45,34	48,98	50,92	57,92

*Sumber: BPS; Susenas, 2006 – 2014*

Inpres no 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GN-PPWBA) mempunyai target: Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Sederajat minimal 95 persen pada akhir tahun 2008; Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat minimal 95 Persen akhir tahun 2008; serta persentase buta aksara 15 tahun ke atas maksimum 5 persen pada akhir tahun 2009.

Dikaitkan dengan program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun, angka pada Tabel 6.8 memberikan informasi bahwa program tersebut belum sepenuhnya berhasil karena angka partisipasi murni di tingkat SD baru mencapai 96,13 persen dan APM SLTP hanya sebesar 75,87 persen.

Dilihat per kabupaten/kota, angka partisipasi murni jenjang SLTA ini hampir semua kabupaten/kota masih cukup rendah. Angka yang terendah terdapat di

Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Musi Rawas sedangkan yang tertinggi di Kota Pagaralam dan Kabupaten Lahat (Tabel 6.9.).

**Tabel 6.9. Angka Partisipasi Murni Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2014**

Kabupaten/Kota	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	96,58	77,61	60,34
(02) Ogan Komering Ilir	96,42	70,57	40,48
(03) Muara Enim	96,97	72,08	52,81
(04) Lahat	97,36	77,22	74,31
(05) Musi Rawas	98,64	78,77	46,70
(06) Musi Banyuasin	98,88	74,83	52,39
(07) Banyuasin	97,26	72,19	51,04
(08) OKU Selatan	98,53	77,96	61,05
(09) OKU Timur	98,54	77,37	59,90
(10) Ogan Ilir	95,21	66,05	51,33
(11) Empat Lawang	98,22	82,25	68,53
(71) Palembang	89,76	81,29	65,21
(72) Prabumulih	98,57	74,46	65,64
(73) Pagaralam	98,13	87,57	74,88
(74) Lubuklinggau	95,34	79,51	64,93
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>96,13</b>	<b>75,87</b>	<b>57,92</b>

Sumber: BPS; Susenas 2014

Angka Partisipasi Kasar (APK) mengukur tingkat partisipasi sekolah setiap jenjang pendidikan tanpa melihat umur. Meskipun APK merupakan angka kasar dan cenderung lebih tinggi dibandingkan APS dan APM, ukuran ini masih sering dipakai untuk melihat banyaknya anak yang masuk sekolah tidak tepat waktu.

Sebagaimana APS dan APM, APK di Sumatera Selatan juga cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu khususnya untuk jenjang SLTA (Tabel 6.10.). Pada tahun 2014, APK SD mencapai 112,01 persen, APK SLTP sebesar 88,43 persen dan APK SLTA sebesar 72,51 persen. Dibandingkan dengan APM, diketahui bahwa persentase anak yang sekolah tidak tepat waktu cukup tinggi, di atas 10 persen baik di SD, SLTP maupun SLTA.

Tabel 6.10 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan, 2006 – 2014

Jenjang Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
SD	112,92	112,25	111,83	115,73	113,75	103,84	106,09	110,81	112,01
SLTP	84,24	83,06	83,32	80,68	82,12	89,62	86,62	85,85	88,43
SLTA	53,16	53,78	53,39	61,26	60,87	63,12	69,00	62,78	72,51

Sumber: BPS; Susenas, 2006 – 2014

APK menurut kabupaten/kota disajikan pada Tabel 6.11. di bawah ini. Pada jenjang SD, APK yang tinggi di Kabupaten Empat Lawang (119,51 persen), sedangkan terendah di Lubuk Linggau (106,08 persen). Pada jenjang SLTP, APK tertinggi adalah Palembang (108,36 persen) dan terendah Muara Enim (81,80

persen). Sedangkan pada jenjang SLTA, APK tertinggi Kota Prabumulih (87,54 persen) dan terendah Musi Rawas (54,94 persen).

**Tabel 6.11. Angka Partisipasi Kasar Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2014**

Kabupaten/Kota	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	111,85	91,09	71,28
(02) Ogan Komering Ilir	110,91	83,53	59,32
(03) Muara Enim	112,47	81,80	70,16
(04) Lahat	119,23	87,16	92,04
(05) Musi Rawas	113,88	83,52	54,94
(06) Musi Banyuasin	114,49	82,30	67,72
(07) Banyuasin	113,92	86,49	61,66
(08) OKU Selatan	111,10	85,31	71,43
(09) OKU Timur	112,10	86,11	70,43
(10) Ogan Ilir	111,05	75,52	74,18
(11) Empat Lawang	119,51	87,49	82,43
(71) Palembang	106,91	108,36	80,19
(72) Prabumulih	113,41	82,18	87,54
(73) Pagaralam	115,08	92,49	83,87
(74) Lubuklinggau	106,08	90,60	81,75
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>112,01</b>	<b>88,43</b>	<b>72,51</b>

Sumber: BPS; Susenas 2014

## 6.5. Fasilitas Pendidikan

Semakin meningkatnya angka partisipasi sekolah, khususnya untuk jenjang pendidikan SD dan SLTP harus diikuti dengan meningkatnya fasilitas pendidikan, terutama mengenai daya tampung ruang kelas, sehingga program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah dapat berhasil. Guna mengatasi kekurangan daya tampung, pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan seperti menambah pembangunan unit gedung baru dengan prioritas pada daerah yang angka partisipasi sekolahnya masih rendah dan daerah terpencil, dan merehabilitasi gedung-gedung SD dan SLTP dengan prioritas gedung yang rusak berat serta mengangkat guru kontrak untuk di tempatkan pada sekolah yang kekurangan guru.

Perkembangan daya dukung fasilitas pendidikan selama empat tahun terakhir disajikan pada Tabel 6.12 berupa jumlah sekolah, jumlah guru maupun jumlah siswa. Jumlah sekolah dalam empat tahun terakhir terus meningkat untuk mengimbangi jumlah siswa yang juga cenderung meningkat baik jenjang SD, SLTP maupun SLTA. Demikian juga jumlah guru terus meningkat dari tahun ajaran 2007/2008 sampai tahun ajaran 2012/2014.

Tingkat kecukupan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilihat melalui rasio siswa terhadap jumlah sekolah dan rasio siswa terhadap jumlah guru. Dari Tabel 6.12. rasio siswa sekolah secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun ajaran 2013/2014, rata-rata 1 (satu) sekolah setingkat SD menampung sebanyak 228 orang siswa, 1 (satu) sekolah setingkat SLTP rata-rata menampung 333 orang siswa dan 1 (satu) sekolah setingkat SLTA rata-rata menampung sebanyak 308 orang siswa.

Tabel 6.12. Jumlah Sekolah, Jumlah Guru, Jumlah Siswa, Rasio Siswa-Sekolah dan Rasio Siswa-Guru Menurut Jenjang Pendidikan , 2008/2009 – 2012/2014

Jenjang Pendidikan	2008/2009	2009/2010 <sup>)</sup>	2010/2011 <sup>)</sup>	2011/2012 <sup>)</sup>	2012/2013 <sup>)</sup>	2013/2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
<b>Jumlah Sekolah</b>						
SD	4.882	4.573	4.530	4.437	4.588	4.616
SLTP	1.542	1.136	1.128	1.201	1201	1.240
SLTA	863	727	709	797	797**	840
<b>Jumlah Guru</b>						
SD	62.280	59.552	57.436	62.757	62.428	63.384
SLTP	23.687	24.254	22.919	18.966	23.788	25.478
SLTA	16.109	18.302	18.001	21.302	21.302**	23.092
<b>Jumlah Siswa</b>						
SD	991.079	969.811	948.946	948.600	1.044.230	1.054.410
SLTP	358.202	323.986	310.542	327.534	307.732	413.453
SLTA	254.348	247.804	248.772	288.736	288.736**	259.331
<b>Rasio Siswa-Sekolah</b>						
SD	203,01	212,07	209,48	213,79	227,60	228,43
SLTP	232,30	285,20	275,30	272,72	256,23	333,43
SLTA	294,73	340,86	350,88	362,28	240,20	308,73
<b>Rasio Siswa-Guru</b>						
SD	15,91	16,29	16,52	15,12	16,73	16,64
SLTP	15,12	13,36	13,55	17,27	12,94	16,23
SLTA	15,79	13,54	13,82	13,55	13,55**	11,23

Sumber: Ikhtisar Data Pokok Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 dan Sumatera Selatan Dalam Angka 2012-2014

Catatan: \*) Tidak Termasuk MI, MTs dan MA

\*\*\*) Data tahun 2012

## 6.6. Permasalahan dan Tantangan

Berdasarkan uraian di atas, secara umum keadaan pendidikan yang ada di Sumatera Selatan digambarkan sebagai berikut:

a. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas

Meskipun kesempatan memperoleh pendidikan terus mengalami peningkatan, tetapi rata-rata lama sekolah masih rendah, APS juga masih rendah khususnya pada jenjang SLTP dan SLTA. Tantangan ke depan adalah memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang mencakup pemerataan dan efisiensi internal pendidikan dasar; meningkatkan akses terhadap pendidikan menengah yang berkualitas; meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi; meningkatkan keberaksaraan; meningkatkan pemerataan akses pendidikan.

b. Kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan masih rendah.

Pendidikan yang berkualitas dan relevan memberikan bekal watak yang baik dan keterampilan dasar yang memadai yang memungkinkan lulusan bekerja dan berkembang secara lebih luwes sesuai dengan tuntutan lapangan kerja yang terus berkembang. Tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan mencakup upaya meningkatkan kesiapan anak bersekolah; meningkatkan kemampuan kognitif lulusan; meningkatkan karakter dan soft-skill lulusan; meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan menengah; meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi; meningkatkan kualitas penelitian di pendidikan tinggi; dan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

- c. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas masih terbatas.

Tantangan yang dihadapi untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas meliputi percepatan penuntasan rehabilitasi gedung sekolah yang rusak; peningkatan ketersediaan buku mata pelajaran; peningkatan ketersediaan dan kualitas laboratorium dan perpustakaan; dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK); serta peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan.

## **BAB VII**

### **KETENAGAKERJAAN**

Tenaga kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk memenuhi perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Pada suatu kelompok masyarakat, sebagian besar dari mereka, utamanya telah memasuki usia kerja, diharapkan terlibat dalam lapangan kerja tertentu atau aktif dalam kegiatan perekonomian. Di Indonesia, usia kerja yang digunakan untuk keperluan pengumpulan data ketenagakerjaan adalah usia 15 tahun atau lebih. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2014, jumlah penduduk yang berumur 15 tahun keatas yang termasuk angkatan kerja tercatat sebanyak 3,8 juta jiwa.

#### **7.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah proporsi penduduk usia kerja yang termasuk dalam angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan menganggur. Makin tinggi angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja, kebutuhan penduduk untuk bekerja, dan berbagai faktor sosial, ekonomi dan demografis merupakan besaran-besaran yang mempengaruhi angka TPAK.

Tabel 7.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2006 – 2013

Jenis Kelamin	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Laki-laki	86,01	84,15	85,35	84,58	84,66	86,14	86,08	82,60	84,37
Perempuan	53,39	54,02	54,06	51,88	55,41	55,74	52,57	50,48	52,91
Lk + Pr	69,64	69,03	69,79	68,31	70,23	71,15	69,56	66,75	68,85

Sumber: BPS; Sakernas Agustus, 2006 – 2014

Data Sakernas Agustus 2014 menunjukkan bahwa TPAK mencapai 68,85 persen. TPAK berbeda menurut jenis kelamin, di mana laki-laki mempunyai TPAK yang lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini disebabkan TPAK laki-laki bersifat universal karena setiap laki-laki dewasa dituntut untuk mencari nafkah dirinya maupun keluarganya. TPAK wanita dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya pendidikan wanita, terbukanya kesempatan kerja bagi wanita, meningkatnya kebutuhan ekonomi keluarga dan kemajuan sosial ekonomi masyarakat, seperti pandangan terhadap wanita yang bekerja di luar rumah dan sebagainya.

Tabel 7.2 menyajikan TPAK menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin di Sumatera Selatan tahun 2014. TPAK yang rendah umumnya dijumpai di daerah-daerah perkotaan seperti Palembang dan Lubuklinggau. Bisa dipahami, di daerah perkotaan tingkat partisipasi sekolah penduduk usia kerja cukup tinggi sehingga belum terjun ke dunia kerja. Sedangkan di daerah pedesaan, karena tuntutan ekonomi, penduduk usia kerja yang tidak sanggup melanjutkan pendidikan terpaksa harus memasuki dunia kerja meskipun sebagai pekerja keluarga. Tabel 7.2 juga

menunjukkan bahwa diferensiasi TPAK menurut jenis kelamin terjadi di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

**Tabel 7.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014**

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	81,47	44,40	63,33
(02) Ogan Komering Ilir	89,01	51,55	70,72
(03) Muara Enim	82,47	57,45	70,06
(04) Lahat	83,75	57,04	70,66
(05) Musi Rawas	91,44	69,42	80,60
(06) Musi Banyuasin	87,01	45,29	66,67
(07) Banyuasin	86,74	47,43	67,48
(08) OKU Selatan	90,80	64,62	78,55
(09) OKU Timur	84,76	47,37	66,45
(10) Ogan Ilir	82,32	65,95	74,07
(11) Empat Lawang	84,71	54,33	69,90
(71) Palembang	78,42	49,09	63,63
(72) Prabumulih	83,77	52,70	68,20
(73) Pagaralam	82,63	53,78	68,59
(74) Lubuklinggau	82,63	48,29	65,39
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>84,37</b>	<b>52,91</b>	<b>68,85</b>

Sumber: BPS; Sakernas, Agustus 2014

## 7.2. Tingkat Pengangguran Tingkat Terbuka (TPT)

Merupakan suatu hal yang umum, bahwa peningkatan penawaran tenaga kerja tidak selalu diikuti dengan peningkatan yang memadai pada permintaan tenaga kerja karena terbatasnya lapangan kerja yang ada. Sebagai akibatnya, sebagian tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan atau menjadi pengangguran.

Pengangguran merupakan persoalan yang dilematis, di mana pemerintah atau instansi yang mengurus ketenagakerjaan sebenarnya mampu mengurangi atau menekan angka pengangguran tapi ketika terjadi proses penekanan angka pengangguran maka akan terjadi implikasi lainnya di sektor ekonomi. Implikasi ini dapat terjadi akibat dari perubahan-perubahan yang dibuat oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan teori ekonomi menyatakan bahwa jika perekonomian berada dibawah *full employment*, maka pendapatan dapat ditingkatkan melalui peningkatan pada pengeluaran pemerintah, atau dengan menurunkan pajak. Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usaha untuk menekan pengangguran mengakibatkan terjadinya peningkatan biaya pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak yang diterima oleh pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan di setiap negara maju mempunyai kewajiban untuk menyediakan tunjangan bagi para penganggur. Dan bagi negara yang masih berkembang, pengangguran merupakan persoalan yang sangat kompleks untuk diselesaikan. Dan akhirnya pengangguran pada prinsipnya mengandung arti hilangnya output dan kesengsaraan bagi orang yang tidak bekerja dan merupakan suatu bentuk pemborosan sumber daya ekonomi.

Tabel 7.3 menunjukkan bahwa pada periode 2006 – 2013 tingkat pengangguran terbuka terus menurun dari 9,33 persen pada tahun 2006 menjadi 7,61 persen pada tahun 2009 dan 4,84 persen pada Agustus 2013, tapi pada tahun

2014 sedikit mengalami peningkatan menjadi 4,96 persen. Penurunan angka pengangguran tentu saja menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi di Sumatera Selatan. Pengangguran yang menurun berarti adanya penyerapan tenaga kerja yang meningkat di Sumatera Selatan.

Tabel 7.3. Tingkat Pengangguran Tingkat Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin, 2006 – 2014

Jenis Kelamin	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Laki-laki	8,92	8,86	7,70	7,68	5,19	5,09	4,87	5,17	5,57
Perempuan	9,97	10,07	8,69	7,50	8,94	6,85	7,09	4,28	3,97
Lk + Pr	9,33	9,34	8,08	7,61	6,65	5,77	5,70	4,84	4,96

Sumber: BPS; Sakernas Agustus, 2006 – 2014

Tingkat pengangguran di Sumatera Selatan mempunyai ciri bahwa TPT di daerah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan. Diduga, di daerah perdesaan karena didominasi oleh sektor pertanian, penyerapan tenaga kerja relatif tinggi. Penduduk usia kerja dengan mudah dapat bekerja di sektor pertanian meskipun sebagai pekerja keluarga atau pekerja bebas (buruh tani) karena tidak membutuhkan keahlian atau pendidikan yang tinggi. Sebaliknya di daerah perkotaan, lapangan pekerjaan formal lebih selektif dalam menerima tenaga kerja khususnya dengan tingkat pendidikan yang dipersyaratkan. Ciri lain adalah bahwa TPT perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini bisa dijelaskan bahwa kesempatan kerja perempuan cenderung lebih terbatas dibandingkan laki-laki. Selain itu, pada momen-momen tertentu penduduk laki-laki lebih besar peluangnya untuk memasuki pasar kerja dibandingkan perempuan,

sehingga angka pengangguran wanita menjadi tinggi. Tapi pada tahun 2013 dan 2014 kondisi pengangguran dilihat dari jenis kelamin mengalami perubahan, dimana tingkat pengangguran perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan di daerah Sumsel sudah banyak yang ikut turun bekerja.

**Tabel 7.4. Tingkat Pengangguran Tingkat Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014**

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	4,66	3,89	4,40
(02) Ogan Komering Ilir	4,38	1,84	3,48
(03) Muara Enim	7,51	2,83	5,61
(04) Lahat	5,98	5,07	5,62
(05) Musi Rawas	1,51	1,89	1,67
(06) Musi Banyuasin	3,64	3,95	3,74
(07) Banyuasin	2,99	2,92	2,97
(08) OKU Selatan	1,29	2,93	1,92
(09) OKU Timur	4,36	4,25	4,32
(10) Ogan Ilir	3,46	2,51	3,03
(11) Empat Lawang	5,40	6,65	5,87
(71) Palembang	11,24	6,30	9,32
(72) Prabumulih	7,92	5,27	6,90
(73) Pagaralam	5,83	3,16	4,81
(74) Lubuklinggau	5,45	9,08	6,80
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>5,57</b>	<b>3,97</b>	<b>4,96</b>

Sumber: BPS; Sakernas, Agustus 2014

Tingkat pengangguran dirinci menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin disajikan pada Tabel 7.4. Dua ciri pengangguran yang disebutkan di atas terlihat juga mendominasi pola pengangguran di kabupaten/kota, di mana pengangguran perempuan lebih rendah di hampir semua kabupaten/kota kecuali di Musi Rawas, Musi Banyuasin, OKU Selatan, Empat Lawang dan Lubuk Linggau di mana di kelima daerah ini pengangguran laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan. Demikian juga tingkat pengangguran yang tinggi dijumpai di daerah-daerah perkotaan seperti Kota Palembang, Prabumulih, Pagaram dan Lubuklinggau.

Tabel 7.5 Tingkat Pengangguran Tingkat Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan, 2006 – 2014

Pendidikan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
< SD	4,21	3,17	2,75	2,56	3,25	2,37	2,28	2,06	1,75
SD	4,95	4,37	4,31	3,73	3,12	2,75	3,67	1,93	2,17
SLTP	11,62	10,87	8,35	7,07	5,42	5,04	5,70	3,62	4,34
SLTA	20,39	21,01	16,69	15,47	13,63	13,05	10,31	9,81	10,78
>SLTA	9,65	16,87	16,64	17,73	11,87	7,16	8,01	8,70	6,16

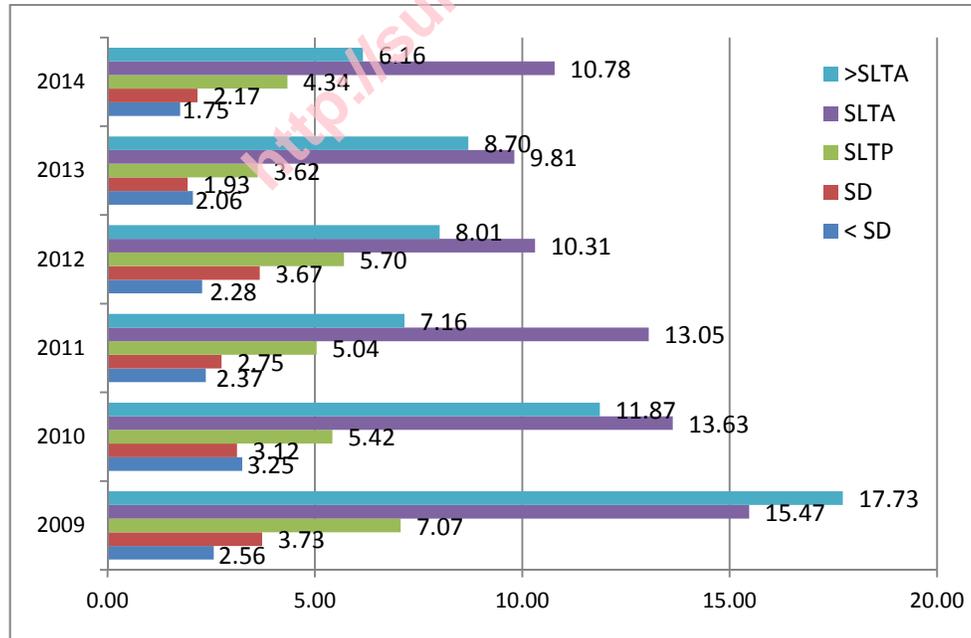
Sumber: BPS; Sakernas Agustus, 2006-2014

Tabel 7.5 menunjukkan tingkat pengangguran terbuka menurut tingkat pendidikan tertinggi yang di tamatkan. Secara umum, tingkat pengangguran terbuka cenderung tinggi untuk mereka yang mempunyai pendidikan tinggi dan cenderung rendah untuk mereka yang berpendidikan rendah. Pada tahun 2014, tingkat pengangguran terbuka untuk mereka yang berpendidikan SLTA mencapai 10,78

persen sedangkan untuk yang berpendidikan >SLTA TPT sebesar 6,16 persen. Sebagai perbandingan, pada tahun yang sama tingkat pengangguran terbuka untuk mereka yang tamat sekolah dasar hanyalah 2,17 persen, sedangkan untuk mereka yang tidak/belum pernah sekolah adalah 1,75 persen. Dibandingkan tahun 2009 dan 2010, ada kecenderungan menurunnya TPT untuk pendidikan SLTA dan PT.

Angka pada Tabel 7.5 di atas menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat pengangguran terdidik di Sumatera Selatan. Masalah ini sebenarnya terjadi sudah sejak lama dan sampai saat ini belum mendapatkan penyelesaian yang tepat. Pekerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi umumnya menginginkan pekerjaan di sektor formal padahal sektor ini mempunyai daya tampung yang sangat terbatas. Tidak dapat dielakkan, tingkat pengangguran terdidik menjadi sangat tinggi.

Gambar 7.1. TPT Menurut Pendidikan 2009 – 2014



Sumber: BPS Sakernas Agustus, 2008-2014

### 7.3. Lapangan Usaha Utama

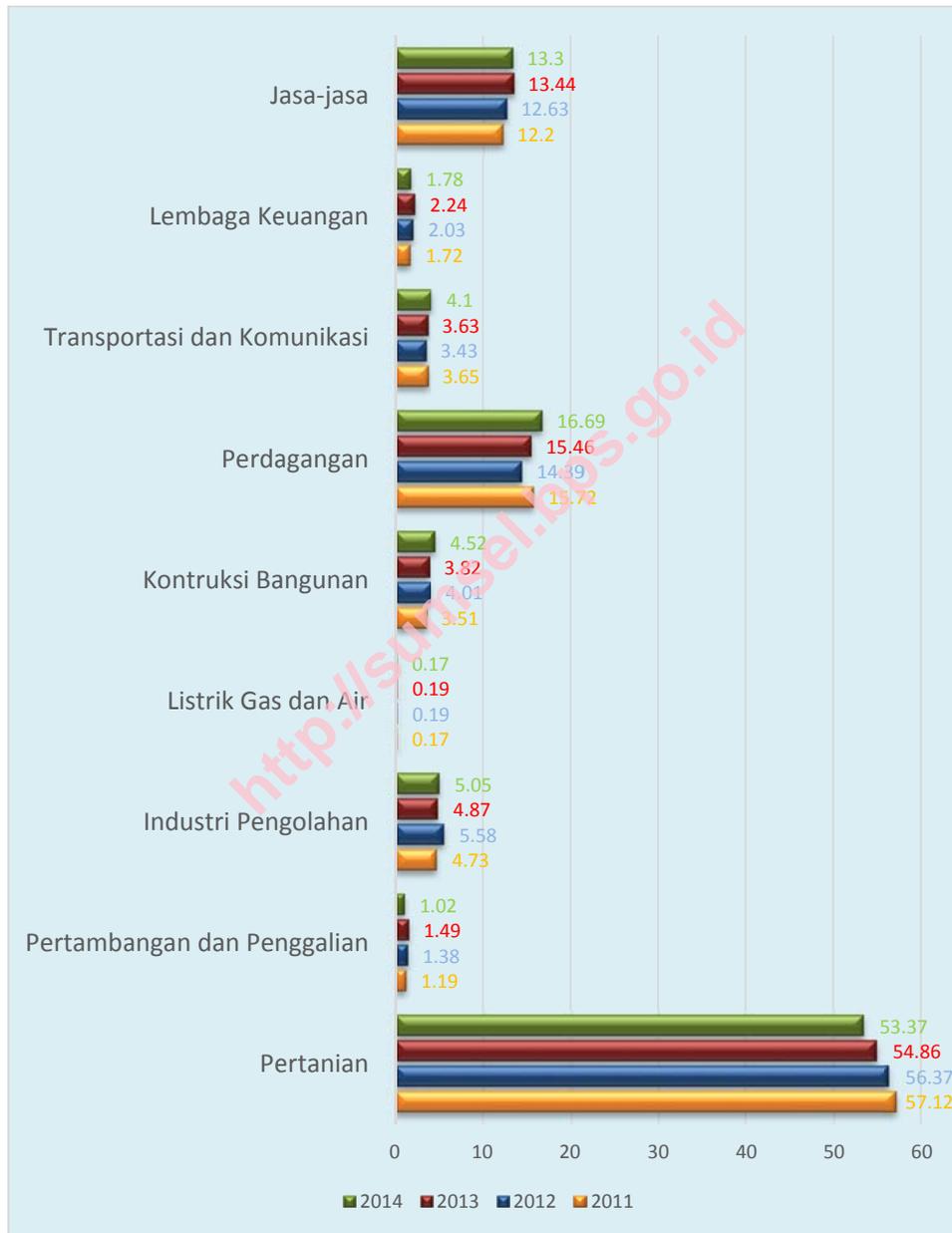
Data tentang distribusi sektoral penyerapan tenaga kerja dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat kemampuan sektor-sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja dan juga sebagai tolok ukur kemajuan perekonomian suatu daerah. Tahapan kemajuan perekonomian suatu negara dari tradisional menuju negara industri, salah satunya ditandai dengan adanya transformasi sektoral tenaga kerja dari sektor primer dengan produktivitas rendah ke sektor-sektor dengan produktivitas lebih tinggi yaitu sektor sekunder dan tersier. Sehingga, persentase tenaga kerja di sektor primer akan menurun dan sebaliknya pada sektor sekunder dan tersier akan meningkat.

Tabel 7.6 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2006 – 2014

Lapangan Usaha Utama	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Pertanian	64,47	62,02	59,47	59,60	58,05	57,12	56,37	54,86	53,37
Pertambangan dan Penggalian	0,63	0,77	0,85	0,79	0,82	1,19	1,38	1,49	1,02
Industri Pengolahan	4,36	5,07	4,99	4,87	4,90	4,73	5,58	4,87	5,05
Listrik Gas dan Air	0,08	0,21	0,18	0,15	0,20	0,17	0,19	0,19	0,17
Konstruksi Bangunan	2,61	3,19	3,57	3,72	3,77	3,51	4,01	3,82	4,52
Perdagangan	11,73	12,44	15,47	14,29	14,56	15,72	14,39	15,46	16,69
Transportasi dan Komunikasi	4,50	4,75	5,06	5,35	4,48	3,65	3,43	3,63	4,10
Lembaga Keuangan	0,77	0,80	0,61	0,68	0,96	1,72	2,03	2,24	1,78
Jasa-jasa	10,84	10,76	9,80	10,55	12,25	12,20	12,63	13,44	13,30

Sumber: BPS; Sakernas Agustus 2006-2014

Gambar 7.2. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, Tahun 2011 – 2014



Sumber: Sakernas 2011 - 2014

Sumatera Selatan masih tergolong sebagai daerah agraris, hal ini karena sumbangan sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja dan terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) relatif masih dominan. Tabel 7.6 di atas menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih cukup tinggi pada tahun 2014 (53,37 persen) meskipun terus menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Setelah sektor pertanian, sektor yang cukup banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa. Distribusi ini tidak banyak berbeda dibandingkan tahun 2010, tahun 2011 maupun tahun 2012 dan 2013.

Dilihat menurut kabupaten/kota, daerah-daerah yang mempunyai penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian paling tinggi pada tahun 2014 adalah Kabupaten Musi Rawas dan OKU Selatan (di atas 80 persen). Di Kota Palembang, tenaga kerja sebagian besar terserap di sektor jasa-jasa (S) yaitu mencapai 74,83 persen. Di Kota Lubuklinggau, Prabumulih dan Pagar Alam meskipun sektor jasa-jasa (S) mempunyai penyerapan tenaga kerja tertinggi, tetapi sektor pertanian masih cukup besar. Di lain pihak pola distribusi penyerapan tenaga kerja sektor pertanian masih lebih tinggi dibandingkan sektor jasa-jasa (Tabel 7.7).

Tabel 7.7. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Lapangan Usaha Utama, 2014

Kabupaten/Kota	A (Agriculture)	M (Manufacturing)	S (Services)	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(01) Ogan Komering Ulu	60,69	5,19	34,13	100,00
(02) Ogan Komering Ilir	73,10	6,64	20,26	100,00
(03) Muara Enim	61,46	6,59	31,94	100,00
(04) Lahat	63,71	7,42	28,87	100,00
(05) Musi Rawas	85,19	3,66	11,15	100,00
(06) Musi Banyuasin	74,40	6,45	19,15	100,00
(07) Banyuasin	60,64	9,84	29,52	100,00
(08) OKU Selatan	80,45	2,89	16,66	100,00
(09) OKU Timur	62,32	9,16	28,52	100,00
(10) Ogan Ilir	47,13	19,70	33,16	100,00
(11) Empat Lawang	69,88	5,32	24,81	100,00
(71) Palembang	2,16	23,01	74,83	100,00
(72) Prabumulih	23,22	20,00	56,78	100,00
(73) Pagaram	37,89	9,51	52,60	100,00
(74) Lubuklinggau	27,67	11,87	60,45	100,00
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>53,37</b>	<b>10,77</b>	<b>35,87</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS; Sakernas, Agustus 2014

#### 7.4. Status Pekerjaan

Tabel 7.8 di bawah ini menyajikan distribusi persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan. Data hasil Sakernas 2006 - 2014 juga menunjukkan bahwa proporsi penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja dengan status berusaha sendiri dari tahun 2006-2009 cenderung naik, akan tetapi memasuki tahun 2010-2012 cenderung mengalami penurunan, di tahun 2013 mengalami peningkatan tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2014. Namun proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan status berusaha dibantu pekerja tidak tetap/buruh tidak dibayar serta pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar hingga tahun 2014 menunjukkan penurunan. Sebaliknya penduduk yang bekerja dengan status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar cenderung terus meningkat. Sedangkan pekerja bebas di sektor pertanian cenderung mengalami penurunan pada periode 2006 – 2014.

Data pekerja menurut status pekerjaan sering digunakan untuk melihat banyaknya pekerja di sektor informal. Pekerja sektor informal adalah pekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja keluarga serta pekerja bebas di sektor pertanian dan non pertanian. Terlihat pada Tabel 7.8. ada kecenderungan menurunnya pekerja di sektor informal yang diikuti cenderung meningkatnya pekerja di sektor formal.

Tabel 7.8. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2006 – 2014

Status Pekerjaan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>Informal</b>	<b>76,74</b>	<b>74,09</b>	<b>75,72</b>	<b>75,29</b>	<b>73,13</b>	<b>66,69</b>	<b>64,04</b>	<b>64,34</b>	<b>62,54</b>
Berusaha sendiri	15,54	15,96	17,72	19,83	18,43	17,51	16,55	19,45	18,41
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/brh tdk dibayar	27,53	25,32	25,03	23,93	24,22	20,23	19,56	18,27	18,72
Pekerja bebas pertanian	3,29	5,78	6,21	3,56	3,07	4,01	3,21	2,93	2,49
Pekerja bebas non pertanian	1,52	2,19	2,61	2,00	1,99	1,96	2,19	2,13	2,00
Pekerja tak dibayar	28,86	24,84	24,15	25,97	25,42	22,98	22,53	21,55	20,93
<b>Formal</b>	<b>23,26</b>	<b>25,91</b>	<b>24,29</b>	<b>24,71</b>	<b>26,87</b>	<b>33,31</b>	<b>35,96</b>	<b>35,66</b>	<b>37,46</b>
Berusaha dibantu buruh tetap/brh dibayar	1,54	1,47	1,85	1,98	2,49	3,16	2,68	2,73	2,85
Buruh/karyawan	21,72	24,44	22,44	22,73	24,38	30,15	33,28	32,93	34,61

Sumber: BPS; Sakernas Agustus 2006-2014

Keberadaan dan kelangsungan kegiatan sektor informal dalam sistem ekonomi kontemporer bukanlah gejala negatif, namun lebih sebagai realitas ekonomi kerakyatan yang berperan cukup penting dalam pengembangan masyarakat dan pembangunan nasional. Setidaknya, ketika program pembangunan kurang mampu menyediakan peluang kerja bagi angkatan kerja, sektor informal dengan segala kekurangannya mampu berperan sebagai penampung dan alternatif

peluang kerja bagi para pencari kerja. Ketidakmampuan pembangunan menyediakan peluang kerja, untuk sementara dapat diredam lantaran tersedia peluang kerja di sektor informal. Begitupun ketika kebijakan pembangunan cenderung menguntungkan usaha skala besar, sektor informal kendati tanpa dukungan fasilitas sepenuhnya dari negara, dapat memberikan subsidi sebagai penyedia barang dan jasa murah untuk mendukung kelangsungan hidup para pekerja usaha skala besar. Bahkan, tatkala perekonomian nasional mengalami kemunduran akibat resesi, sektor informal mampu bertahan tanpa membebani ekonomi nasional, sehingga roda perekonomian masyarakat tetap bertahan. Peran sektor informal ini telah berlangsung sejak lama dalam pasang surut perkembangan masyarakat dan dinamika perkembangan ekonomi.

Menurut Kabupaten/Kota, umumnya ditemui pola yang mirip dengan provinsi di mana didominasi oleh berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, buruh/karyawan dan pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga. Ada kecenderungan bahwa di daerah perkotaan pekerja dengan status buruh/karyawan cukup tinggi seperti di Kota Palembang, Lubuklinggau dan Prabumulih, sedangkan di daerah pedesaan yang paling tinggi adalah status pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga sebagaimana ditemui misalnya di OKU Selatan, Musi Rawas, Lahat, Musi Banyuasin dan Muara Enim.

Tabel 7.9. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Kabupaten/Kota dan Status Pekerjaan Utama, 2014

Kabupaten/Kota	1	2	3	4	5	6	7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(01) Ogan Komering Ulu	14,79	12,93	2,90	55,43	0,62	0,61	12,71
(02) Ogan Komering Ilir	19,94	20,38	1,92	28,20	5,97	1,65	21,94
(03) Muara Enim	20,83	22,00	2,29	28,18	0,53	0,12	26,05
(04) Lahat	16,34	25,31	2,10	19,80	6,87	2,67	26,92
(05) Musi Rawas	9,49	23,49	1,35	29,47	0,25	0,00	35,96
(06) Musi Banyuasin	22,08	21,88	2,42	24,04	2,54	0,72	26,31
(07) Banyuasin	18,99	23,78	2,88	24,26	1,25	3,31	25,54
(08) OKU Selatan	9,75	32,96	1,47	9,55	4,15	2,08	40,02
(09) OKU Timur	13,73	20,14	4,99	32,68	8,64	1,59	18,24
(10) Ogan Ilir	23,50	17,41	2,70	31,27	2,18	3,85	19,09
(11) Empat Lawang	32,67	21,57	1,30	19,13	1,35	1,24	22,72
(71) Palembang	19,16	7,04	4,37	61,29	0,00	3,15	5,00
(72) Prabumulih	17,69	14,61	3,52	43,34	0,81	3,41	16,62
(73) Pagaralam	29,44	15,70	3,30	27,84	3,03	7,44	13,26
(74) Lubuklinggau	22,19	5,95	2,82	57,83	0,48	1,36	9,37
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>18,41</b>	<b>18,72</b>	<b>2,85</b>	<b>34,61</b>	<b>2,49</b>	<b>2,00</b>	<b>20,93</b>

Sumber: BPS, Sakernas, Agustus 2014

Catatan:

- 1 Berusaha sendiri
- 2 Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar
- 3 Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar
- 4 Buruh/karyawan/pegawai
- 5 Pekerja bebas di pertanian
- 6 Pekerja bebas di non pertanian
- 7 Pekerja keluarga/tak dibayar

## 7.5. Jumlah Jam Kerja

Aspek lain dari ketenagakerjaan adalah pemanfaatan tenaga kerja yang umumnya diukur dengan jam kerja. Isu jam kerja ini biasanya dihubungkan dengan setengah pengangguran atau pengangguran terselubung, artinya bahwa penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (35 jam seminggu) dianggap setengah menganggur karena dianggap belum menggunakan seluruh kapasitas sumber daya yang ada seperti tingkat pendidikan, skill dan keterampilan yang dimiliki atau tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang diharapkan sehingga mereka masih berusaha mendapatkan pekerjaan lain.

Lebih dari sepertiga (44,47 persen) pekerja di Sumatera Selatan bekerja di bawah jam kerja normal, yaitu kurang dari 35 jam seminggu. Angka ini cukup besar, dan tentu saja mengindikasikan adanya tingkat setengah pengangguran yang cukup besar. Jika pengangguran terbuka dan setengah pengangguran ini digabungkan, maka akan diperoleh angka yang cukup besar, mencapai hampir separuh dari angkatan kerja.

Tabel 7.10. Persentase Penduduk yang Bekerja Kurang dari 35 Jam Seminggu Menurut Jenis Kelamin, 2006 – 2014

Jenis Kelamin	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Laki-laki	32,62	35,50	37,48	36,13	33,31	37,53	34,75	40,90	40,65
Perempuan	48,46	50,90	48,69	50,52	48,47	51,70	48,82	51,70	50,60
Total	38,67	41,50	41,77	41,57	39,06	42,94	39,99	44,92	44,47

Sumber: BPS; Sakernas Agustus 2006-2014

Pada periode 2006 – 2014 persentase penduduk perempuan yang bekerja di bawah jam kerja normal lebih tinggi dibandingkan laki-laki . Tabel 7.10 juga menunjukkan bahwa selama tahun 2006-2014 proporsi penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu cenderung meningkat kembali di tahun 2013, baik untuk laki-laki maupun perempuan.

**Tabel 7.11. Persentase Penduduk yang Bekerja Kurang dari 35 Jam Seminggu Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2014**

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	57,89	58,17	57,99
(02) Ogan Komering Ilir	60,71	62,89	61,51
(03) Muara Enim	48,99	59,69	53,46
(04) Lahat	46,49	63,85	53,41
(05) Musi Rawas	69,44	72,94	70,92
(06) Musi Banyuasin	31,18	50,33	37,51
(07) Banyuasin	47,10	62,79	52,51
(08) OKU Selatan	36,03	65,53	47,27
(09) OKU Timur	44,42	47,61	45,53
(10) Ogan Ilir	31,79	29,46	30,74
(11) Empat Lawang	34,45	53,35	41,55
(71) Palembang	16,60	26,87	20,73
(72) Prabumulih	19,01	29,92	23,31
(73) Pagaralam	22,01	38,69	28,48
(74) Lubuklinggau	17,95	36,26	24,58
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>40,65</b>	<b>50,6</b>	<b>44,47</b>

Sumber: BPS; Sakernas, Agustus 2014

Tabel 7.11 menyajikan persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal menurut kabupaten/kota dan jenis kelamin. Persentase tertinggi dijumpai di Musi Rawas, OKI, OKU Muara Enim dan Lahat, sedangkan yang paling rendah dijumpai di daerah perkotaan seperti Palembang dan Prabumulih. Untuk semua kabupaten/kota persentase penduduk perempuan yang bekerja di bawah jam kerja normal lebih tinggi dibandingkan laki-laki kecuali Ogan Ilir.

## 7.6. Permasalahan dan Tantangan

Berdasarkan uraian di atas, secara umum keadaan ketenagakerjaan yang ada di Sumatera Selatan mengalami perbaikan yang cukup berarti dalam 5 tahun terakhir. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan menurunnya angka pengangguran (TPT), menurunnya pengangguran terdidik, menurunnya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, menurunnya pekerja sektor informal serta menurunnya setengah pengangguran masih relatif tidak berubah. Beberapa permasalahan dan tantangan bidang ketenagakerjaan yang masih dihadapi adalah:

- a. Terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang baik yang dicerminkan oleh pengangguran lulusan SMA ke atas yang relatif tinggi serta tingginya persentase pekerja di sektor informal.
- b. Kesenjangan upah diantara kelompok pekerja. Pergerakan upah di Indonesia, lebih banyak ditentukan oleh aspek kenaikan tingkat harga dibandingkan dengan kenaikan produktivitas. Produktivitas belum menjadi determinan utama dalam penentuan upah. Sebaiknya, komponen penentuan Upah Minimum Regional (UMR) tidak hanya melihat pada sisi kenaikan inflasi saja, tetapi perlu diimbangi dengan aspek produktivitas dan pencapaian target pekerjaan.

- c. Permasalahan lain adalah rendahnya kualitas tenaga kerja khususnya keahlian yang dimiliki. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya pelatihan berbasis kompetensi serta masih adanya mismatch antara kebutuhan pasar kerja dengan yang dihasilkan dari lembaga pendidikan maupun pelatihan kerja.
- d. Masih Rendahnya penggunaan tenaga kerja yang ditunjukkan oleh masih tingginya persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (setengah pengangguran). Bahkan angka setengah pengangguran ini cenderung meningkat beberapa tahun terakhir.

<http://sumsel.bps.go.id>

## **BAB VIII**

### **TARAF DAN POLA KONSUMSI**

Berkurangnya jumlah penduduk miskin mencerminkan bahwa secara keseluruhan kemampuan ekonomi khususnya pendapatan penduduk meningkat, sedangkan meningkatnya jumlah penduduk miskin mengindikasikan menurunnya kemampuan ekonomi penduduk. Dengan demikian jumlah penduduk miskin merupakan indikator yang cukup baik untuk mengukur tingkat kesejahteraan rakyat. Aspek lain yang perlu dipantau berkenaan dengan peningkatan pendapatan penduduk tersebut adalah bagaimana pendapatan tersebut terdistribusi diantara kelompok penduduk. Indikator distribusi pendapatan (dalam hal ini didekati dengan data pengeluaran), akan memberikan petunjuk aspek pemerataan yang telah tercapai. Dari data pengeluaran dapat juga di ungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan.

#### **8.1. Perkembangan Penduduk Miskin**

Penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pendapatannya (didekati dengan pengeluaran) lebih kecil dari pendapatan yang dibutuhkan untuk hidup secara layak di wilayah tempat tinggalnya. Kebutuhan untuk hidup layak tersebut diterjemahkan sebagai suatu jumlah rupiah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi makanan setara 2100 kilokalori per kapita per hari, perumahan, pakaian, kesehatan, dan pendidikan. Jumlah rupiah tersebut kemudian disebut sebagai garis kemiskinan.

Dalam analisis kemiskinan dikenal beberapa indikator penting yang dapat dipergunakan untuk mengukur insiden kemiskinan. Indikator yang paling sering dipergunakan adalah *head-count ratio* ( $P_0$ ). Ukuran ini memberikan gambaran tentang proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Indikator ini mudah dihitung dan dipahami, namun demikian tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin. Oleh karena itu dikenal juga indikator kemiskinan yang lain, yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau  $P_1$ ) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index* atau  $P_2$ ). Tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index* atau  $P_1$ ) menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin, sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity indeks* atau  $P_2$ ). Penurunan pada  $P_1$  mengidentifikasi adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden kemiskinan. Sedangkan penurunan pada  $P_2$  mengidentifikasi berkurangnya ketimpangan kemiskinan.

Tabel 8.1. Perkembangan Penduduk Miskin Menurut Berbagai Indikator, 2007 – 2014

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah Penduduk Miskin	1.331,80	1.254,29	1.130,00	1.105,00	1.061,87	1.042,04	1.104,60	1.085,80
Persentase Penduduk Miskin	19,15	17,67	15,68	14,80	13,95	13,48	14,06	13,62
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P <sub>1</sub> )	3,84	3,92	2,32	2,38	2,30	1,85	2,49	2,41
Indeks Keparahan Kemiskinan (P <sub>2</sub> )	1,14	1,14	1,16	1,09	0,59	0,43	0,73	0,62
Garis Kemiskinan	178.209	210.893	235.560	256.542	247.397	259.668	291.058	307.488

Catatan : Keadaan September  
 Sumber: BPS Sumatera Selatan

Jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatera Selatan tahun 2007 sebanyak 1.332 juta jiwa, menurun menjadi 1.086 juta jiwa pada tahun 2014, atau berkurang sekitar 0,246 juta jiwa. Dalam hal persentase penduduk miskin (P<sub>0</sub>), juga terlihat adanya penurunan, yaitu dari 19,15 persen pada tahun 2007 menjadi 13,62 persen pada tahun 2014.

Dilihat dari segi kedalaman dan keparahan kemiskinan (P<sub>1</sub> dan P<sub>2</sub>), insiden kemiskinan pada tahun 2011 dapat disebutkan sebagai berikut. Selama periode 2007 – 2012, indeks kedalaman kemiskinan (P<sub>1</sub>) menurun dari 3,84 persen pada tahun 2007 menjadi 1,85 persen pada tahun 2012. Pada periode yang sama, indeks keparahan kemiskinan (P<sub>2</sub>) juga turun dari 1,14 menjadi 0,43. Ini berarti bahwa periode 2007 – 2012, baik dari sisi jumlah dan persentase penduduk miskin berkurang, maupun dari sisi kedalaman dan keparahan kemiskinan menurun dalam

periode tersebut. Tapi periode 2013-2014 terjadi peningkatan baik indeks kedalaman kemiskinan (P1) maupun indeks keparahan kemiskinan (P2).

Peliknya masalah kemiskinan mendesak pemerintah untuk segera melakukan langkah-langkah nyata dalam penanggulangannya, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan nasional, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas yang paling utama. Dalam Proenas 2009 – 2014 bahkan telah ditargetkan bahwa persentase penduduk miskin akan dapat diturunkan menjadi sekitar 8 - 10 persen pada tahun 2014. Guna dapat memenuhi target tersebut, penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk membantu penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Fokus prioritas penanggulangan kemiskinan diarahkan pada Peningkatan dan Penyempurnaan Kualitas Kebijakan Perlindungan Sosial Berbasis Keluarga seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jamkesmas, Subsidi Pendidikan dan Raskin; Menyempurnakan dan Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan PNPM Mandiri; Peningkatan Akses Usaha Mikro dan Kecil kepada Sumberdaya Produktif serta Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi antar Pelaku. Tapi sepertinya target tersebut belum dapat dicapai pada tahun 2014, karena persentase penduduk miskin masih sangat tinggi (13,62 persen).

## **8.2. Taraf Konsumsi Energi dan Protein**

Salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi yang disajikan dalam unit kalori dan protein. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap komoditas makanan yang dikonsumsi dengan besarnya

kandungan kalori dan protein dalam setiap komoditas makanan tersebut. Kecukupan energi dan protein untuk tingkat konsumsi sehari-hari berdasarkan Widyakarya Pangan dan Gizi (WNPG) VIII tahun 2004 masing-masing sebesar 2000 kkal dan 52 gram protein.

Pada tahun 2007, besarnya rata-rata konsumsi energi masyarakat Sumatera Selatan sebesar 2.058,2 kkal per kapita per hari, sudah di atas standar kecukupan gizi menurut WNPG VIII. Demikian juga rata-rata konsumsi protein pada tahun 2007 telah melebihi standar kecukupan menurut WNPG VIII yaitu 58,21 gram per kapita per hari. Pada tahun 2014, angka konsumsi kalori maupun protein turun menjadi 1.907,9 kkal per kapita per hari dan 54,13 gram protein per kapita per hari.

**Tabel 8.2. Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita Per Hari Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 – 2014**

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Energi (kkal)	2.058,2	2.106,4	1.991,8	1.989,1	1.950,1	1.881,5	1.867,9	1.907,9
Protein (gram)	58,21	56,86	53,62	54,67	54,30	51,80	52,58	54,13

Sumber: BPS, diolah dari Susenas Panel 2007-2010 dan Susenas 2011-2014

Konsumsi kalori dan protein menurut kabupaten/kota disajikan pada Tabel 8.2. Pada tahun 2014, hanya 3 kabupaten/kota yang memiliki rata-rata konsumsi kalori di atas standar kecukupan gizi nasional. Untuk konsumsi protein sebagian kabupaten/kota di atas standar kecukupan gizi nasional. Konsumsi kalori tinggi umumnya dijumpai di pedesaan.

**Tabel 8.3. Konsumsi Energi dan Protein Per Kapita Per Hari dan Rata-rata Konsumsi Per Kapita Sebulan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2014**

Kabupaten/Kota	Konsumsi Kalori (kkal/kapita/hari)	Konsumsi Protein (gram/kapita/hari)	Rata-rata Konsumsi Per Kapita (rupiah/bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	1.878,32	52,49	672.937
(02) Ogan Komering Ilir	2.006,44	55,29	564.729
(03) Muara Enim	1.805,37	49,62	575.700
(04) Lahat	1.931,51	53,04	655.087
(05) Musi Rawas	1.883,84	52,85	549.093
(06) Musi Banyuasin	1.975,86	55,26	622.955
(07) Banyuasin	1.921,18	54,38	598.263
(08) OKU Selatan	1.837,88	48,13	455.454
(09) OKU Timur	2.073,39	60,19	718.395
(10) Ogan Ilir	2.030,25	56,41	630.872
(11) Empat Lawang	1.947,46	49,59	470.361
(12) Pali	1.764,04	46,64	403.555
(71) Palembang	1.805,33	55,26	1.094.542
(72) Prabumulih	1.894,31	54,25	760.942
(73) Pagaralam	1.786,86	49,97	596.633
(74) Lubuklinggau	1.944,52	57,94	847.554
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>1.907,96</b>	<b>54,13</b>	<b>703.344</b>

Sumber: BPS; Susenas 2014

### 8.3. Perkembangan Tingkat Kesejahteraan

Indikator lain dari kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan daya beli penduduk. Peningkatan kemampuan daya beli akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok. Meningkatnya kemampuan daya beli penduduk tentu saja diakibatkan meningkatnya pendapatan. Tabel 8.4 menunjukkan bahwa pada periode 2010 – 2014 secara rata-rata pendapatan penduduk Sumatera Selatan meningkat. Peningkatan pendapatan ini menyebabkan meningkatnya kemampuan daya beli penduduk dan akibatnya secara rata-rata konsumsi (pengeluaran) penduduk juga meingkat.

**Tabel 8.4. Beberapa Indikator Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 – 2014**

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (000/Tahun) *)	7.815	8.065	8.248	7.481	7.598	7.714	7.828	7.941
Nilai Daya Beli (000)**)	617,59	623,48	628,30	8.536	8.803	9.040	9.231	9.302
Rata-rata Konsumsi Per Kapita Sebulan (Rp) ***)	329.688	361.314	392.374	453.723	557.869	600.440	651.066	703.344

Sumber: BPS, dari berbagai Publikasi

Catatan:

\*) Tahun 2007-2009 menggunakan tahun dasar 2000, 2010-2014 menggunakan tahun dasar 2010

\*\*\*) Tahun 2007-2009 penghitungan menggunakan metode lama

\*\*\*) Angka dari Susenas Panel Maret 2007- 2010 dan Susenas 2011-2014

#### 8.4. Perkembangan Distribusi Pendapatan

Di samping peningkatan pendapatan, aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai *proxy* pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Terdapat dua indikator utama yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan. Indikator pertama adalah indikator yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Indikator ini mengukur tingkat pemerataan pendapatan dengan memperhatikan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang di golongkan sebagai berikut:

- a. Memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap tinggi,
- b. memperoleh 12 – 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap sedang,
- c. memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan di anggap rendah.

Berdasarkan kriteria tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, terlihat selama periode 2007 – 2013 tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Sumatera Selatan tergolong rendah. Hal ini tampak dari persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terendah angkanya selalu di atas 17 persen. Persentase pengeluaran penduduk pada kelompok 40 persen terendah pada tahun 2014 adalah 20,58 persen. Pada periode tahun 2007-2009 persentase pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terendah cenderung mengalami peningkatan (21,33 persen menjadi 21,55 persen), periode 2010-2012 mengalami penurunan (20,09 persen menjadi 18,34 persen), kemudian pada periode 2013-2014 kembali mengalami peningkatan (19,84 persen menjadi 20,58).

**Tabel 8.5. Distribusi Pembagian Pengeluaran Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 – 2014**

<b>Indikator</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
40 persen terendah	21,33	21,48	21,55	20,09	18,62	18,34	19,84	20,58
40 persen menengah	37,66	37,98	37,94	37,37	36,94	35,37	35,96	36,86
20 tertinggi	41,00	40,54	40,51	42,55	44,44	46,28	44,21	42,56
<b>Gini Ratio</b>	<b>0,329</b>	<b>0,313</b>	<b>0,313</b>	<b>0,340</b>	<b>0,368</b>	<b>0,382</b>	<b>0,373</b>	<b>0,380</b>

Sumber: BPS, diolah dari Susenas Panel 2007-2010 dan Susenas 2011-2014

Selain kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia dapat juga dipergunakan indikator yang lain, yaitu *Gini Ratio*. *Gini Ratio* tersebut juga dihitung dengan memanfaatkan data pengeluaran. Nilai dari *Gini Ratio* berkisar dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin rendah, sebaliknya semakin mendekati 1 dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok pengeluaran semakin tinggi. Berdasarkan *gini ratio*, pada periode 2007 – 2014 secara keseluruhan terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan yang ditunjukkan oleh meningkatnya *gini ratio* dari 0,329 pada tahun 2007 menjadi 0,340 pada tahun 2010, 0,368 pada tahun 2011 dan 0,382 pada tahun 2012, pada tahun 2013 nilai *gini ratio* mengalami penurunan yaitu menjadi 0,373, mengalami kenaikan kembali menjadi 0,380 pada tahun 2014. Bila dikaitkan dengan bahasan sebelumnya, tampak bahwa selama periode 2007 – 2014 terjadi peningkatan daya beli masyarakat yang juga diikuti dengan fluktuasi ketimpangan pengeluaran.

Menurut kabupaten/kota, ketimpangan yang tinggi terjadi di daerah perkotaan dimana Kota Palembang, Pagar Alam, Lubuklinggau dan Prabumulih secara berurutan memiliki nilai *gini ratio* mencapai 0,418, 0,374, 0,373 dan 0,372. Di kota Palembang dan Lubuk Linggau, proporsi pengeluaran untuk 40 persen penduduk termiskin hanya mencapai 17,61 persen di Lubuklinggau, dan 17,43 persen di Kota Palembang. Sedangkan 20 persen penduduk terkaya menguasai lebih dari 51 persen di Lubuklinggau dan 47 persen di Palembang. Ketimpangan yang rendah di Musi Banyuasin dan Musi Rawas dengan *gini ratio* 0,263 dan 0,285. Di kedua daerah tersebut tercatat penduduk 40 persen termiskin menguasai sekitar sebesar 23,20 persen dan 22,86 persen pengeluaran. Sebaliknya 20 persen penduduk terkaya menguasai pangsa sebesar 37,44 persen dan 38,72 persen.

**Tabel 8.6. Distribusi Pembagian Pengeluaran Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2014**

Kabupaten/Kota	40 persen terendah	40 persen menengah	20 persen tertinggi	Gini Ratio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(01) Ogan Komering Ulu	22,52	37,78	39,70	0,333
(02) Ogan Komering Ilir	22,02	37,15	40,83	0,317
(03) Muara Enim	21,03	38,73	40,24	0,365
(04) Lahat	21,86	38,03	40,10	0,368
(05) Musi Rawas	22,86	38,42	38,72	0,285
(06) Musi Banyuasin	23,20	39,36	37,44	0,263
(07) Banyuasin	20,62	38,38	41,00	0,331
(08) OKU Selatan	23,11	35,59	41,30	0,330
(09) OKU Timur	21,24	38,13	40,63	0,317
(10) Ogan Ilir	22,36	37,87	39,76	0,318
(11) Empat Lawang	21,79	33,56	44,65	0,335
(71) Palembang	17,43	35,19	47,38	0,418
(72) Prabumulih	25,20	37,64	37,16	0,372
(73) Pagaralam	24,76	38,12	37,12	0,374
(74) Lubuklinggau	17,61	30,40	51,99	0,373
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>20,58</b>	<b>36,86</b>	<b>42,56</b>	<b>0,380</b>

Sumber: BPS; Diolah dari Susenas 2014

### 8.5. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga juga merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi

karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau di tabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat di pakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, di mana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi proporsi pengeluaran untuk kebutuhan non makanan semakin sejahtera penduduk di wilayah tersebut.

**Tabel 8.7. Persentase Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 – 2014**

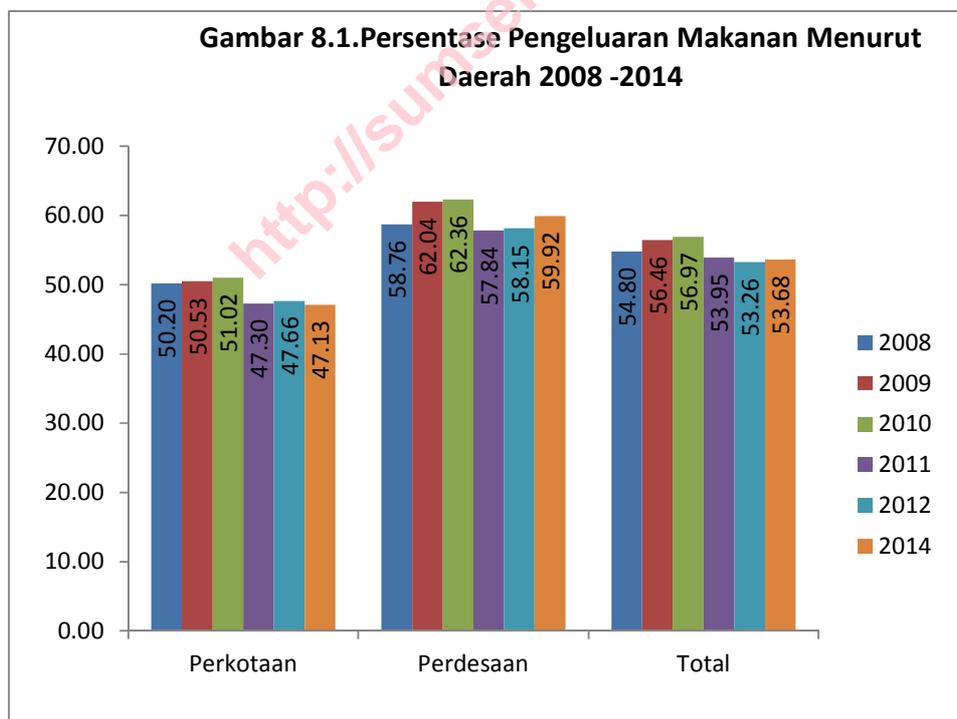
Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Makanan	53,83	54,80	56,46	56,97	53,95	53,26	54,07	53,68
Non Makanan	46,17	45,20	43,54	43,03	46,05	46,74	45,93	46,32
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, diolah dari Susenas Panel 2007-2010 dan Susenas 2011-2014

Berdasarkan Tabel 8.7. terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan pada tahun 2010 lebih besar dari pada tahun 2009, 2008 dan 2007. Sedangkan tahun 2011-2014 juga menurun dibandingkan tahun 2010. Persentase pengeluaran untuk makanan pada tahun 2007 terhitung 53,83 persen, naik menjadi 56,97 persen pada tahun 2010 dan tahun 2011 dan 2012 turun menjadi 53,95

persen dan 53,26 persen, pada tahun 2013 mengalami sedikit peningkatan menjadi 54,07 persen, kemudian turun kembali menjadi 53,68 pada tahun 2014. Sebaliknya persentase pengeluaran untuk bukan makanan pada tahun 2010 lebih rendah dibandingkan pada tahun yang lainnya (tahun 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 dan 2013).

Dilihat menurut daerah tempat tinggal (Gambar 8.1.), nampak perbedaan yang cukup signifikan antara penduduk perkotaan dan pedesaan dalam hal persentase pengeluaran makanan. Persentase pengeluaran makanan penduduk pedesaan jauh di atas persentase pengeluaran makanan penduduk perkotaan. Hal ini mencerminkan tingkat kesejahteraan penduduk pedesaan masih jauh lebih rendah dibandingkan penduduk perkotaan.



Sumber: BPS, diolah dari Susenas Panel 2008-2010 dan Susenas 2011-2014

Persentase pengeluaran makanan terbesar di Kabupaten Musi Rawas, OKU Selatan, Empat Lawang, Ogan Ilir dan OKI. Sedangkan persentase pengeluaran makanan terendah Palembang, Prabumulih, Lubuk Linggau dan Pagar Alam. Sebagaimana disebutkan proporsi pengeluaran makanan merupakan salah satu indikator kesejahteraan di mana, semakin tinggi pendapatan, rumahtangga cenderung menambah pengeluaran non makanan.

**Tabel 8.8. Persentase Pengeluaran Per Kapita Masyarakat Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2014**

Kabupaten/Kota	Makanan	Non Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	53,53	46,47	100,00
(02) Ogan Komering Ilir	60,32	39,68	100,00
(03) Muara Enim	55,15	44,85	100,00
(04) Lahat	56,10	43,90	100,00
(05) Musi Rawas	62,23	37,77	100,00
(06) Musi Banyuasin	59,93	40,07	100,00
(07) Banyuasin	59,52	40,48	100,00
(08) OKU Selatan	62,00	38,00	100,00
(09) OKU Timur	53,21	46,79	100,00
(10) Ogan Ilir	60,53	39,47	100,00
(11) Empat Lawang	60,58	39,42	100,00
(12) Pali	64,16	35,84	100,00
(71) Palembang	44,41	55,59	100,00
(72) Prabumulih	51,33	48,67	100,00
(73) Pagaralam	51,66	48,34	100,00
(74) Lubuklinggau	55,41	44,59	100,00
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>53,68</b>	<b>46,32</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS; Susenas 2014

## 8.6. Perubahan Harga

Kemampuan daya beli penduduk dipengaruhi oleh dua hal, yaitu pendapatan yang diterima penduduk dan perubahan harga. Meskipun pendapatan penduduk meningkat, tidak serta merta meningkatkan daya beli penduduk, karena bisa terjadi harga-harga meningkat lebih tinggi dibandingkan kenaikan pendapatan penduduk tersebut. Karena itu, perubahan harga menjadi salah satu indikator penting yang harus dicermati dalam membahas perubahan kesejahteraan penduduk. Indikator perubahan harga yang umumnya digunakan adalah angka inflasi.

**Tabel 8.9. Laju Inflasi Bulan Kota Palembang Tahun 2008 – 2014 (2007 = 100)**

Bulan (1)	2008 (2)	2008 (3)	2010 (4)	2011 (5)	2012 (6)	2013 (7)	2014 (8)
Januari	0,91	-0,28	0,61	0,82	0,17	0,63	1,07
Februari	0,35	0,37	0,28	-0,32	-0,44	0,73	-0,24
Maret	1,83	-0,15	-0,31	-0,77	0,04	0,85	-0,20
April	2,38	-0,28	0,01	-0,28	0,49	0,04	-0,14
Mei	1,56	0,17	0,22	0,79	0,08	-0,41	-0,03
Juni	3,41	0,19	0,95	0,65	0,69	1,18	0,54
Juli	1,32	0,41	1,40	0,70	0,46	2,92	0,89
Agustus	0,79	-0,14	0,07	0,69	0,51	0,58	0,10
September	1,05	1,29	1,01	0,59	-0,29	-0,44	0,47
Oktober	-0,09	0,15	-0,06	0,50	0,41	0,83	0,80
Nopember	-0,40	0,07	1,16	0,02	0,24	-0,05	2,10
Desember	0,19	0,03	0,54	0,35	0,32	0,04	2,75
<b>Kumulatif</b>	<b>11,15</b>	<b>1,85</b>	<b>6,02</b>	<b>3,78</b>	<b>2,72</b>	<b>6,90</b>	<b>8,38</b>

Sumber: Berita Resmi Statistik Prov. Sumsel

Tabel 8.9. memperlihatkan laju inflasi Kota Palembang tahun 2008-2014. Dari tabel tersebut terlihat bahwa inflasi selama tahun 2008 sebesar 11,15 persen, tahun 2009 sebesar 1,85 persen, tahun 2010 sebesar 6,02 persen, tahun 2011 sebesar 3,78 persen. Pada tahun 2012 nilai inflasi mengalami sedikit penurunan yaitu menjadi 2,72. Sedangkan pada tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu menjadi 6,90 dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan kembali menjadi 8,38. Dibandingkan dengan kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita periode 2010 – 2013 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 8.4. di atas, angka inflasi masih berada di atas rata-rata kenaikan pengeluaran per kapita atas dasar harga konstan.

### **8.7. Permasalahan dan Tantangan**

Salah satu tantangan yang dihadapi di bidang perekonomian nasional pada masa mendatang adalah menjaga daya beli masyarakat agar tetap meningkat sehingga tetap dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi. Daya beli masyarakat akan dijaga melalui: (i) peningkatan stabilitas harga; (ii) peningkatan kelancaran arus barang (terutama bahan pokok) untuk menjaga ketersediaan barang; serta (iii) penguatan perdagangan dalam negeri yang berkesinambungan untuk mendorong transaksi perdagangan domestik dan meningkatkan kesempatan berusaha. Untuk itu berbagai permasalahan yang menghambat peningkatan daya beli masyarakat harus dapat diatasi.

Beberapa permasalahan pokok yang masih dihadapi terkait dengan peningkatan daya beli masyarakat antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Belum efisien dan efektifnya sistem distribusi nasional yang disebabkan oleh panjangnya rantai distribusi, belum memadainya sarana dan prasarana perdagangan, serta belum tersedianya sistem informasi harga, permintaan dan pasokan barang di tingkat produsen dan konsumen terutama untuk bahan

pokok, serta terbatasnya sarana penyimpanan (pergudangan, silo, dan *cold storage*) di tingkat produksi.

- b. Masih perlunya upaya penguatan pasar domestik dan peningkatan efisiensi pasar komoditas. Hal ini sangat penting untuk mendorong permintaan domestik terhadap produk dalam negeri, meningkatkan peran UKM dalam perekonomian domestik dan pengembangan produk kreatif, serta mendorong aktivitas perdagangan komoditas berjangka.
- c. Belum optimalnya upaya pengawasan perdagangan dan peningkatan iklim usaha perdagangan. Salah satu penyebabnya adalah masih terbatasnya upaya penataan kelembagaan perdagangan dalam negeri, seperti: perlindungan konsumen, metrologi, pengawasan barang beredar, persaingan usaha, dan komoditas berjangka.
- d. Masih belum optimalnya kebijakan dan penataan sarana perdagangan, seperti: pasar induk, pasar ritel (modern dan tradisional), serta pasar di daerah terpencil dan perbatasan.

*Halaman ini sengaja dikosongkan*

<http://sumsel.bps.go.id>

## **BAB IX**

### **PERUMAHAN DAN SANITASI**

Kebutuhan akan perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang. Arti fisik perumahan/pemukiman yaitu tempat tinggal anggota masyarakat dan individu-individu yang biasanya hidup dalam ikatan perkawinan atau keluarga dengan berbagai fasilitas pendukungnya. Rumah digunakan sebagai tempat berlindung terhadap gangguan dari luar dan sebagai tempat tinggal sehari-hari penghuninya yaitu sebagai tempat untuk tumbuh, hidup, berinteraksi dan fungsi lainnya. Oleh karena itu rumah diharapkan mampu memberikan rasa nyaman bagi penghuninya dan harus memenuhi syarat-syarat kesehatan.

Data keadaan perumahan sangat penting terutama untuk menggambarkan salah satu dimensi kesejahteraan rumahtangga. Beberapa aspek yang dapat digambarkan dari data fasilitas perumahan antara lain adalah kelayakan dan kesehatan rumah yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tingkat pendapatan dan aspek-aspek lain. Untuk mengetahui bagaimana kondisi perumahan di Sumatera Selatan, pada bab ini akan diuraikan beberapa indikator perumahan dan pemukiman seperti kondisi fisik bangunan dan fasilitasnya.

#### **9.1. Kualitas Rumah Tinggal**

Rumah merupakan tempat berkumpul bagi semua anggota keluarga sebagai tempat untuk menghabiskan sebagian besar waktunya, sehingga kondisi kesehatan perumahan sangat berperan sebagai media penularan penyakit di antara anggota keluarga atau tetangga sekitarnya. Salah satu ukuran yang digunakan

untuk menilai kesehatan perumahan diantaranya adalah luas lantai rumah/tempat tinggal. Luas lantai rumah tempat tinggal selain digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan sosial masyarakat, secara tidak langsung juga dikaitkan dengan sistem kesehatan lingkungan keluarga atau tempat tinggal (perumahan). Luas lantai erat kaitannya dengan tingkat kepadatan hunian atau rata-rata luas ruang untuk setiap anggota keluarga.

Pada tahun 2014 tercatat sebesar 33,96 persen rumah tangga di Sumatera Selatan yang tinggal di rumah yang relatif sempit, yaitu kurang dari 10 m<sup>2</sup> per anggota rumah tangga. Dibandingkan tahun 2006, persentase rumahtangga yang menempati rumah dengan luas kurang dari 10 m<sup>2</sup> mengalami penurunan (Tabel 9.1.). Jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2013, sedikit mengalami peningkatan dari 32,28 persen..

**Tabel 9.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2006 – 2014**

Kualitas Perumahan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Luas Lantai Per Kapita Kurang dari 10 m <sup>2</sup>	35,45	35,32	37,96	35,07	36,05	36,18	34,12	32,28	33,96
Lantai Bukan Tanah	87,97	88,82	89,14	90,95	89,49	93,10	95,33	95,09	95,37
Atap Layak	95,56	93,96	93,07	94,97	95,28	95,44	96,19	96,50	97,29
Dinding Permanen	97,63	97,57	96,97	97,32	97,23	97,40	98,15	97,80	98,39

Sumber: BPS; Susenas 2006 – 2014

Selain dari luas lantai, jenis lantai juga dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kualitas perumahan. Semakin baik kualitas lantai perumahan dapat diasumsikan semakin membaik tingkat kesejahteraan penduduknya. Selain itu, jenis lantai juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Semakin banyak rumah tangga yang mendiami rumah dengan lantai tanah akan berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Karena lantai tanah dapat menjadi media yang subur bagi timbulnya kuman penyakit dan media penularan penyakit tertentu, seperti penyakit diare, cacangan dan penyakit kulit.

Pada tahun 2006 tercatat 87,97 persen rumah tangga di Sumatera Selatan tidak menggunakan tanah sebagai lantai rumah. Angka ini meningkat menjadi 93,10 persen pada tahun 2011 dan menjadi 95,33 persen pada tahun 2012. Sedangkan pada tahun 2014, angka ini mengalami sedikit peningkatan yaitu menjadi 95,37 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa meskipun masih cukup banyak rumah tangga yang tinggal dalam rumah yang kurang sehat, akan tetapi cenderung terdapat juga masih sedikit yang melakukan perbaikan kondisi lantai rumah penduduk dari tahun ke tahun.

Indikator kualitas perumahan yang lain adalah rumah tinggal dengan atap yang layak (tidak beratap dedaunan) tercatat sebesar 97,29 persen pada tahun 2014 atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2007 - 2013. Sedangkan rumah tinggal dengan dinding permanen pada tahun 2013 tercatat sebesar 97,80 persen, dan sedikit meningkat menjadi 98,39 pada tahun 2014.

Tabel 9.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2014

Kabupaten/Kota	Luas Lantai Per Kapita Kurang dari 10 m2	Lantai Bukan Tanah	Atap Layak	Dinding Permanen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(01) Ogan Komering Ulu	29,38	97,76	99,82	98,84
(02) Ogan Komering Ilir	32,76	94,00	93,64	98,05
(03) Muara Enim	39,08	97,13	97,34	98,66
(04) Lahat	37,96	96,65	100,00	96,17
(05) Musi Rawas	30,31	94,78	99,41	99,70
(06) Musi Banyuasin	35,99	92,04	97,07	99,60
(07) Banyuasin	33,30	86,93	94,17	98,29
(08) OKU Selatan	40,36	92,42	97,95	90,74
(09) OKU Timur	14,14	92,60	99,10	99,45
(10) Ogan Ilir	44,57	98,72	90,80	98,76
(11) Empat Lawang	35,98	98,91	99,33	97,10
(71) Palembang	38,61	99,68	98,46	99,42
(72) Prabumulih	31,69	99,76	99,30	99,48
(73) Pagaralam	33,68	99,54	99,70	96,69
(74) Lubuklinggau	28,96	99,53	100,00	98,63
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>33,96</b>	<b>95,37</b>	<b>97,29</b>	<b>98,39</b>

Sumber: BPS; Susenas 2014

Jika dilihat menurut kabupaten/kota, pada tahun 2014 persentase rumah tangga dengan luas lantai per kapita kurang dari 10 m<sup>2</sup> yang cukup besar (lebih dari 40 persen) terdapat di Kabupaten Ogan Ilir dan OKU Selatan. Jika ditinjau dari jenis lantai bukan tanah persentase terkecil terdapat di Kabupaten Banyuasin.

Dilihat dari jenis atap yang layak persentase terendah terdapat di Kabupaten Ogan Ilir; serta dilihat dari jenis dinding permanen persentase terendah di Kabupaten OKU Selatan (Tabel 9.2).

## 9.2. Fasilitas Rumah Tinggal

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman atau tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas suatu rumah tinggal. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya sarana penerangan listrik, air bersih serta jamban sendiri dengan tangki septik.

Pada tahun 2014 tercatat sebesar 96,62 persen rumah tinggal di Sumatera Selatan telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Angka penggunaan listrik ini konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya dan meningkat cukup besar dibandingkan tahun 2010 yang besarnya 88,69 persen. Namun demikian saat ini masih ada sekitar 3,38 persen rumahtangga yang belum menggunakan listrik sebagai penerangan utama.

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari. Ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Pada tahun 2014 rumah tangga di Sumatera Selatan yang menggunakan air leding dan air dalam kemasan baru mencapai 35,01 persen. Secara umum pengguna air minum leding dan kemasan tersebut meningkat cukup besar jika dibandingkan dengan tahun 2010 maupun 2013. Rumah tangga pengguna air bersih secara keseluruhan adalah yang bersumber dari ledeng, air kemasan, pompa, serta sumur/mata air terlindung

dengan jarak ke tempat pembuangan limbah lebih dari 10 m. Pada tahun 2014 jumlah pengguna air bersih tersebut sebesar 59,97 persen. Angka penggunaan air bersih ini secara konsisten mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak tahun 2006.

**Tabel 9.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2006 – 2014**

Kualitas Perumahan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Sumber Penerangan Listrik	77,21	80,52	82,10	88,05	88,69	92,01	94,02	94,58	96,62
Air Minum Leding dan Kemasan	21,28	22,95	24,46	28,90	28,14	32,51	32,60	33,84	35,01
Air Bersih	40,69	46,97	48,23	51,83	52,50	57,37	58,13	59,77	59,97
Jamban Sendiri dengan Tangki Septik	28,69	37,06	39,03	41,40	45,32	46,14	50,87	53,29	56,96

Sumber: BPS; Susenas 2006 – 2014

Sistem pembuangan kotoran/air besar manusia sangat erat kaitannya dengan kondisi lingkungan dan resiko penularan suatu penyakit, khususnya penyakit saluran pencernaan. Klasifikasi sarana pembuangan kotoran dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko pencernaan yang mungkin di timbulkan. Masalah kondisi lingkungan tempat pembuangan kotoran manusia tidak terlepas dari aspek kepemilikan terhadap sarana yang digunakan terutama dikaitkan dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan sarana. Fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Dari tahun ke tahun rumah tangga yang memiliki jamban sendiri dengan tangki septik terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 tercatat sebesar 28,69 persen rumah tangga di Sumatera Selatan yang mempunyai jamban sendiri dengan tangki septik, kemudian pada tahun 2014 meningkat menjadi 56,96 persen. Dengan demikian ada perbaikan fasilitas perumahan di Sumatera Selatan periode 2006 – 2014 menuju pada fasilitas yang sesuai dengan standar kesehatan.

Fasilitas rumah dilihat menurut kabupaten/kota seperti disajikan pada Tabel 9.4. Penggunaan sarana penerangan listrik yang paling rendah adalah di Kabupaten OKU Selatan. Penggunaan air leding dan kemasan kecuali di Kota Palembang umumnya masih cukup rendah khususnya di Musi Rawas, Empat Lawang dan Kota Pagar Alam yaitu kurang dari 10 persen. Demikian juga penggunaan air bersih secara keseluruhan rata-rata masih cukup rendah kecuali di Kota Palembang yang mencapai 98,37 persen. Sedangkan rumahtangga pengguna jamban sendiri dengan tangki septik juga umumnya kurang dari 70 persen, kecuali di Kota Palembang, Prabumulih dan Lubuklinggau. Dengan demikian, berdasarkan data-data pada Tabel 9.4 tersebut diketahui bahwa penggunaan fasilitas rumah yang sesuai standar kesehatan di Sumatera Selatan ternyata masih relatif rendah terutama berkaitan dengan penggunaan air bersih dan penggunaan jamban sendiri menggunakan tangki septik.

Tabel 9.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Beberapa Indikator Fasilitas Perumahan, 2014

Kabupaten/Kota	Sumber Penerangan Listrik	Air Minum Leding dan Kemasan	Air Bersih	Jamban Sendiri dengan Tangki Septik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(01) Ogan Komering Ulu	98,24	33,12	71,28	63,18
(02) Ogan Komering Ilir	95,96	18,22	42,16	42,26
(03) Muara Enim	95,67	22,48	54,58	61,25
(04) Lahat	97,70	16,51	38,29	43,44
(05) Musi Rawas	95,83	7,90	54,22	40,88
(06) Musi Banyuasin	96,40	25,33	49,32	49,54
(07) Banyuasin	97,23	38,17	48,32	52,16
(08) OKU Selatan	77,98	11,17	39,77	32,11
(09) OKU Timur	98,20	13,10	69,16	61,20
(10) Ogan Ilir	99,05	26,45	56,11	55,50
(11) Empat Lawang	91,24	8,88	20,32	14,46
(71) Palembang	100,00	97,27	98,37	84,40
(72) Prabumulih	99,75	31,77	72,27	80,65
(73) Pagaram	97,98	9,37	32,19	51,10
(74) Lubuklinggau	99,79	27,83	64,24	75,12
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>96,62</b>	<b>35,01</b>	<b>59,97</b>	<b>56,96</b>

Sumber: BPS; Susenas 2014

### 9.3. Permasalahan dan Tantangan

Tantangan yang dihadapi saat ini serta upaya-upaya yang diperlukan adalah:

1. Masih tingginya angka kemiskinan yang menyebabkan masyarakat belum mampu membangun rumah yang memadai sesuai standar kesehatan. Upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui fasilitasi pembangunan baru/peningkatan kualitas perumahan swadaya serta penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya
2. Terbatasnya akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan. Sistem pembiayaan perumahan belum mampu mengakomodasi pinjaman bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap atau bekerja di sektor informal. Sehingga diperlukan upaya peningkatan aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui fasilitas likuiditas, kredit mikro perumahan dan tabungan perumahan
3. Terbatasnya penyediaan prasarana dan sarana dasar pemukiman. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan prasarana, sarana dasar, dan utilitas umum yang memadai dan terpadu dengan pengembangan kawasan perumahan.
4. Penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi yang layak bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin termasuk meningkatkan penyediaan

infrastruktur air minum perpipaan. Dalam hal ini upaya yang diperlukan antara lain: pembangunan dan perbaikan sistem air baku, perbaikan dan pengembangan instalasi serta pengembangan dan perbaikan jaringan transmisi dan distribusi, terutama di kawasan perkotaan. Sementara itu, di perdesaan pengembangan sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat dengan fokus pelayanan bagi masyarakat miskin.

5. Sejalan dengan itu, kesadaran masyarakat untuk menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) seperti penggunaan air bersih dan jamban yang sehat perlu terus ditingkatkan. Hal ini menunjukkan arti pentingnya kampanye serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) untuk menumbuhkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakat. Saat ini, upaya KIE telah dilakukan namun masih kurang memadai. Hal ini mencerminkan masih rendahnya prioritas yang diberikan oleh para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan KIE.

## **BAB X**

### **ASPEK SOSIAL LAINNYA**

Berbicara mengenai aspek sosial memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Selain aspek-aspek sosial yang telah diuraikan di muka, pada bagian ini akan dijelaskan aspek sosial lainnya mencakup akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi serta kondisi sosial ekonomi rumahtangga lainnya yang berkaitan dengan partisipasi rumahtangga terhadap program-program bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun swasta lainnya.

#### **10.1. Akses Terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Adanya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat modern saat ini. Selain sebagai indikator meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi, adanya akses terhadap informasi dan komunikasi menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan rumahtangga. Beberapa indikator akses rumahtangga terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang dikemukakan di sini meliputi kepemilikan telepon rumah, kepemilikan telepon seluler, kepemilikan komputer, akses internet di rumah serta akses anggota rumahtangga terhadap internet di luar rumah. Data-data tersebut disajikan pada Tabel 10.1 di bawah ini.

Kepemilikan telepon rumah masih relatif kecil, pada tahun 2014 hanya 4,93 persen rumah tangga yang memiliki telepon rumah. Angka kepemilikan telepon rumah ini memiliki trend yang cenderung menurun. Hal ini disebabkan kebutuhan komunikasi rumahtangga sudah dipenuhi melalui penggunaan telepon genggam.

Angka kepemilikan telepon seluler jauh lebih besar dibandingkan kepemilikan telepon rumah. Pada tahun 2014 persentase rumah tangga yang memiliki minimal 1 (satu) telepon seluler mencapai 89,51 persen. Dibandingkan tahun 2006 yang hanya 18,30 persen, angka kepemilikan telepon seluler juga meningkat cukup besar, seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi yang meningkat pesat akhir-akhir ini.

Tabel 10.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi, 2006 – 2014

Persentase Rumah tangga	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Memiliki Telepon Rumah	7,75	9,05	8,25	8,36	8,64	7,05	5,11	4,55	4,93
Ada ART Memiliki Telepon Seluler	18,30	32,88	51,70	58,91	75,03	81,00	86,38	88,93	89,51
Memiliki Komputer	2,81	4,61	6,96	9,08	9,45	9,95	12,04	12,82	15,01
Akses Internet*)					9,20	9,25	10,87	11,97	14,02
Akses Internet di Rumah*)	0,46	0,91	3,57	1,76	2,49	2,42	2,86	2,56	2,08
Ada ART Akses Internet di Luar Rumah*)	1,44	3,09	5,42	9,18	8,56	8,67	10,21	16,50	20,26

*Catatan:*

\*) Angka 2010-2014 adalah persentase penduduk 5 tahun ke atas yang memiliki akses internet dalam 3 bulan terakhir

*Sumber: BPS; Susenas 2006 – 2014*

Berbeda dengan kepemilikan telepon seluler, kepemilikan komputer di rumah tangga ternyata masih sangat kecil. Pada tahun 2014 persentase

rumah tangga yang memiliki komputer hanya sebesar 15,01 persen. Hal ini dinilai wajar karena harga komputer lebih tinggi dibandingkan harga telepon seluler. Di samping itu tingkat kebutuhan rumah tangga terhadap komputer dinilai lebih rendah dibandingkan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap telepon seluler. Akan tetapi angka kepemilikan komputer tahun 2014 tersebut meningkat cukup besar jika dibandingkan tahun 2006 yang hanya sebesar 2,81 persen.

Kecilnya angka kepemilikan komputer juga berdampak pada kecilnya akses rumah tangga terhadap internet di rumah. Pada tahun 2009 persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap internet di rumah hanya 1,76 persen. Angka ini juga meningkat dibandingkan tahun 2006, tetapi turun dibandingkan tahun 2008. Pada tahun 2014 jumlah rumah tangga yang mengakses internet di rumah sekitar 2,08 persen. Secara umum sebagian kebutuhan anggota rumah tangga terhadap informasi melalui internet dipenuhi di luar telepon rumah seperti melalui telepon seluler, warnet, kantor, sekolah atau tempat lainnya di luar rumah. Pada tahun 2009, persentase rumah tangga yang anggota rumah tangganya memiliki akses internet di luar rumah termasuk melalui telepon seluler mencapai 9,18 persen, meningkat dibandingkan tahun 2006 yang besarnya 1,44 persen, demikian juga dibandingkan tahun 2008 yang besarnya 5,42 persen. Jumlah tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2012 menembus di atas 10 persen yaitu 10,21 persen. Pada tahun 2013 meningkat signifikan yaitu menjadi 16,50 persen dan 20,26 persen pada tahun 2014.

Berdasarkan indikator akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi di atas, diketahui bahwa kelima indikator yang dikemukakan angkanya mengalami peningkatan dari tahun 2006 – 2014. Meskipun angka-angka tersebut dinilai masih relatif kecil, adanya peningkatan angka-angka tersebut pada periode 2006 – 2014 jelas merupakan salah satu indikasi meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Sumatera Selatan pada periode yang sama terutama ditandai peningkatan kebutuhan informasi yang berasal dari internet.

**Tabel 10.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Beberapa Indikator Akses Terhadap Teknologi Informasi/Komunikasi, 2014**

Kabupaten/Kota	Memiliki Telepon Rumah	Ada ART Memiliki Telepon Seluler	Memiliki Komputer	Akses Internet di Rumah *)	Akses Internet di Luar Rumah *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(01) Ogan Komering Ulu	3,42	92,87	21,25	2,10	20,46
(02) Ogan Komering Ilir	1,44	86,32	6,25	0,60	6,81
(03) Muara Enim	3,45	85,41	9,00	1,08	9,11
(04) Lahat	3,81	88,25	11,64	1,55	16,33
(05) Musi Rawas	1,62	81,41	5,57	0,42	5,09
(06) Musi Banyuasin	1,83	92,81	6,65	1,04	10,44
(07) Banyuasin	3,89	89,64	9,75	2,59	16,71
(08) OKU Selatan	3,61	83,24	4,87	0,16	6,64
(09) OKU Timur	1,04	88,95	8,20	0,90	11,88
(10) Ogan Ilir	1,96	88,68	13,18	1,82	14,49
(11) Empat Lawang	2,41	81,93	7,44	0,82	8,38
(71) Palembang	14,77	97,15	37,17	4,97	51,54
(72) Prabumulih	3,00	92,09	25,05	0,96	21,54
(73) Pagaralam	3,12	91,60	16,44	2,67	20,68
(74) Lubuklinggau	9,48	93,51	28,93	5,20	37,23
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>4,93</b>	<b>89,51</b>	<b>15,01</b>	<b>2,08</b>	<b>20,26</b>

*Catatan:*

\*) Persentase penduduk 5 tahun keatas yang memiliki akses internet dalam 3 bulan terakhir

Sumber: BPS; Susenas 2014

Dilihat per kabupaten/kota, secara keseluruhan terlihat bahwa akses teknologi informasi sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Selatan masih sangat rendah. Akses yang paling rendah khususnya dijumpai di Kabupaten Musi Rawas, OKU Selatan, Empat Lawang dan OKI (Tabel 10.2.).

## 10.2. Sosial Ekonomi Rumahtangga Lainnya

Kondisi sosial ekonomi rumahtangga dapat dilihat dari partisipasi rumahtangga atau anggota rumahtangga terhadap berbagai program bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun komponen masyarakat lainnya. Beberapa jenis bantuan yang umumnya ditujukan kepada rumahtangga miskin misalnya pelayanan kesehatan gratis, beras murah atau raskin dan bantuan kredit usaha. Selain itu, untuk membantu ekonomi rumahtangga tidak jarang satu atau beberapa anggota rumahtangga dikirim untuk bekerja sebagai TKI di luar negeri.

Pada tahun 2012 diperkirakan 11,78 persen rumah tangga yang pernah mendapat pelayanan kesehatan gratis periode 6 bulan sebelum survei dilakukan. Pada tahun 2013 dan 2014 terdapat 51,05 dan 57,21 persen rumah tangga memiliki jaminan/asuransi kesehatan. Sementara itu persentase rumahtangga yang membeli beras murah atau raskin dalam 3 bulan terakhir pada tahun 2014 sebesar 39,74 persen. Dibandingkan persentase penduduk miskin angka ini sangat besar, sehingga diduga rumahtangga yang mendapatkan beras murah atau raskin tidak semuanya merupakan rumahtangga miskin. Khusus untuk beras murah misalnya melalui Operasi Pasar memang tidak khusus ditujukan untuk rumahtangga miskin.

Beberapa tahun terakhir pemerintah banyak menggulirkan program bantuan kredit usaha kepada rumahtangga miskin misalnya melalui Program Pengembangan Kecamatan, Program P2KP (Program Penanggulangan

Kemiskinan Perkotaan) maupun program pemerintah lainnya. Namun demikian, pada tahun 2014 rumah tangga yang mendapat bantuan kredit selama setahun terakhir sebelum pencacahan baru mencapai 3,71 persen. Ini berarti baru sebagian kecil rumah tangga miskin yang terjangkau oleh program bantuan kredit, padahal persentase penduduk miskin pada tahun 2014 di Sumatera Selatan mencapai angka 13,62 persen.

**Tabel 10.3 Persentase Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Sosial Ekonomi Rumahtangga Lainnya, 2006 – 2014\*\*)**

Persentase Rumahtangga	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Ada ART Memiliki Jaminan/Asuransi Kesehatan Setahun Terakhir*)	12,08	11,68	9,67	13,51	16,49	13,26	11,78	51,05	57,21
Pernah Membeli Beras Murah/Raskin 3 Bulan Terakhir	33,24	43,20	45,43	47,72	46,30	44,58	41,42	39,17	39,74
Pernah Mendapatkan Kredit Usaha Setahun Terakhir	1,60	1,97	3,69	4,61	5,92	4,39	3,55	4,58	3,71

Sumber: BPS; Susenas 2006 – 2014

Catatan:

\*) Angka tahun 2006 sampai dengan 2012 merupakan angka persentase rumah tangga dengan Ada ART Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Gratis 6 Bulan Terakhir, sedangkan tahun 2013-2014 yang memiliki jaminan/asuransi kesehatan setahun terakhir

\*\*\*) Angka tahun 2006 dan 2007 keadaan 6 bulan terakhir

Tabel 10.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota dan Beberapa Indikator Sosial Ekonomi Rumahtangga Lainnya, 2014

Kabupaten/Kota	Ada ART Memiliki Jaminan/Asuransi Kesehatan Setahun Terakhir	Pernah Membeli Beras Murah/Raskin 3 Bulan Terakhir	Pernah Mendapatkan Kredit Usaha Setahun Terakhir
(1)	(2)	(3)	(4)
(01) Ogan Komering Ulu	53,55	27,45	6,78
(02) Ogan Komering Ilir	72,47	48,52	3,41
(03) Muara Enim	74,83	37,35	3,06
(04) Lahat	49,35	45,04	3,66
(05) Musi Rawas	86,45	41,09	3,07
(06) Musi Banyuasin	73,26	44,33	1,92
(07) Banyuasin	25,44	40,56	4,87
(08) OKU Selatan	89,17	34,71	2,54
(09) OKU Timur	13,05	20,31	4,47
(10) Ogan Ilir	35,35	55,75	9,68
(11) Empat Lawang	42,27	23,91	1,63
(71) Palembang	60,28	44,17	1,79
(72) Prabumulih	84,46	47,68	1,72
(73) Pagaralam	58,23	23,24	6,34
(74) Lubuklinggau	50,65	37,42	8,79
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>57,21</b>	<b>39,74</b>	<b>3,71</b>

Sumber: BPS; Susenas 2014

Tabel 10.4 menyajikan indikator sosial ekonomi rumahtangga lainnya menurut kabupaten/kota. Persentase rumahtangga yang memiliki jaminan/asuransi kesehatan gratis tertinggi dijumpai Lubuklinggau. Angka-angka ini sama sekali belum menunjukkan kondisi tingkat kemiskinan di daerah tersebut karena disinyalir

masih ada penduduk tidak miskin yang menerima pelayanan kesehatan gratis maupun raskin tersebut.

### 10.3. Permasalahan dan Tantangan

Berdasarkan uraian di atas, situasi yang dihadapi di Sumatera Selatan adalah masih rendahnya akses masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Karena itu diperlukan upaya yang cukup besar untuk meningkatkan akses masyarakat mencapai target MDGs pada tahun 2015.

Sebagian besar wilayah Sumatera Selatan adalah daerah pedesaan yang saat ini masih memiliki kesenjangan informasi yang cukup lebar dibandingkan daerah perkotaan. Sebagian besar daerah terpencil belum memiliki akses TIK modern dan kualitas akses di kebanyakan daerah masih rendah, karena infrastruktur nasional pendukung telekomunikasi yang ada berbasis sistem satelit, akses nirkabel, dan jaringan kabel bawah tanah belum menjangkau seluruh wilayah, khususnya daerah pedesaan dan terpencil. Infrastruktur dan penggunaan internet berkembang pesat di kota-kota besar, tetapi infrastruktur pendukung jauh lebih terbatas di daerah pedesaan. Sebagai akibatnya, masih terdapat kesenjangan yang lebar dalam hal penggunaan telepon, komputer dan internet antar perkotaan dan pedesaan. Penyediaan infrastruktur telekomunikasi sampai ke pelosok pedesaan menjadi tantangan berat yang dihadapi pemerintah saat ini untuk menjembatani adanya kesenjangan tersebut.

Tantangan lainnya adalah berkaitan dengan ketepatan program bantuan yang digulirkan oleh pemerintah untuk masyarakat miskin. Sebagaimana ditunjukkan sebelumnya bahwa program bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih adanya masyarakat tidak miskin yang menerima bantuan tersebut.

# DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://sumsel.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Kapten Anwar Sastro 1694/1131 Palembang 30129  
Telp. (0711) 351665 Fax (0711) 353174